



BUKU I

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2025



SALINAN

BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BOGOR TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memastikan kesesuaian penyelenggaraan pembangunan daerah dengan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta guna menyinergikan program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden, pemerintah daerah diminta untuk segera menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta program Asta Cita ke dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengatur bahwa perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah berkenaan dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
10. Undang-Undang Nomor 102 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7039);

11. Peraturan ...

11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

20. Peraturan ...

20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
21. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
22. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
23. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
24. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

32. Peraturan ...

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);
33. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264);
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9);
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Bogor Nomor 119);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 128);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 129);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 9);
40. Peraturan Bupati Bogor Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 14);
41. Peraturan Bupati Bogor Nomor 58 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 60) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 58 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025 Nomor 11);

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOGOR TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah Daerah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
5. Bupati adalah Bupati Bogor.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut PD, adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor.
9. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bogor, yang selanjutnya disebut dengan RPJPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Bogor untuk periode 20 (dua puluh) tahunan.

12. Rencana ...

12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor, yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Bogor untuk periode 5 (lima) tahunan.
13. Rencana Kerja Pemerintah, yang selanjutnya disingkat dengan RKP, adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, yang selanjutnya disebut dengan RKPD Provinsi, adalah dokumen perencanaan Provinsi Jawa Barat yang untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja PD, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
19. Kebijakan Umum APBD, yang selanjutnya disingkat KUA, adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
21. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS, adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
22. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD;
23. Program Strategis Nasional adalah program yang ditetapkan Presiden sebagai program yang memiliki sifat strategis secara nasional dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta menjaga pertahanan dan keamanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

24. Sistem ...

24. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, yang selanjutnya disingkat SIPD, adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan Daerah.
25. Informasi Pembangunan Daerah adalah sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, serta analisis dan profil pembangunan Daerah.
26. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
27. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
28. Sub kegiatan adalah bagian dari kegiatan yang bersifat detail dan dilaksanakan untuk menghasilkan output langsung.
29. Keluaran adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil dapat terwujud.
30. Hasil adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
31. Dampak adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil beberapa program.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penetapan perubahan RKPD Tahun 2025 adalah untuk:

- a. memastikan kesesuaian penyelenggaraan pembangunan daerah dengan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih;
- b. menyinergikan program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden; dan
- c. memberikan arah bagi PD dan Pemerintah Desa dalam menyusun perencanaan perubahan Tahun 2025.

Pasal 3 ...

Pasal 3

Tujuan Perubahan RKPD Tahun 2025 adalah:

- a. terwujudnya sinkronisasi pembangunan daerah dengan pembangunan di tingkat provinsi dan tingkat nasional tahun 2025 berdasarkan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan;
- b. terintegrasikannya program/kegiatan/sub kegiatan dalam dokumen perubahan Renja PD dengan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden; dan
- c. terumuskannya perubahan kebijakan dan anggaran pembangunan daerah.

BAB III

KEDUDUKAN DAN MUATAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Kedudukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Pasal 4

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan tahun 2025 terhitung mulai diundangkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
- (2) Perubahan RKPD 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan dan indikasi program prioritas dalam RPJMD Tahun 2025-2029 yang sedang disusun.
- (3) Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029, bersinergi dengan RKP Tahun 2025, visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah, Program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden, Perubahan RKPD Provinsi, serta berdasarkan laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I tahun berkenaan.
- (4) Perubahan RKPD Tahun 2025 berkedudukan sebagai dokumen yang mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi, mulai tahapan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 hingga disusunnya Perubahan RKPD Tahun 2025.
- (5) Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi:
 - a. Bupati dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Perubahan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025;

b. PD ...

- b. PD dalam penyusunan Perubahan Renja PD Tahun 2025; dan
 - c. Pemerintah Desa dalam penyusunan Perubahan RKP Desa Tahun 2025.
- (6) Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dalam merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedua

Muatan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Pasal 5

Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), memuat:

- a. perubahan arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana target program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan PD penanggung jawab yang wajib dilaksanakan oleh pemerintahan daerah dalam sisa masa berlaku perencanaan tahun 2025;
- b. pencatatan perubahan-perubahan belanja PD yang berasal dari dana transfer dan/atau perubahan penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025; dan
- c. target pencapaian kinerja tahun pertama periode RPJMD Tahun 2025-2029.

Pasal 6

Isi beserta uraian Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 7

- (1) Seluruh data program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikator dan kinerja yang menjadi substansi Perubahan RKPD Tahun 2025, tercantum dalam SIPD.
- (2) Seluruh program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Perubahan Renja PD Tahun 2025.

BAB V ...

BAB V
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Bupati melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mengoordinasikan, menyinergikan dan mengharmonisasikan penyusunan, serta melakukan pengendalian dan evaluasi Perubahan RKPD Tahun 2025.
- (2) Pengendalian dan evaluasi Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengendalian kebijakan;
 - b. pengendalian pelaksanaan; dan
 - c. evaluasi hasil.

Pasal 9

- (1) Pengendalian kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, dilakukan untuk menjamin bahwa Perubahan RKPD Tahun 2025 telah disusun sesuai tahapan dan tata cara yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengendalian kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025.

Pasal 10

- (1) Pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, dilakukan untuk menjamin bahwa prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, serta indikator kinerja, dan pagu indikatif dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 telah dipedomani dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan penyusunan Perubahan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025.
- (2) Pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan bersamaan dengan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Pasal 11

Evaluasi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, dilakukan untuk menilai daya serap, capaian target kinerja program/kegiatan mencakup masukan, keluaran dan hasil yang telah ditetapkan dalam dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025.

BAB VI ...

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 28 Mei 2025
BUPATI BOGOR,

ttd.

RUDY SUSMANTO

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 28 Mei 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd.

AJAT ROCHMAT JATNIKA
BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2025 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



ADI MULYADI

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum Perubahan RKPD Tahun 2025	I-2
1.3 Hubungan Antar Dokumen	I-8
1.4 Maksud dan Tujuan	I-9
1.5 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD	I-10
BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN 2025	II-1
2.1 Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	II-1
2.2 Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten Bogor Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025	II-142
2.3 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Penerapan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) di Kabupaten Bogor	II-145
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1 Kerangka Ekonomi Daerah	III-1
3.2 Kebijakan Keuangan Daerah	III-12
3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan	III-12
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	IV-1
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	IV-1
4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	IV-10
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	V-1
BAB VI PENUTUP	VI-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Bogor sampai dengan Triwulan I Tahun 2025.....	II-3
Tabel 2.2	Rekapitulasi Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Kondisi sampai dengan Triwulan I Tahun 2025	II-105
Tabel 2.3	Capaian Kinerja Perangkat Daerah berdasarkan Perhitungan Skala Nilai Peringkat Kinerja	II-111
Tabel 2.4	Evaluasi Kinerja Anggaran RKPD Kabupaten Bogor Triwulan I Tahun 2025	II-117
Tabel 2.5	Capaian Kinerja Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	II-122
Tabel 2.6	Capaian Kinerja Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	II-124
Tabel 2.7	Capaian Kinerja Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Pilihan	II-126
Tabel 2.8	Capaian Kinerja Perangkat Daerah Pengampu Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	II-127
Tabel 2.9	Capaian Kinerja Perangkat Daerah Pengampu Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	II-129
Tabel 2.10	Capaian Kinerja Perangkat Daerah Pengampu Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	II-130
Tabel 2.11	Capaian Kinerja Perangkat Daerah Pengampu Unsur Pemerintahan Umum	II-131
Tabel 2.12	Capaian Kinerja Perangkat Daerah Pengampu Unsur Kewilayahan	II-132
Tabel 2.13	Evaluasi Sasaran Kabupaten Bogor pada Perubahan RKPD Kabupaten Bogor Tahun 2025.....	II-139
Tabel 2.14	Capaian Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bogor Triwulan I Tahun 2025.....	II-144

Tabel 3.1	Proyeksi Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Bogor disandingkan dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2025 dalam Perubahan RKPD Tahun 2025	III-2
Tabel 3.2	Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bogor Tahun 2023-2024 dan Target Tahun 2025	III-4
Tabel 3.3	Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Bogor Tahun 2023-2024 dan Target Tahun 2025.....	III-5
Tabel 3.4	Kondisi Tingkat Pengangguran Kabupaten Bogor Tahun 2023-2024 dan Target Tahun 2025	III-5
Tabel 3.5	Kondisi Tingkat Kemiskinan Kabupaten Bogor Tahun 2023-2024 dan Target Tahun 2025	III-6
Tabel 3.6	Kondisi Pendapatan Perkapita Kabupaten Bogor Tahun 2023-2024 dan Target Tahun 2025	III-6
Tabel 3.7	Gini Rasio Kabupaten Bogor Tahun 2023-2024 dan Target Tahun 2025	III-7
Tabel 3.8	Perubahan Proyeksi Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Bogor Tahun 2025	III-8
Tabel 3.9	Proyeksi Keuangan Daerah dalam Perubahan RKPD Tahun 2025.....	III-12
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Daerah Tahun 2024-2026	IV-3
Tabel 4.2	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029	IV-6
Tabel 4.3	Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025 Berdasarkan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029	IV-10
Tabel 4.4	Program Pembangunan Daerah yang Mendukung Asta Cita Tahun 2025	IV-21
Tabel 4.5	Program Pembangunan Daerah yang Mendukung Misi Provinsi Jawa Barat Tahun 2025	IV-93
Tabel 5.1	Rekapitulasi Anggaran Sebelum dan Sesudah Perubahan pada Perubahan RKPD Kabupaten Bogor Tahun 2025	V-2
Tabel 5.2	Jumlah Belanja Per-Urusan dan Unsur pada Perubahan RKPD Kabupaten Bogor Tahun 2025	V-5

Tabel 5.3 Program Perangkat Daerah pada Perubahan RKPD
Tahun 2025 V-7

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR : 12 TAHUN 2025

TANGGAL : 28 MEI 2025

TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2025

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BOGOR TAHUN 2025**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bogor Tahun 2025 telah ditetapkan pada tanggal 5 Juli 2024 melalui Peraturan Bupati Bogor Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2025. Namun demikian, dengan telah dilantiknnya Bupati dan Wakil Bupati Bogor untuk periode tahun 2025-2029 pada tanggal 20 Februari 2025, Pemerintah Kabupaten Bogor yang saat ini sedang melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029, dan tahun 2025 merupakan tahun pertama dalam periode tersebut, perlu memastikan kesesuaian penyelenggaraan pembangunan daerah pada tahun 2025 dengan visi, misi dan program yang dituangkan dalam RPJMD. Selain itu, penyesuaian perlu dilakukan untuk menyinergikan dengan program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden dengan kebijakan pembangunan daerah tahun 2025.

Hal ini ditegaskan dalam Surat Edaran Mendagri Nomor 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang tidak hanya menjelaskan kebijakan pembangunan yang diselaraskan, tapi juga mempercepat batas waktu penetapan perkada yang awalnya di minggu III bulan Juli, menjadi minggu IV bulan Mei.

Dengan demikian, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata

Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perkembangan dan dinamika yang terjadi di tingkat nasional, maupun daerah mendasari dilakukannya penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Bogor dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 karena berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan sampai dengan triwulan I menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
- c. Perubahan target sasaran pembangunan daerah, prioritas pembangunan daerah, penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat daerah; dan target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Selanjutnya, Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Bogor Tahun 2025 akan menjadi acuan dalam penyusunan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), serta menjadi landasan dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Tahun 2025, serta bahan penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

1.2 Dasar Hukum Perubahan RKPD Tahun 2025

Secara umum, dasar hukum yang dipedomani dalam perubahan RKPD Kabupaten Bogor Tahun 2025 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
10. Undang-Undang Nomor 102 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7039);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
21. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
22. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
23. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);

24. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);
33. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264);
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9);
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Bogor Nomor 119);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 128);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 129);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 9);

40. Peraturan Bupati Bogor Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 14);
41. Peraturan Bupati Bogor Nomor 58 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 60) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 58 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025 Nomor 11);

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Sebagaimana tercantum dalam RKPD Tahun 2025, Perubahan RKPD Tahun 2025 memiliki hubungan antar dokumen lainnya, yaitu:

- a. Perubahan RKPD Tahun 2025 memedomani kebijakan yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2025-2029 dalam mendukung asta cita yang menjadi misi dan prioritas nasional;
- b. Perubahan RKPD Kabupaten Bogor Tahun 2025 disusun dengan tetap memperhatikan substansi tema, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025;
- c. Perubahan RKPD Kabupaten Bogor Tahun 2025 disusun dengan menyelaraskan prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 yang tercantum dalam Perubahan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 sesuai dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih;
- d. Perubahan RKPD Kabupaten Bogor Tahun 2025 mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan Jawa Barat dan Kabupaten Bogor, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042, dan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2044;
- e. Perubahan RKPD Kabupaten Bogor Tahun 2025 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyempurnakan dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) PD Tahun 2025, meskipun secara

proses, dilakukan simultan antara penyusunan Perubahan RKPD dengan penyusunan Perubahan Renja PD;

- f. Perubahan RKPD Kabupaten Bogor Tahun 2025 menjadi pedoman/dasar penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP), serta sebagai acuan dalam proses penyusunan Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-RAPBD) Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2025;
- g. Perubahan RKPD Kabupaten Bogor Tahun 2025 disusun dengan memanfaatkan aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) yang berlaku skala nasional, sehingga untuk tahapan perencanaan pembangunan daerah, maupun tahapan perencanaan perangkat daerah perubahan tahun 2025, dilaksanakan dengan mengikuti pola pengaturan dalam SIPD;
- h. Perubahan RKPD Kabupaten Bogor Tahun 2025 disusun dengan memedomani Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029 yang telah memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan program prioritas daerah tahun 2025-2030.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan RKPD Tahun 2025 adalah untuk memayungi perencanaan pembangunan daerah dan perangkat daerah tahun 2025 berdasarkan kebijakan nasional dan daerah yang berlaku pada tahun 2025.

Adapun tujuan disusunnya dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025 adalah untuk:

1. menjadi pedoman bagi perubahan perencanaan perangkat daerah tahun 2025;
2. menjamin terwujudnya sinkronisasi pembangunan daerah dengan pembangunan di tingkat Provinsi Jawa Barat dan Nasional tahun 2025 berdasarkan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan;
3. menjamin terintegrasinya program/kegiatan dalam dokumen perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025 sesuai kebijakan nasional dan daerah;

4. memberikan arah bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah dalam merumuskan dan menyusun perubahan perencanaan serta partisipasi dalam pembangunan daerah tahun 2025;
7. menjadi dasar penyusunan KUPA dan PPAS-P serta Perubahan APBD Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2025.

1.5 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

Sistematika Perubahan RKPD Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pendahuluan;
2. Evaluasi Hasil Triwulan I Tahun 2025;
3. Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
4. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
5. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; dan
6. Penutup.

BAB II

EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dimaksudkan sebagai instrumen untuk menilai dan mengukur capaian kinerja pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat selama satu tahun anggaran. Secara rinci maksud dilakukannya evaluasi kinerja terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

- Sebagai mekanisme pengendalian dan pengawasan internal pemerintah pusat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- Sebagai alat ukur kinerja pemerintah daerah untuk mendukung proses pembinaan, penghargaan, maupun penjatuhan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Sebagai sarana untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada masyarakat.
- Untuk mendorong efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Selain hal tersebut diatas, tujuan dilaksanakannya kegiatan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah adalah:

- Menilai tingkat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan indikator dan subindikator yang telah ditetapkan secara nasional.
- Memberikan umpan balik kepada pemerintah daerah terkait hasil kinerja dan area yang perlu diperbaiki untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.
- Menjamin akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui laporan yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Sebagai dasar dalam pemberian penghargaan atau sanksi kepada perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan mengidentifikasi praktik-praktik baik (*best practices*) yang dapat direplikasi dan dikembangkan.

- Mendorong terwujudnya sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dalam kerangka sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.

Berkenaan dengan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dimaksud, capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Bogor hingga Triwulan I Tahun 2025 disajikan dalam Tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Bogor
sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/ KINERJA/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			REALISASI		PD PENGAMPU
			2024	2025	2026	2024	2025 TW 1	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
I	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
A	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							
1	Terwujudnya pendidikan dasar berkualitas yang merata							
	- Rata-rata lama sekolah	Tahun	8.36	8,37	8,38	8.39		Dinas Pendidikan
	- Harapan lama sekolah	Tahun	12.52	12,53	12,54	12.75		Dinas Pendidikan
a.	Meningkatnya mutu dan aksesibilitas PAUD, Dikdas dan Dikmas							
	- Indeks Rapor Pendidikan	Poin	73.05	74,05	75,05			Dinas Pendidikan

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/ KINERJA/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			REALISASI		PD PENGAMPU
			2024	2025	2026	2024	2025 TW 1	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	- Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang PAUD dan Pendidikan Dasar	%	90.95	91,12	92,32			Dinas Pendidikan
b.	Meningkatnya kualitas pelayanan kewenangan Perangkat Daerah							
	- Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Poin	90	83.45	85.75	81.89		Dinas Pendidikan
B	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							
1	Meningkatnya kualitas kesehatan							
	- Indeks keluarga sehat	Poin	0.28	-	-	0.28		Dinas Kesehatan
	- Angka Harapan Hidup	Tahun	74.91	75.17	75.43	74.65	74.90	Dinas Kesehatan
a.	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan							
	- Cakupan layanan kesehatan Masyarakat	%	84.5	100	100	90.15	17.45	Dinas Kesehatan

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/ KINERJA/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			REALISASI		PD PENGAMPU
			2024	2025	2026	2024	2025 TW 1	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	- Cakupan jaminan kesehatan	%	94	98	98	96.1	96.91	Dinas Kesehatan
	- Prevalensi balita stunting	%	26.4	14	13	8.4	1.91	Dinas Kesehatan
b.	Meningkatnya kualitas pelayanan kewenangan Perangkat Daerah							
	- Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Poin	81.7	85	87	82.7		Dinas Kesehatan
C	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							
1	Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur pekerjaan umum yang merata serta tertib penataan ruang							

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/ KINERJA/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			REALISASI		PD PENGAMPU
			2024	2025	2026	2024	2025 TW 1	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	- Persentase kualitas dan cakupan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang	%	64.47	66.98	71.48	70.95		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
a.	Meningkatnya pemenuhan infrastruktur jalan Kabupaten yang berkualitas							
	- Persentase tingkat kemantapan jalan	%	82.52	83.02	83.52	86.61		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
b.	Meningkatnya akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan							
	- Persentase akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan	%	33.27	36.45	39.62			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
c.	Meningkatnya rumah tangga dengan akses sanitasi aman							

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/ KINERJA/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			REALISASI		PD PENGAMPU
			2024	2025	2026	2024	2025 TW 1	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	- Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi aman	%	72	72.2	72.4			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
d.	Meningkatkan akses infrastruktur lingkungan							
	- Persentase luas genangan yang tertangani infrastruktur lingkungan	%	52	55	60	58.04		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
e.	Meningkatnya pemenuhan infrastruktur irigasi							
	- Persentase luas daerah irigasi dalam kondisi baik dan sedang	%	69.49	69.66	69.82	71.35		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
f.	Meningkatnya pelayanan penyelenggaraan jasa konstruksi							

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/ KINERJA/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			REALISASI		PD PENGAMPU
			2024	2025	2026	2024	2025 TW 1	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	- Persentase cakupan pelayanan jasa konstruksi	%	72	80	100	72		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
g.	Terwujudnya tata ruang Kabupaten Bogor yang efisien, berkelanjutan dan berdaya saing							
	- Kesesuaian pemanfaatan ruang	%	70	72.5	75	69.36		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
h.	Meningkatnya kualitas pelayanan kewenangan Perangkat Daerah							
	- Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Poin	78.22	78.25	78.3	78.22		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
D	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							
1	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman							

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/ KINERJA/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			REALISASI		PD PENGAMPU
			2024	2025	2026	2024	2025 TW 1	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	- Persentase kawasan permukiman layak	%	99.57	99.6	99.71	99.57		Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
a.	Meningkatnya kualitas permukiman							
	- Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan	%	46.94	48.28	49.62	46.94	47.41	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
b.	Meningkatnya kualitas pelayanan kewenangan Perangkat Daerah							
	- Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Poin	89.05	89.1	89.15	88.99		Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/ KINERJA/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			REALISASI		PD PENGAMPU
			2024	2025	2026	2024	2025 TW 1	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
E	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							
1	Terwujudnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat							
	- Tingkat Penanganan Gangguan Trantibum	%	87	-	-	87		Satuan Polisi Pamong Praja
	- Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	-	-	100		Satuan Polisi Pamong Praja
	- Indeks Penyelenggaraan Tramtibum dan Satlinmas	Persen	-	100	100			Satuan Polisi Pamong Praja
a.	Meningkatnya Penegakan Perda dan Perkada							
	- Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	-	-	100		Satuan Polisi Pamong Praja
b.	Terwujudnya Penegakan Perda dan Perkada							

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/ KINERJA/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			REALISASI		PD PENGAMPU
			2024	2025	2026	2024	2025 TW 1	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	- Indeks Penegakan Perda dan Perkada	Point	-	84.08	84.08			Satuan Polisi Pamong Praja
c.	Meningkatnya kualitas pelayanan kewenangan Perangkat Daerah							
	- Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Poin	78	79	80	80.5		Satuan Polisi Pamong Praja
2	Terwujudnya ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat Sub Urusan Bencana							
	- Indeks Bencana	Poin	84	86	88	84.06		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
a.	Meningkatnya Kapasitas Daerah terhadap Bencana							
	- Indeks Ketahanan Daerah	Poin	0.53	0.54	0.55	0.59		Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/ KINERJA/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			REALISASI		PD PENGAMPU
			2024	2025	2026	2024	2025 TW 1	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
b.	Meningkatnya kualitas pelayanan kewenangan Perangkat Daerah							
	- Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Poin	70	82	83	81.33		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3	Terwujudnya Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran							
	- Indeks Sub Urusan Kebakaran	Poin	75 (baik))	78 (Baik)	81 (Sangat Baik)	78		Dinas Pemadam Kebakaran
a	Berkurangnya Resiko Bahaya Kebakaran							
	- Response Time pada Wilayah Kabupaten Bogor	menit	15	11.69	11.6	11.697	9.08	Dinas Pemadam Kebakaran
b	Meningkatnya kualitas pelayanan kewenangan Perangkat Daerah							
	- Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Poin	84	86	88	82.15		Dinas Pemadam Kebakaran

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/ KINERJA/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			REALISASI		PD PENGAMPU
			2024	2025	2026	2024	2025 TW 1	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
F	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							
1	Meningkatnya taraf kesejahteraan sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)							
	- Indeks Kesejahteraan Sosial	%	100	100	100	93.95	7.58	Dinas Sosial
a.	Terpenuhinya kualitas pelayanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)							
	- Persentase penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	%	100	100	100	99.91	15.15	Dinas Sosial
b.	Meningkatnya kualitas pelayanan kewenangan Perangkat Daerah							
	- Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Poin	88	89	89	88		Dinas Sosial

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/ KINERJA/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			REALISASI		PD PENGAMPU
			2024	2025	2026	2024	2025 TW 1	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
II	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
A	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							
1	Terwujudnya pemenuhan lapangan kerja							
	- Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	%	22.96	24,33	25,59	31.701		Dinas Tenaga Kerja
a.	Meningkatkan tenaga kerja berdaya saing							
	- Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	1.05	1.12	1.19	1.030		Dinas Tenaga Kerja

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/ KINERJA/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			REALISASI		PD PENGAMPU
			2024	2025	2026	2024	2025 TW 1	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
b.	Meningkatnya kualitas pelayanan kewenangan Perangkat Daerah							
	- Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Poin	87.85	88	88.2	87.85		Dinas Tenaga Kerja
B	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							
1	Meningkatnya Peran Perempuan dan perlindungan anak dalam Pembangunan							
	- Indeks Pembangunan Gender (IPG)	poin	90.77	90.98	91.19			Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/ KINERJA/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			REALISASI		PD PENGAMPU
			2024	2025	2026	2024	2025 TW 1	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
a.	Meningkatnya peran perempuan dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik							
	- Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Poin	59.22	59.45	59.68			Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
b.	Meningkatnya kualitas pelayanan kewenangan Perangkat Daerah							

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/ KINERJA/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			REALISASI		PD PENGAMPU
			2024	2025	2026	2024	2025 TW 1	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	- Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Poin	84.92	86.24	86.24	86.24		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
C	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN							
1	Meningkatnya ketahanan pangan							
	- Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (PoU)	poin	5.05	4.8	4,63	5.68		Dinas Ketahanan Pangan
a.	Meningkatnya kualitas pola konsumsi pangan							
	- Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	poin	81.64	85.1	85.6	84.90		Dinas Ketahanan Pangan

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/ KINERJA/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			REALISASI		PD PENGAMPU
			2024	2025	2026	2024	2025 TW 1	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
b.	Meningkatnya kualitas pelayanan kewenangan Perangkat Daerah							
	- Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Poin	86.3	88.3	88.5	84.27		Dinas Ketahanan Pangan
D	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN							
a.	Meningkatnya tata kelola administrasi dan pemanfaatan Pertanahan							
	- Persentase aset pemda yang didaftarkan sertifikasi	%	79.86	87.83	95.81	79.86	80.61	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
E	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							
1	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup							

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/ KINERJA/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			REALISASI		PD PENGAMPU
			2024	2025	2026	2024	2025 TW 1	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	- Indeks Kualitas Air (IKA)	Poin	48.77	67.2	67.3	51.64		Dinas Lingkungan Hidup
	- Indeks Kualitas Udara (IKU)	Poin	72.19	50.17	50.27	75.65		Dinas Lingkungan Hidup
	- Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Poin	40.05	62.45	62.52	42.97		Dinas Lingkungan Hidup
a.	Menurunnya pencemaran air dan udara							
	- Persentase air permukaan dan udara yang tercemar	%	6.59	6.32	6.32	8.045		Dinas Lingkungan Hidup
b.	Meningkatnya luasan tutupan lahan hijau							
	- Persentase luas tutupan lahan hijau	%	19.71	19.72	19.74	23.13		Dinas Lingkungan Hidup
2	Menurunnya emisi GRK kumulatif							
	- Penurunan emisi GRK kumulatif	Ton Co2eq	n/a	484.301,08*	562,218.85	-		Dinas Lingkungan Hidup

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/ KINERJA/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			REALISASI		PD PENGAMPU
			2024	2025	2026	2024	2025 TW 1	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
a.	Meningkatnya pengelolaan sampah yang kolaboratif							
	- Persentase sampah yang dikelola	%	n/a	81.48	86.33	-	6.66	Dinas Lingkungan Hidup
b.	Meningkatnya kualitas pelayanan kewenangan Perangkat Daerah							
	- Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Poin	75	84.36	84.36	86.84		Dinas Lingkungan Hidup
F	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							
1	Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan							
	- Cakupan Layanan Adminduk	%	83.06	85.4	87.36	76.54	76.28	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/ KINERJA/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			REALISASI		PD PENGAMPU
			2024	2025	2026	2024	2025 TW 1	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
a.	Meningkatnya kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil							
	- Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	%	83.06	85.4	87.36	76.54	76.28	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
b.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan							
	- Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	80	86	90	86.98		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
c.	Meningkatnya kualitas pelayanan kewenangan Perangkat Daerah							
	- Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Poin	82	88.24	90.54	81.15		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/ KINERJA/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			REALISASI		PD PENGAMPU
			2024	2025	2026	2024	2025 TW 1	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
G	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							
1	Terwujudnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan Desa yang baik							
	- Persentase peningkatan status desa mandiri	%	24.04	48.08	52.88	41.11		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
a.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pembangunan Desa yang Berkualitas							
	- Persentase desa tertib administrasi pemerintahan desa	%	12.02	13.22	14.42	12.02		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	- Persentase sarpras desa dalam kondisi baik	%	7.69	12.02	18.03	7.69		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/ KINERJA/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			REALISASI		PD PENGAMPU
			2024	2025	2026	2024	2025 TW 1	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
b.	Meningkatnya kualitas pelayanan kewenangan Perangkat Daerah							
	- Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Poin	80	80.5	81	81		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
H	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							
1	Meningkatnya Kepesertaan Pasangan Usia Subur Untuk Ber-KB							

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/ KINERJA/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			REALISASI		PD PENGAMPU
			2024	2025	2026	2024	2025 TW 1	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	- Persentase Pemakaian Kontrasepsi KB/Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	%	61.79	61.84	61.89	66.69		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
a.	Menurunnya Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang tidak ber KB							
	- Persentase Kebutuhan ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	%	11	10.57	10.15	8.38		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
I	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/ KINERJA/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			REALISASI		PD PENGAMPU
			2024	2025	2026	2024	2025 TW 1	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi							
	- Persentase kinerja jaringan jalan	%	33	67	100	30		Dinas Perhubungan
a.	Tersedianya sarana prasarana transportasi yang berkualitas							
	- Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana yang berkualitas	%	70.5	77.7	84.63	70.24		Dinas Perhubungan
b.	Meningkatnya kualitas pelayanan kewenangan Perangkat Daerah							
	- Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Poin	86.5	93	93.2	92.99		Dinas Perhubungan
J	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/ KINERJA/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			REALISASI		PD PENGAMPU
			2024	2025	2026	2024	2025 TW 1	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Tercapainya tata kelola penyelenggaraan komunikasi, informatika, persandian dan statistik yang informatif dan terintegrasi							
	- Tingkat Kematangan Pengelolaan dan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	poin	3	4	4	5		Dinas Komunikasi dan Informatika
a.	Terwujudnya kabupaten bogor yang informatif							
	- Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Poin	92,00	92.5	93	90.74		Dinas Komunikasi dan Informatika
	- Tingkat Kematangan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Poin	3	3	3	86.8		Dinas Komunikasi dan Informatika
b.	Peningkatan Kualitas Layanan Teknologi Informasi Dan Komunikasi							

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/ KINERJA/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			REALISASI		PD PENGAMPU
			2024	2025	2026	2024	2025 TW 1	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	- Persentase Pemenuhan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi	%	75	87.5	100	86.8		Dinas Komunikasi dan Informatika
K	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							
1	Meningkatnya produktivitas koperasi dan Usaha Mikro							
	- Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi	%	0.65	0.77	0.78	0.71		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	- Persentase Pertumbuhan Omset Usaha Mikro	%	1.08	1.17	1.21	1.16		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
a.	Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi							
	- Persentase koperasi yang melaksanakan RAT	%	25.13	33.41	33.54	33.41		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/ KINERJA/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			REALISASI		PD PENGAMPU
			2024	2025	2026	2024	2025 TW 1	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
b.	Meningkatnya Volume Penjualan Produk Usaha Mikro							
	- Volume Penjualan Produk Usaha Mikro	Rp	103,908,000,000	107,306,500,000	110,683,000,000	114,790,400,000		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
c.	Meningkatnya kualitas pelayanan kewenangan Perangkat Daerah							
	- Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Poin	80	83.05	83.08	83.02		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
L	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							
1	Meningkatnya realisasi investasi							
	- Perolehan nilai investasi	Triliun (Rp)	15.2	17,00	17,25	22.9		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/ KINERJA/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			REALISASI		PD PENGAMPU
			2024	2025	2026	2024	2025 TW 1	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
a.	Meningkatnya pelaporan LKPM							
	- Persentase pelaporan LKPM	%	80	80	83	81		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
b.	Tercapainya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan							
	- Nilai kepatuhan pelayanan publik sangat baik	Poin	93	93.3	93.6	95.31		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
c.	Meningkatnya kualitas pelayanan kewenangan Perangkat Daerah							

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/ KINERJA/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			REALISASI		PD PENGAMPU
			2024	2025	2026	2024	2025 TW 1	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	- Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Poin	89.07	89.5	89.75	87.08		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	Meningkatnya realisasi investasi							
	- Peningkatan jumlah nilai investasi PMA dan PMDN yang terealisasi	Triliun Rp	15.2	15.5	15.75	22.9		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
a.	Meningkatnya penyerapan jumlah tenaga kerja							
	- Jumlah tenaga kerja yang diserap	Tenaga kerja	29,900	30,000	30,100	38,295		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/ KINERJA/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			REALISASI		PD PENGAMPU
			2024	2025	2026	2024	2025 TW 1	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
M	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							
1	Meningkatnya kualitas pemuda							
	- Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Poin	48.86	49.49	50.14			Dinas Pemuda dan Olahraga
a.	Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan							
	- Tingkat partisipasi pemuda	%	24.42	25.58	26.74	24.47	1.26	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	Meningkatnya prestasi dan budaya olahraga							
	- Angka Partisipasi Masyarakat Berolahraga (APMO)	Persen	22.81	22.82	22.83	26.56		Dinas Pemuda dan Olahraga
a.	Meningkatnya prestasi atlet							
	- Persentase atlet berprestasi	%	29.76	89.47	92.69	68.18		Dinas Pemuda dan Olahraga
b.	Meningkatnya partisipasi masyarakat berolahraga							

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/ KINERJA/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			REALISASI		PD PENGAMPU
			2024	2025	2026	2024	2025 TW 1	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	- Persentase peningkatan partisipasi masyarakat berolahraga	%	8.35	8.39	8.44			Dinas Pemuda dan Olahraga
c.	Meningkatnya kualitas pelayanan kewenangan Perangkat Daerah							
	- Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Poin	85.1	85.25	85.31	85.17		Dinas Pemuda dan Olahraga
N	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK							
1	Tercapainya Tata Kelola Penyelenggaraan Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik yang Informatif dan Terintegrasi							
	- Tingkat Kematangan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Poin	3	3	3	3.94		Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/ KINERJA/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			REALISASI		PD PENGAMPU
			2024	2025	2026	2024	2025 TW 1	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
a.	Meningkatnya kualitas data dan informasi statistik sektoral							
	- Indeks Pembangunan Statistik	Poin	2.8	2.85	2.9	2.81		Dinas Komunikasi dan Informatika
O	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN							
1	Tercapainya Tata Kelola Penyelenggaraan Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik yang Informatif dan Terintegrasi							
	- Tingkat Kematangan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Poin	3	3	3	3.94		Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/ KINERJA/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			REALISASI		PD PENGAMPU
			2024	2025	2026	2024	2025 TW 1	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
a.	Meningkatnya penyelenggaraan persandian dan keamanan informasi Komunikasi							
	- Indeks KAMI	Poin	430	435	440	497		Dinas Komunikasi dan Informatika
P	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							
1	Meningkatnya kontribusi sektor Pariwisata Terhadap PDRB							
	- Persentase PDRB (ADHB) sektor pariwisata	%	5.09	5.29	5.49	5.42		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
a.	Meningkatnya Pelestarian Kebudayaan							
	- Persentase Objek Kebudayaan yang dilestarikan	%	66.43	72.03	74.13	64.02	18.69	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/ KINERJA/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			REALISASI		PD PENGAMPU
			2024	2025	2026	2024	2025 TW 1	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
Q	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN							
1	Terwujudnya Pengembangan Literasi Masyarakat							
	- Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Poin	39.00	40.00	41.00	58.1		Dinas Arsip dan Perpustakaan
a.	Meningkatnya budaya membaca masyarakat							
	- Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Poin	66.00	67.00	68.00	65.96		Dinas Arsip dan Perpustakaan
b.	Meningkatnya kualitas pelayanan kewenangan Perangkat Daerah							
	- Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Poin	85	86	87	80.86		Dinas Arsip dan Perpustakaan
R	URUSAN KEARSIPAN							

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/ KINERJA/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			REALISASI		PD PENGAMPU
			2024	2025	2026	2024	2025 TW 1	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan arsip daerah							
	- Nilai Kualitas Pengelolaan Arsip	Nilai	A (MEMUASKAN)	A (MEMUASKAN)	A (MEMUASKAN)	A (MEMUASKA N)		Dinas Arsip dan Perpustakaan
A	Meningkatnya kualitas pengelolaan kearsipan pada perangkat daerah							
	- Nilai Pengawasan Kearsipan Internal (LAKI)	Nilai	AA (SANGAT MEMUASKAN)	AA (SANGAT MEMUASKAN)	AA (SANGAT MEMUASKAN)	AA (Sangat Memuaskan)		Dinas Arsip dan Perpustakaan
III	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							
A	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							
1	Meningkatnya produksi perikanan							
	- Jumlah produksi perikanan	Ton	115,112.00	153,683.00	156,992.50	115,112.00	37,998.00	Dinas Perikanan dan Peternakan
a.	Meningkatnya produksi benih ilkan							

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/ KINERJA/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			REALISASI		PD PENGAMPU
			2024	2025	2026	2024	2025 TW 1	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	- Jumlah benih ikan	Ribu Ekor (RE)	6,122,752	6,153,365	6,199,516	6,122,752	1,733,206	Dinas Perikanan dan Peternakan
b.	Meningkatnya kualitas pelayanan kewenangan Perangkat Daerah							
	- Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Poin	90	90,63	90,65	90.63		Dinas Perikanan dan Peternakan
B	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							
1	Meningkatnya kontribusi sektor Pariwisata Terhadap PDRB							
	- Persentase PDRB (ADHB) sektor pariwisata	%	5.09	5.29	5.49	5.42		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
a.	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan							
	- Jumlah kunjungan wisatawan	Kunjungan	10,500,000	11,025,000	11,576,250	16,256,354		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/ KINERJA/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			REALISASI		PD PENGAMPU
			2024	2025	2026	2024	2025 TW 1	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
b.	Meningkatnya kualitas pelayanan kewenangan Perangkat Daerah							
	- Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Poin	84.4	84.7	84.9	84.36		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
C	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							
1	Meningkatnya produksi peternakan							
	- Jumlah Produksi Peternakan	Ton	364,334	379,960	396,280	364,391	125,977	Dinas Perikanan dan Peternakan
A	Meningkatnya populasi ternak							
	- Jumlah Populasi Ternak	Ekor	40,432,827	40,710,572	40,990,645	40,432,827	14,717,295	Dinas Perikanan dan Peternakan
2	Meningkatnya produk pertanian							
	- Jumlah produksi tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan	Ton	748,135	755,616	763,173	802,441	200,405	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/ KINERJA/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			REALISASI		PD PENGAMPU
			2024	2025	2026	2024	2025 TW 1	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
a.	Meningkatnya Produktivitas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan							
	- Produktivitas pertanian per hektar	Ton/Ha	6.74	6.75	6.76	6.46	3.69	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
b.	Meningkatnya kualitas pelayanan kewenangan Perangkat Daerah							
	- Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Poin	82	84.93	85	84.67		Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
D	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							
1	Meningkatnya Kontribusi PDRB sektor Perdagangan terhadap PDRB							

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/ KINERJA/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			REALISASI		PD PENGAMPU
			2024	2025	2026	2024	2025 TW 1	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	- Nilai Tambah Bruto (NTB) sektor Perdagangan	Milyar Rp	35.521	35.557	35.593	35,840		Dinas Perdagangan dan Perindustrian
a.	Meningkatnya nilai perdagangan dalam negeri							
	- Nilai Investasi Sektor Perdagangan dalam negeri	Ribu Rp.	458,950,900	468,129,918	477,492,516	716,696,700		Dinas Perdagangan dan Perindustrian
b.	Meningkatnya nilai ekspor							
	- Persentase Pertumbuhan Nilai ekspor	%	2.14	2.26	2.35	2.15	0.68	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
c.	Terkendalnya stabilitas harga							
	- Koefisien variasi harga antar wilayah tingkat kabupaten		18	17	16	17		Dinas Perdagangan dan Perindustrian
d.	Meningkatnya kualitas pelayanan kewenangan Perangkat Daerah							

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/ KINERJA/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			REALISASI		PD PENGAMPU
			2024	2025	2026	2024	2025 TW 1	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	- Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Poin	83.72	83.84	83.85	83.84		Dinas Perdagangan dan Perindustrian
E	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							
1	Meningkatnya Nilai PDRB sektor Industri Pengolahan							
	- Nilai Tambah Bruto (NTB) Industri Pengolahan	Milyar Rp	151,684	151,835	151,987	151,653		Dinas Perdagangan dan Perindustrian
a.	Meningkatnya skala usaha industri							
	- Proporsi Industri Kecil Menengah pada tingkat Kabupaten	%	96.6	97.57	98.54	96.76		Dinas Perdagangan dan Perindustrian
F	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI							

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/ KINERJA/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			REALISASI		PD PENGAMPU
			2024	2025	2026	2024	2025 TW 1	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
a.	Meningkatkan jumlah kebijakan transmigrasi pemerintah pusat							
	- Kebijakan transmigrasi pemerintah pusat yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100		Dinas Tenaga Kerja
IV	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							
A	SEKRETARIAT DAERAH							
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah							
	- Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Poin	3.5	3.55	3.6			Sekretariat Daerah
a.	Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Administrasi Pemerintah							
	- Nilai Rata-Rata AKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat	Poin	68.36	73.73	74.86			Sekretariat Daerah

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/ KINERJA/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			REALISASI		PD PENGAMPU
			2024	2025	2026	2024	2025 TW 1	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	- Rata-rata Perangkat Daerah dengan Nilai IKM Minimal Baik	%	90.38	98	98.5			Sekretariat Daerah
b.	Meningkatnya kualitas pelayanan kewenangan Perangkat Daerah							
	- Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Poin	84.33	85.76	87.19	91.57		Sekretariat Daerah
B	SEKRETARIAT DPRD							
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan kewenangan Daerah							
	- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Poin	84.3	89.6	89.65	89.60		Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
a.	Terpenuhinya pelayanan sekretariat DPRD dalam menunjang kinerja DPRD							

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/ KINERJA/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			REALISASI		PD PENGAMPU
			2024	2025	2026	2024	2025 TW 1	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	- Persentase agenda DPRD yang terfasilitasi	%	100	100	100	100	25	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
V	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							
A	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERENCANAAN							
1	Terwujudnya perencanaan Pembangunan, riset dan inovasi yang berkualitas							
	- NILAI SAKIP	Poin	39.64	39,82	40,00	39.64		Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/ KINERJA/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			REALISASI		PD PENGAMPU
			2024	2025	2026	2024	2025 TW 1	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
a.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah yang Efisien, Efektif dan berdampak Positif ke masyarakat							
	- Nilai komponen perencanaan kinerja pada penilaian SAKIP Kabupaten Bogor	Poin	24.1	23,91	24.01			Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
b.	Meningkatnya kualitas pengukuran kinerja pembangunan daerah yang dimanfaatkan dalam perbaikan perencanaan pembangunan daerah							

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/ KINERJA/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			REALISASI		PD PENGAMPU
			2024	2025	2026	2024	2025 TW 1	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	- Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten Bogor	Poin	15.83	15,91	15,99	15.83		Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	- Indeks Inovasi Daerah	Predikat	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif		Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
c.	Meningkatnya kualitas pelayanan kewenangan Perangkat Daerah							
	- Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Poin	84.52	85.5	85.85	83.54		Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/ KINERJA/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			REALISASI		PD PENGAMPU
			2024	2025	2026	2024	2025 TW 1	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
B	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEUANGAN							
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)							
	- Rasio PAD Terhadap APBD	%	40.8	47.42	62.66	45	48.43	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
a.	Meningkatnya Pendapatan Pajak Daerah							
	- Rasio Pajak Daerah terhadap APBD	%	26.65	35.18	46.81	28.66	39.75	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
b.	Meningkatnya Pendapatan Retribusi Daerah							
	- Rasio Retribusi Daerah terhadap APBD	%	10,17	10,27	14,12	10,55*	7.52	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/ KINERJA/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			REALISASI		PD PENGAMPU
			2024	2025	2026	2024	2025 TW 1	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
c.	Meningkatnya kualitas pelayanan kewenangan Perangkat Daerah							
	- Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Poin	82	82.5	83	82.09		Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
2	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Akuntabel							
	- Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	WDP		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
a.	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas							
	- Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Kategori Tinggi	Persen	90.28	94.44	95.83	93		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
b.	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tertib							

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/ KINERJA/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			REALISASI		PD PENGAMPU
			2024	2025	2026	2024	2025 TW 1	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	- Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Tinggi	Persen	86.11	90.28	91.67	86.11		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
c.	Meningkatnya kualitas pelayanan kewenangan Perangkat Daerah							
	- Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Poin	80.5	82.5	84.5	80.31		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
C	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEGAWAIAN DAN UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							
1	Terwujudnya ASN yang Profesional							

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/ KINERJA/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			REALISASI		PD PENGAMPU
			2024	2025	2026	2024	2025 TW 1	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	- Indeks Profesionalitas ASN	Poin	79.9	84	86	84.07		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
a.	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Manajemen ASN Berdasarkan Sistem Merit							
	- Indeks Sistem Merit	Poin	356	372	397.5	362		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
b.	Meningkatnya kualitas pelayanan kewenangan Perangkat Daerah							
	- Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Poin	86,71	90	90	88.08		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/ KINERJA/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			REALISASI		PD PENGAMPU
			2024	2025	2026	2024	2025 TW 1	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
VI	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN							
1	Terwujudnya tata kelola urusan pemerintahan fungsi penunjang bidang pengawasan yang efektif dan efisien							
	- Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	2	2	2	2		Inspektorat
a.	Meningkatnya kualitas pengawasan dan pengendalian internal yang akuntabel dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah							
	- Level Maturitas	Level	3	3	3	2		Inspektorat
	- Level Indeks Pengendalian Korupsi (IEPK)	Level	2	2	2	2		Inspektorat
	- Level Kapabilitas APIP	Level	3	3	3	3		Inspektorat

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/ KINERJA/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			REALISASI		PD PENGAMPU
			2024	2025	2026	2024	2025 TW 1	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah dimensi Evaluasi	Nilai	17.7	17.8	17.9	17.90		Inspektorat
b	Meningkatnya kualitas pelayanan kewenangan Perangkat Daerah							
	- Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Poin	82.45	84	86,00	82.45		Inspektorat
VII	UNSUR KEWILAYAHAN							
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/ kelurahan yang efektif di wilayah kecamatan							
	- Persentase capaian kinerja kecamatan	%	100	100	100			Kecamatan Cibinong
a.	Fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan di wilayah kecamatan Cibinong							

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/ KINERJA/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			REALISASI		PD PENGAMPU
			2024	2025	2026	2024	2025 TW 1	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	- Persentase fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan di wilayah kecamatan	%	100	100	100			Kecamatan Cibinong
b.	Meningkatnya kualitas pelayanan kewenangan Perangkat Daerah							
	- Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Poin	87	88	89			Kecamatan Cibinong
2	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/ kelurahan yang efektif di wilayah kecamatan							
	- Persentase capaian kinerja kecamatan	%	100	100	100			Kecamatan Gunungputri
a.	Fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan di wilayah kecamatan Gunungputri							

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/ KINERJA/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			REALISASI		PD PENGAMPU
			2024	2025	2026	2024	2025 TW 1	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	- Persentase fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan di wilayah kecamatan	%	100	100	100			Kecamatan Gunungputri
b.	Meningkatnya pembinaan kecamatan							
	- Rata-rata Indeks Desa Membangun pada kecamatan Gunungputri	%	0.8	0.82	0.84			Kecamatan Gunungputri
c.	Meningkatnya kualitas pelayanan kewenangan Perangkat Daerah							
	- Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Poin	88	90	90.2			Kecamatan Gunungputri
3	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/ kelurahan yang efektif di wilayah kecamatan							

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/ KINERJA/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			REALISASI		PD PENGAMPU
			2024	2025	2026	2024	2025 TW 1	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	- Persentase capaian kinerja kecamatan	%	100	100	100			Kecamatan Citeureup
a.	Fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan di wilayah kecamatan Citeureup							
	- Persentase fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan di wilayah kecamatan	%	100	100	100			Kecamatan Citeureup
b.	Meningkatnya pembinaan kecamatan							
	- Rata-rata Indeks Desa Membangun pada kecamatan Citeureup	%	0.8	0.81	0.83			Kecamatan Citeureup
c.	Meningkatnya kualitas pelayanan kewenangan Perangkat Daerah							
	- Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Poin	80.7	87.5	87.7			Kecamatan Citeureup

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/ KINERJA/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			REALISASI		PD PENGAMPU
			2024	2025	2026	2024	2025 TW 1	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
4	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/ kelurahan yang efektif di wilayah kecamatan							
	- Persentase capaian kinerja kecamatan	%	100	100	100			Kecamatan Sukaraja
a.	Fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan di wilayah kecamatan Sukaraja							
	- Persentase fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan di wilayah kecamatan	%	100	100	100			Kecamatan Sukaraja
b.	Meningkatnya pembinaan kecamatan							
	- Rata-rata Indeks Desa Membangun pada kecamatan Sukaraja	%	0.83	0.84	0.85			Kecamatan Sukaraja
c.	Meningkatnya kualitas pelayanan kewenangan Perangkat Daerah							

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/ KINERJA/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			REALISASI		PD PENGAMPU
			2024	2025	2026	2024	2025 TW 1	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Poin	83	80	82			Kecamatan Sukaraja
5	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/ kelurahan yang efektif di wilayah kecamatan							
	- Persentase capaian kinerja kecamatan	%	100	100	100			Kecamatan Babakanmadang
a.	- Fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan di wilayah kecamatan Babakanmadang							
	- Persentase fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan di wilayah kecamatan	%	100	100	100			Kecamatan Babakanmadang
b.	- Meningkatnya pembinaan kecamatan							

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/ KINERJA/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			REALISASI		PD PENGAMPU
			2024	2025	2026	2024	2025 TW 1	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	- Rata-rata Indeks Desa Membangun pada kecamatan Babakanmadang	%	0.81	0.83	0.84			Kecamatan Babakanmadang
c.	Meningkatnya kualitas pelayanan kewenangan Perangkat Daerah							
	- Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Poin	90.33	91.19	91.19			Kecamatan Babakanmadang
6	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/ kelurahan yang efektif di wilayah kecamatan							
	- Persentase capaian kinerja kecamatan	%	100	100	100			Kecamatan Jonggol
a.	Fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan di wilayah kecamatan Jonggol							

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/ KINERJA/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			REALISASI		PD PENGAMPU
			2024	2025	2026	2024	2025 TW 1	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	- Persentase fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan di wilayah kecamatan	%	100	100	100			Kecamatan Jonggol
b.	Meningkatnya pembinaan kecamatan							
	- Rata-rata Indeks Desa Membangun pada kecamatan Jonggol	%	0.8	0.81	0.82			Kecamatan Jonggol
c.	Meningkatnya kualitas pelayanan kewenangan Perangkat Daerah							
	- Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Poin	80	88.8	89			Kecamatan Jonggol
7	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/ kelurahan yang efektif di wilayah kecamatan							
	- Persentase capaian kinerja kecamatan	%	100	100	100			Kecamatan Cileungsi

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/ KINERJA/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			REALISASI		PD PENGAMPU
			2024	2025	2026	2024	2025 TW 1	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
a.	Fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan di wilayah kecamatan Cileungsi							
	- Persentase fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan di wilayah kecamatan	%	100	100	100			Kecamatan Cileungsi
b.	Meningkatnya pembinaan kecamatan							
	- Rata-rata Indeks Desa Membangun pada kecamatan Cileungsi	%	0.82	0.83	0.85			Kecamatan Cileungsi
c.	Meningkatnya kualitas pelayanan kewenangan Perangkat Daerah							
	- Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Poin	87	85.52	86.5			Kecamatan Cileungsi

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/ KINERJA/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			REALISASI		PD PENGAMPU
			2024	2025	2026	2024	2025 TW 1	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
8	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/ kelurahan yang efektif di wilayah kecamatan							
	- Persentase capaian kinerja kecamatan	%	100	100	100			Kecamatan Cariu
a.	- Fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan di wilayah kecamatan Cariu							
	- Persentase fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan di wilayah kecamatan	%	100	100	100			Kecamatan Cariu
b.	Meningkatnya pembinaan kecamatan							
	- Rata-rata Indeks Desa Membangun pada kecamatan Cariu	%	0.8	0.81	0.82			Kecamatan Cariu

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/ KINERJA/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			REALISASI		PD PENGAMPU
			2024	2025	2026	2024	2025 TW 1	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
c.	Meningkatnya kualitas pelayanan kewenangan Perangkat Daerah							
	- Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Poin	88.44	88.99	90.15			Kecamatan Cariu
9	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/ kelurahan yang efektif di wilayah kecamatan							
	- Persentase capaian kinerja kecamatan	%	100	100	100			Kecamatan Sukamakmur
a.	Fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan di wilayah kecamatan Sukamakmur							
	- Persentase fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan di wilayah kecamatan	%	100	100	100			Kecamatan Sukamakmur

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/ KINERJA/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			REALISASI		PD PENGAMPU
			2024	2025	2026	2024	2025 TW 1	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
b.	Meningkatnya pembinaan kecamatan							
	- Rata-rata Indeks Desa Membangun pada kecamatan Sukamakmur	%	0.8	0.81	0.82			Kecamatan Sukamakmur
c.	Meningkatnya kualitas pelayanan kewenangan Perangkat Daerah							
	- Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Poin	84	85	86			Kecamatan Sukamakmur
10	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/ kelurahan yang efektif di wilayah kecamatan							
	- Persentase capaian kinerja kecamatan	%	100	100	100			Kecamatan Parung

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/ KINERJA/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			REALISASI		PD PENGAMPU
			2024	2025	2026	2024	2025 TW 1	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
a.	Fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan di wilayah kecamatan Parung							
	- Persentase fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan di wilayah kecamatan	%	100	100	100			Kecamatan Parung
b.	Meningkatnya pembinaan kecamatan							
	- Rata-rata Indeks Desa Membangun pada kecamatan Parung	%	0.83	0.84	0.85			Kecamatan Parung
c.	Meningkatnya kualitas pelayanan kewenangan Perangkat Daerah							
	- Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Poin	85.12	85.93	86.74			Kecamatan Parung

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/ KINERJA/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			REALISASI		PD PENGAMPU
			2024	2025	2026	2024	2025 TW 1	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
11	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/ kelurahan yang efektif di wilayah kecamatan							
	- Persentase capaian kinerja kecamatan	%	100	100	100			Kecamatan Gunungsindur
a.	Fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan di wilayah kecamatan Gunungsindur							
	- Persentase fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan di wilayah kecamatan	%	100	100	100			Kecamatan Gunungsindur
b.	Meningkatnya pembinaan kecamatan							
	- Rata-rata Indeks Desa Membangun pada kecamatan Gunungsindur	%	0.81	0.83	0.85			Kecamatan Gunungsindur

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/ KINERJA/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			REALISASI		PD PENGAMPU
			2024	2025	2026	2024	2025 TW 1	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
c.	Meningkatnya kualitas pelayanan kewenangan Perangkat Daerah							
	- Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Poin	100	90	90			Kecamatan Gunungsindur
12	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/ kelurahan yang efektif di wilayah kecamatan							
	- Persentase capaian kinerja kecamatan	%	100	100	100			Kecamatan Kemang
a.	Fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan di wilayah kecamatan Kemang							
	- Persentase fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan di wilayah kecamatan	%	100	100	100			Kecamatan Kemang

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/ KINERJA/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			REALISASI		PD PENGAMPU
			2024	2025	2026	2024	2025 TW 1	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
b.	Meningkatnya pembinaan kecamatan							
	- Rata-rata Indeks Desa Membangun pada kecamatan Kemang	%	0.81	0.83	0.85			Kecamatan Kemang
c.	Meningkatnya kualitas pelayanan kewenangan Perangkat Daerah							
	- Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Poin	84	85	86			Kecamatan Kemang
13	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/ kelurahan yang efektif di wilayah kecamatan							
	- Persentase capaian kinerja kecamatan	%	100	100	100			Kecamatan Bojonggede
a.	Fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan di wilayah kecamatan Bojonggede							

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/ KINERJA/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			REALISASI		PD PENGAMPU
			2024	2025	2026	2024	2025 TW 1	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	- Persentase fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan di wilayah kecamatan	%	100	100	100			Kecamatan Bojonggede
b.	Meningkatnya pembinaan kecamatan							
	- Rata-rata Indeks Desa Membangun pada kecamatan Bojonggede	%	0.8	0.82	0.84			Kecamatan Bojonggede
c.	Meningkatnya kualitas pelayanan kewenangan Perangkat Daerah							
	- Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Poin	88.54	83	84			Kecamatan Bojonggede
14	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/ kelurahan yang efektif di wilayah kecamatan							
	- Persentase capaian kinerja kecamatan	%	100	100	100			Kecamatan Leuwiliang

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/ KINERJA/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			REALISASI		PD PENGAMPU
			2024	2025	2026	2024	2025 TW 1	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
a.	Fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan di wilayah kecamatan Leuwiliang							
	- Persentase fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan di wilayah kecamatan	%	100	100	100			Kecamatan Leuwiliang
b.	Meningkatnya pembinaan kecamatan							
	- Rata-rata Indeks Desa Membangun pada kecamatan Leuwiliang	%	0.8	0.81	0.82			Kecamatan Leuwiliang
c.	Meningkatnya kualitas pelayanan kewenangan Perangkat Daerah							
	- Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Poin	87	87	88			Kecamatan Leuwiliang

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/ KINERJA/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			REALISASI		PD PENGAMPU
			2024	2025	2026	2024	2025 TW 1	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
15	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/ kelurahan yang efektif di wilayah kecamatan							
	- Persentase capaian kinerja kecamatan	%	100	100	100			Kecamatan Ciampea
a.	Fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan di wilayah kecamatan Ciampea							
	- Persentase fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan di wilayah kecamatan	%	100	100	100			Kecamatan Ciampea
b.	Meningkatnya pembinaan kecamatan							
	- Rata-rata Indeks Desa Membangun pada kecamatan Ciampea	%	0.81	0.82	0.83			Kecamatan Ciampea
c.	Meningkatnya kualitas pelayanan kewenangan Perangkat Daerah							

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/ KINERJA/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			REALISASI		PD PENGAMPU
			2024	2025	2026	2024	2025 TW 1	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	- Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Poin	80	85	85.5			Kecamatan Ciampea
16	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/ kelurahan yang efektif di wilayah kecamatan							
	- Persentase capaian kinerja kecamatan	%	100	100	100			Kecamatan Cibungbulang
a.	Fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan di wilayah kecamatan Cibungbulang							
	- Persentase fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan di wilayah kecamatan	%	100	100	100			Kecamatan Cibungbulang
b.	Meningkatnya pembinaan kecamatan							

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/ KINERJA/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			REALISASI		PD PENGAMPU
			2024	2025	2026	2024	2025 TW 1	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	- Rata-rata Indeks Desa Membangun pada kecamatan Cibungbulang	%	0.81	0.83	0.85			Kecamatan Cibungbulang
c.	Meningkatnya kualitas pelayanan kewenangan Perangkat Daerah							
	- Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Poin	92	93	94			Kecamatan Cibungbulang
17	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/ kelurahan yang efektif di wilayah kecamatan							
	- Persentase capaian kinerja kecamatan	%	100	100	100			Kecamatan Pamijahan
a.	Fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan di wilayah kecamatan Pamijahan							

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/ KINERJA/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			REALISASI		PD PENGAMPU
			2024	2025	2026	2024	2025 TW 1	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	- Persentase fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan di wilayah kecamatan	%	100	100	100			Kecamatan Pamijahan
b.	Meningkatnya pembinaan kecamatan							
	- Rata-rata Indeks Desa Membangun pada kecamatan Pamijahan	%	0.8	0.81	0.82			Kecamatan Pamijahan
c.	Meningkatnya kualitas pelayanan kewenangan Perangkat Daerah							
	- Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Poin	80	85	90			Kecamatan Pamijahan
18	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/ kelurahan yang efektif di wilayah kecamatan							
	- Persentase capaian kinerja kecamatan	%	100	100	100			Kecamatan Rumpin

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/ KINERJA/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			REALISASI		PD PENGAMPU
			2024	2025	2026	2024	2025 TW 1	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
a.	Fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan di wilayah kecamatan Rumpin							
	- Persentase fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan di wilayah kecamatan	%	100	100	100			Kecamatan Rumpin
b.	Meningkatnya pembinaan kecamatan							
	- Rata-rata Indeks Desa Membangun pada kecamatan Rumpin	%	0.8	0.81	0.82			Kecamatan Rumpin
c.	Meningkatnya kualitas pelayanan kewenangan Perangkat Daerah							
	- Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Poin	85	90	90			Kecamatan Rumpin

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/ KINERJA/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			REALISASI		PD PENGAMPU
			2024	2025	2026	2024	2025 TW 1	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
19	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/ kelurahan yang efektif di wilayah kecamatan							
	- Persentase capaian kinerja kecamatan	%	100	100	100			Kecamatan Jasinga
a.	Fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan di wilayah kecamatan Jasinga							
	- Persentase fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan di wilayah kecamatan	%	100	100	100			Kecamatan Jasinga
b.	Meningkatnya pembinaan kecamatan							
	- Rata-rata Indeks Desa Membangun pada kecamatan Jasinga	%	0.81	0.82	0.83			Kecamatan Jasinga
c.	Meningkatnya kualitas pelayanan kewenangan Perangkat Daerah							

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/ KINERJA/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			REALISASI		PD PENGAMPU
			2024	2025	2026	2024	2025 TW 1	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	- Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Poin	85	86	86.65			Kecamatan Jasinga
20	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/ kelurahan yang efektif di wilayah kecamatan							
	- Persentase capaian kinerja kecamatan	%	100	100	100			Kecamatan Parungpanjang
a.	Fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan di wilayah kecamatan Parungpanjang							
	- Persentase fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan di wilayah kecamatan	%	100	100	100			Kecamatan Parungpanjang
b.	Meningkatnya pembinaan kecamatan							

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/ KINERJA/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			REALISASI		PD PENGAMPU
			2024	2025	2026	2024	2025 TW 1	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	- Rata-rata Indeks Desa Membangun pada kecamatan Parungpanjang	%	0.81	0.83	0.85			Kecamatan Parungpanjang
c.	Meningkatnya kualitas pelayanan kewenangan Perangkat Daerah							
	- Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Poin	80	83.5	86.5			Kecamatan Parungpanjang
21	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/ kelurahan yang efektif di wilayah kecamatan							
	- -Persentase capaian kinerja kecamatan	%	100	100	100			Kecamatan Nanggung
a.	Fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan di wilayah kecamatan Nanggung							

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/ KINERJA/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			REALISASI		PD PENGAMPU
			2024	2025	2026	2024	2025 TW 1	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	- Persentase fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan di wilayah kecamatan	%	100	100	100			Kecamatan Nanggung
b.	Meningkatnya pembinaan kecamatan							
	- Rata-rata Indeks Desa Membangun pada kecamatan Nanggung	%	0.8	0.81	0.82			Kecamatan Nanggung
c.	Meningkatnya kualitas pelayanan kewenangan Perangkat Daerah							
	- Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Poin	88	88	90			Kecamatan Nanggung
22	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/ kelurahan yang efektif di wilayah kecamatan							
	- Persentase capaian kinerja kecamatan	%	100	100	100			Kecamatan Cigudeg

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/ KINERJA/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			REALISASI		PD PENGAMPU
			2024	2025	2026	2024	2025 TW 1	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
a.	Fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan di wilayah kecamatan Cigudeg							
	- Persentase fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan di wilayah kecamatan	%	100	100	100			Kecamatan Cigudeg
b.	Meningkatnya pembinaan kecamatan							
	- Rata-rata Indeks Desa Membangun pada kecamatan Cigudeg	%	0.8	0.81	0.82			Kecamatan Cigudeg
c.	Meningkatnya kualitas pelayanan kewenangan Perangkat Daerah							
	- Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Poin	85	88	90			Kecamatan Cigudeg

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/ KINERJA/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			REALISASI		PD PENGAMPU
			2024	2025	2026	2024	2025 TW 1	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
23	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/ kelurahan yang efektif di wilayah kecamatan							
	- Persentase capaian kinerja kecamatan	%	100	100	100			Kecamatan Tenjo
a.	Fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan di wilayah kecamatan Tenjo							
	- Persentase fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan di wilayah kecamatan	%	100	100	100			Kecamatan Tenjo
b.	Meningkatnya pembinaan kecamatan							
	- Rata-rata Indeks Desa Membangun pada kecamatan Tenjo	%	0.81	0.82	0.83			Kecamatan Tenjo

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/ KINERJA/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			REALISASI		PD PENGAMPU
			2024	2025	2026	2024	2025 TW 1	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
c.	Meningkatnya kualitas pelayanan kewenangan Perangkat Daerah							
	- Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Poin	85	90	90			Kecamatan Tenjo
24	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/ kelurahan yang efektif di wilayah kecamatan							
	- Persentase capaian kinerja kecamatan	%	100	100	100			Kecamatan Ciawi
a.	Fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan di wilayah kecamatan Ciawi							
	- Persentase fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan di wilayah kecamatan	%	100	100	100			Kecamatan Ciawi

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/ KINERJA/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			REALISASI		PD PENGAMPU
			2024	2025	2026	2024	2025 TW 1	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
b.	Meningkatnya pembinaan kecamatan							
	- Rata-rata Indeks Desa Membangun pada kecamatan Ciawi	%	0.81	0.83	0.85			Kecamatan Ciawi
c.	Meningkatnya kualitas pelayanan kewenangan Perangkat Daerah							
	- Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Poin	77.41	80	82			Kecamatan Ciawi
25	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/ kelurahan yang efektif di wilayah kecamatan							
	- Persentase capaian kinerja kecamatan	%	100	100	100			Kecamatan Cisarua
a.	Fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan di wilayah kecamatan Cisarua							

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/ KINERJA/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			REALISASI		PD PENGAMPU
			2024	2025	2026	2024	2025 TW 1	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	- Persentase fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan di wilayah kecamatan	%	100	100	100			Kecamatan Cisarua
b.	Meningkatnya pembinaan kecamatan							
	- Rata-rata Indeks Desa Membangun pada kecamatan Cisarua	%	0.81	0.82	0.83			Kecamatan Cisarua
c.	Meningkatnya kualitas pelayanan kewenangan Perangkat Daerah							
	- Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Poin	85	88	90			Kecamatan Cisarua
26	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/ kelurahan yang efektif di wilayah kecamatan							
	- Persentase capaian kinerja kecamatan	%	100	100	100			Kecamatan Megamendung

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/ KINERJA/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			REALISASI		PD PENGAMPU
			2024	2025	2026	2024	2025 TW 1	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
a.	Fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan di wilayah kecamatan Megamendung							
	- Persentase fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan di wilayah kecamatan	%	100	100	100			Kecamatan Megamendung
b.	Meningkatnya pembinaan kecamatan							
	- Rata-rata Indeks Desa Membangun pada kecamatan Megamendung	%	0.81	0.82	0.83			Kecamatan Megamendung
c.	Meningkatnya kualitas pelayanan kewenangan Perangkat Daerah							
	- Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Poin	83	84	85			Kecamatan Megamendung

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/ KINERJA/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			REALISASI		PD PENGAMPU
			2024	2025	2026	2024	2025 TW 1	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
27	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/ kelurahan yang efektif di wilayah kecamatan							
	- Persentase capaian kinerja kecamatan	%	100	100	100			Kecamatan Caringin
a.	Fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan di wilayah kecamatan Caringin							
	- Persentase fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan di wilayah kecamatan	%	100	100	100			Kecamatan Caringin
b.	Meningkatnya pembinaan kecamatan							
	- Rata-rata Indeks Desa Membangun pada kecamatan Caringin	%	0.81	0.82	0.83			Kecamatan Caringin
c.	Meningkatnya kualitas pelayanan kewenangan Perangkat Daerah							

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/ KINERJA/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			REALISASI		PD PENGAMPU
			2024	2025	2026	2024	2025 TW 1	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	- Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Poin	80	83	85			Kecamatan Caringin
28	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/ kelurahan yang efektif di wilayah kecamatan							
	- Persentase capaian kinerja kecamatan	%	100	100	100			Kecamatan Cijeruk
a.	Fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan di wilayah kecamatan Cijeruk							
	- Persentase fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan di wilayah kecamatan	%	100	100	100			Kecamatan Cijeruk
b.	Meningkatnya pembinaan kecamatan							
	- Rata-rata Indeks Desa Membangun pada kecamatan Cijeruk	%	0.8	0.81	0.82			Kecamatan Cijeruk

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/ KINERJA/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			REALISASI		PD PENGAMPU
			2024	2025	2026	2024	2025 TW 1	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
c.	Meningkatnya kualitas pelayanan kewenangan Perangkat Daerah							
	- Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Poin	84	85	86			Kecamatan Cijeruk
29	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/ kelurahan yang efektif di wilayah kecamatan							
	- Persentase capaian kinerja kecamatan	%	100	100	100			Kecamatan Ciomas
a.	Fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan di wilayah kecamatan Ciomas							
	- Persentase fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan di wilayah kecamatan	%	100	100	100			Kecamatan Ciomas

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/ KINERJA/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			REALISASI		PD PENGAMPU
			2024	2025	2026	2024	2025 TW 1	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
b.	Meningkatnya pembinaan kecamatan							
	- Rata-rata Indeks Desa Membangun pada kecamatan Ciomas	%	0.81	0.83	0.85			Kecamatan Ciomas
c.	Meningkatnya kualitas pelayanan kewenangan Perangkat Daerah							
	- Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Poin	85	85.52	85.55			Kecamatan Ciomas
30	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/ kelurahan yang efektif di wilayah kecamatan							
	- Persentase capaian kinerja kecamatan	%	100	100	100			Kecamatan Dramaga
a.	Fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan di wilayah kecamatan Dramaga							

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/ KINERJA/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			REALISASI		PD PENGAMPU
			2024	2025	2026	2024	2025 TW 1	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	- Persentase fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan di wilayah kecamatan	%	100	100	100			Kecamatan Dramaga
b.	Meningkatnya pembinaan kecamatan							
	- Rata-rata Indeks Desa Membangun pada kecamatan Dramaga	%	0.82	0.83	0.84			Kecamatan Dramaga
c.	Meningkatnya kualitas pelayanan kewenangan Perangkat Daerah							
	- Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Poin	88.47	94.44	95			Kecamatan Dramaga
31	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/ kelurahan yang efektif di wilayah kecamatan							
	- Persentase capaian kinerja kecamatan	%	100	100	100			Kecamatan Tamansari

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/ KINERJA/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			REALISASI		PD PENGAMPU
			2024	2025	2026	2024	2025 TW 1	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
a.	Fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan di wilayah kecamatan Tamansari							
	- Persentase fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan di wilayah kecamatan	%	100	100	100			Kecamatan Tamansari
b.	Meningkatnya pembinaan kecamatan							
	- Rata-rata Indeks Desa Membangun pada kecamatan Tamansari	%	0.81	0.82	0.83			Kecamatan Tamansari
c.	Meningkatnya kualitas pelayanan kewenangan Perangkat Daerah							
	- Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Poin	89	86	87			Kecamatan Tamansari

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/ KINERJA/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			REALISASI		PD PENGAMPU
			2024	2025	2026	2024	2025 TW 1	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
32	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/ kelurahan yang efektif di wilayah kecamatan							
	- Persentase capaian kinerja kecamatan	%	100	100	100			Kecamatan Klapanunggal
a.	Fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan di wilayah kecamatan ...							
	- Persentase fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan di wilayah kecamatan	%	100	100	100			Kecamatan Klapanunggal
b.	Meningkatnya pembinaan kecamatan							
	- Rata-rata Indeks Desa Membangun pada kecamatan Klapanunggal	%	0.81	0.83	0.85			Kecamatan Klapanunggal
c.	Meningkatnya kualitas pelayanan kewenangan Perangkat Daerah							

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/ KINERJA/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			REALISASI		PD PENGAMPU
			2024	2025	2026	2024	2025 TW 1	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	- Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Poin	86	86	86.2			Kecamatan Klapanunggal
33	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/ kelurahan yang efektif di wilayah kecamatan							
	- Persentase capaian kinerja kecamatan	%	100	100	100			Kecamatan Ciseeng
a.	Fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan di wilayah kecamatan Ciseeng							
	- Persentase fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan di wilayah kecamatan	%	100	100	100			Kecamatan Ciseeng
b.	Meningkatnya pembinaan kecamatan							

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/ KINERJA/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			REALISASI		PD PENGAMPU
			2024	2025	2026	2024	2025 TW 1	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	- Rata-rata Indeks Desa Membangun pada kecamatan Ciseeng	%	0.81	0.82	0.83			Kecamatan Ciseeng
c.	Meningkatnya kualitas pelayanan kewenangan Perangkat Daerah							
	- Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Poin	90	83	84			Kecamatan Ciseeng
34	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/ kelurahan yang efektif di wilayah kecamatan							
	- Persentase capaian kinerja kecamatan	%	100	100	100			Kecamatan Rancabungur
a.	Fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan di wilayah kecamatan Rancabungur							

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/ KINERJA/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			REALISASI		PD PENGAMPU
			2024	2025	2026	2024	2025 TW 1	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	- Persentase fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan di wilayah kecamatan	%	100	100	100			Kecamatan Rancabungur
b.	Meningkatnya pembinaan kecamatan							
	- Rata-rata Indeks Desa Membangun pada kecamatan Rancabungur	%	0.82	0.83	0.84			Kecamatan Rancabungur
c.	Meningkatnya kualitas pelayanan kewenangan Perangkat Daerah							
	- Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Poin	85	87	89			Kecamatan Rancabungur
35	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/ kelurahan yang efektif di wilayah kecamatan							

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/ KINERJA/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			REALISASI		PD PENGAMPU
			2024	2025	2026	2024	2025 TW 1	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	- Persentase capaian kinerja kecamatan	%	100	100	100			Kecamatan Sukajaya
a.	Fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan di wilayah kecamatan Sukajaya							
	- Persentase fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan di wilayah kecamatan	%	100	100	100			Kecamatan Sukajaya
b.	Meningkatnya pembinaan kecamatan							
	- Rata-rata Indeks Desa Membangun pada kecamatan Sukajaya	%	0.8	0.81	0.82			Kecamatan Sukajaya
c.	Meningkatnya kualitas pelayanan kewenangan Perangkat Daerah							
	- Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Poin	80	82	85			Kecamatan Sukajaya

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/ KINERJA/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			REALISASI		PD PENGAMPU
			2024	2025	2026	2024	2025 TW 1	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
36	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/ kelurahan yang efektif di wilayah kecamatan							
	- Persentase capaian kinerja kecamatan	%	100,00	100	100			Kecamatan Tanjungsari
a.	Fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan di wilayah kecamatan Tanjungsari							
	- Persentase fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan di wilayah kecamatan	%	100	100	100			Kecamatan Tanjungsari
b.	Meningkatnya pembinaan kecamatan							
	- Rata-rata Indeks Desa Membangun pada kecamatan Tanjungsari	%	0.8	0.81	0.82			Kecamatan Tanjungsari

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/ KINERJA/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			REALISASI		PD PENGAMPU
			2024	2025	2026	2024	2025 TW 1	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
c.	Meningkatnya kualitas pelayanan kewenangan Perangkat Daerah							
	- Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Poin	90	90	91			Kecamatan Tanjungsari
37	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/ kelurahan yang efektif di wilayah kecamatan							
	- Persentase capaian kinerja kecamatan	%	100	100	100			Kecamatan Tajurhalang
a.	Fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan di wilayah kecamatan Tajurhalang							
	- Persentase fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan di wilayah kecamatan	%	100	100	100			Kecamatan Tajurhalang

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/ KINERJA/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			REALISASI		PD PENGAMPU
			2024	2025	2026	2024	2025 TW 1	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
b.	Meningkatnya pembinaan kecamatan							
	- Rata-rata Indeks Desa Membangun pada kecamatan Tajurhalang	%	0.82	0.83	0.85			Kecamatan Tajurhalang
c.	Meningkatnya kualitas pelayanan kewenangan Perangkat Daerah							
	- Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Poin	89.56	90	90			Kecamatan Tajurhalang
38	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/ kelurahan yang efektif di wilayah kecamatan							
	- Persentase capaian kinerja kecamatan	%	100	100	100			Kecamatan Cigombong

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/ KINERJA/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			REALISASI		PD PENGAMPU
			2024	2025	2026	2024	2025 TW 1	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
a.	Fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan di wilayah kecamatan Cigombong							
	- Persentase fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan di wilayah kecamatan	%	100	100	100			Kecamatan Cigombong
b.	Meningkatnya pembinaan kecamatan							
	- Rata-rata Indeks Desa Membangun pada kecamatan Cigombong	%	0.81	0.82	0.83			Kecamatan Cigombong
c.	Meningkatnya kualitas pelayanan kewenangan Perangkat Daerah							
	- Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Poin	89.03	90	91			Kecamatan Cigombong

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/ KINERJA/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			REALISASI		PD PENGAMPU
			2024	2025	2026	2024	2025 TW 1	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
39	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/ kelurahan yang efektif di wilayah kecamatan							
	- Persentase capaian kinerja kecamatan	%	100	100	100			Kecamatan Leuwisadeng
a.	Fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan di wilayah kecamatan Leuwisadeng							
	- Persentase fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan di wilayah kecamatan	%	100	100	100			Kecamatan Leuwisadeng
b.	Meningkatnya pembinaan kecamatan							
	- Rata-rata Indeks Desa Membangun pada kecamatan Leuwisadeng	%	0.8	0.81	0.82			Kecamatan Leuwisadeng

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/ KINERJA/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			REALISASI		PD PENGAMPU
			2024	2025	2026	2024	2025 TW 1	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
c.	Meningkatnya kualitas pelayanan kewenangan Perangkat Daerah							
	- Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Poin	90	85.52	85.53			Kecamatan Leuwisadeng
40	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/ kelurahan yang efektif di wilayah kecamatan							
	- Persentase capaian kinerja kecamatan	%	100	100	100			Kecamatan Tenjolaya
a.	Fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan di wilayah kecamatan Tenjolaya							
	- Persentase fasilitasi dan koordinasi urusan pemerintahan di wilayah kecamatan	%	100	100	100			Kecamatan Tenjolaya

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/ KINERJA/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			REALISASI		PD PENGAMPU
			2024	2025	2026	2024	2025 TW 1	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
b.	Meningkatnya pembinaan kecamatan							
	- Rata-rata Indeks Desa Membangun pada kecamatan Tenjolaya	%	0.81	0.82	0.83			Kecamatan Tenjolaya
c.	Meningkatnya kualitas pelayanan kewenangan Perangkat Daerah							
	- Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Poin	87.47	90	92			Kecamatan Tenjolaya
VIII	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM							
A	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							
1	Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bogor yang Harmonis							
	- Indeks Harmoni Indonesia	Poin	6.3	6.5	6.7			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN/ KINERJA/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			REALISASI		PD PENGAMPU
			2024	2025	2026	2024	2025 TW 1	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
a.	Teredamnya Potensi Konflik Sosial yang Terjadi di Kabupaten Bogor							
	- Tingkat Penanganan Potensi Konflik Sosial	%	88,89	90.48	91.67	90		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
b.	Meningkatnya kualitas pelayanan kewenangan Perangkat Daerah							
	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Poin	88.5	89	89.1	88.89		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sumber : Laporan Evaluasi Hasil Evaluasi Kinerja RKPD Kabupaten Bogor Triwulan I Tahun 2025, Bappedalitbang, 2025

Berdasarkan tabel 2.1, Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Bogor hingga Triwulan I tahun 2025 secara umum belum mencapai nilai yang diinginkan, bahkan cenderung secara umum capaian IKU perangkat daerah masih bernilai 0 (nol). Kecenderungan capaian nilai IKU yang masih belum maksimal disebabkan beberapa hal sebagai berikut:

- Kegiatan strategis yang berkontribusi terhadap IKU belum dilaksanakan akibat keterbatasan anggaran atau refocusing;
- Ketidaksesuaian target dengan sumber daya yang dimiliki (Penetapan target IKU tidak memperhitungkan kemampuan riil sumber daya manusia, keuangan dan sarana prasarana);
- Keterlambatan Proses Administratif (Proses tender, pengadaan barang/jasa, atau pencairan DPA terlambat sehingga pelaksanaan kegiatan tidak berjalan sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan);
- Kelemahan dalam Manajemen Kinerja (Monitoring dan evaluasi internal terhadap pelaksanaan kegiatan tidak berjalan efektif);
- Keterkaitan/ketergantungan pada pihak lain (Capaian IKU memerlukan sinergi lintas OPD atau pihak eksternal yang tidak berjalan efektif (contoh: ketergantungan izin pusat, dukungan lembaga vertikal).

Adapun terkait dengan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan Kabupaten Bogor (Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Triwulan I Tahun 2025) dapat diuraikan rekapitulasi hasil pengukuran evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Bogor sebagaimana yang disajikan dalam tabel 2.2 berikut ini:

Tabel 2.2
Rekapitulasi Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah
Kondisi sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

No	Perangkat Daerah	Rata-Rata Tingkat Capaian IKU (%)	Realisasi Anggaran (%)	Rata-Rata Tingkat Capaian Program (Outcome) (%)	Rata-Rata Tingkat Capaian Kegiatan (Output) (%)	Rata-Rata Tingkat Capaian Sub Kegiatan (Output) (%)	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Dinas Pendidikan	0.00	12.20	0.00	0.00	17.22	4	14	93
2	Dinas Kesehatan	80.47	19.59	10.51	21.94	8.97	5	24	105
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0.00	4.48	0.00	0.00	0.00	8	57	122
4	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	47.49	6.26	31.48	20.24	17.09	11	24	59
5	Satuan Polisi Pamong Praja	0.00	21.58	12.50	30.77	21.51	2	9	38
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0.00	13.32	0.00	19.17	7.25	2	12	72
7	Dinas Pemadam Kebakaran	64.36	16.56	19.25	6.40	4.77	2	13	49
8	Dinas Sosial	7.58	27.88	15.85	10.95	17.93	7	17	81
9	Dinas Tenaga Kerja	0.00	13.98	0.00	13.07	4.10	6	19	59
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0.00	15.33	0.00	12.25	5.88	10	28	68
11	Dinas Ketahanan Pangan	0.00	12.32	0.00	7.16	6.41	5	15	66
12	Dinas Lingkungan Hidup	0.00	12.06	2.98	11.35	7.13	10	24	66

No	Perangkat Daerah	Rata-Rata Tingkat Capaian IKU (%)	Realisasi Anggaran (%)	Rata-Rata Tingkat Capaian Program (Outcome) (%)	Rata-Rata Tingkat Capaian Kegiatan (Output) (%)	Rata-Rata Tingkat Capaian Sub Kegiatan (Output) (%)	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	59.54	20.51	28.21	28.47	19.58	5	17	68
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0.00	43.25	0.00	0.00	16.18	5	11	67
15	Dinas Perhubungan	0.00	15.77	6.90	11.27	4.49	3	22	86
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	0.00	7.43	7.14	3.34	7.39	5	14	66
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0.00	12.63	0.00	22.42	4.77	8	15	56
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0.00	29.15	0.00	0.00	16.67	6	13	60
19	Dinas Pemuda dan Olahraga	0.83	12.56	0.00	0.00	29.47	4	16	92
20	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	6.49	10.64	23.94	10.44	14.03	8	19	54
21	Dinas Arsip dan Perpustakaan	0.00	15.62	0.00	9.25	12.26	5	18	58
22	Dinas Perikanan dan Peternakan	30.55	9.52	0.00	0.00	0.00	10	31	65
23	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	27.06	10.58	0.00	13.34	11.12	6	15	69
24	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	7.52	12.75	25.00	25.00	25.00	10	25	89
25	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	0.00	10.92	0.00	0.00	2.85	4	17	92
26	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0.00	15.32	0.00	8.29	12.85	3	14	85

No	Perangkat Daerah	Rata-Rata Tingkat Capaian IKU (%)	Realisasi Anggaran (%)	Rata-Rata Tingkat Capaian Program (Outcome) (%)	Rata-Rata Tingkat Capaian Kegiatan (Output) (%)	Rata-Rata Tingkat Capaian Sub Kegiatan (Output) (%)	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
27	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	72.10	1.38	24.80	24.00	11.86	2	9	60
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0.00	1.78	0.03	17.48	16.27	3	14	67
29	Sekretariat Daerah	0.00	19.02	0.00	2.49	13.24	3	20	76
30	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	12.50	14.08	7.73	18.55	14.39	2	17	85
31	Inspektorat	0.00	13.55	32.41	17.36	13.45	3	12	53
32	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0.00	20.98	0.81	2.25	10.34	6	13	80
33	Kecamatan Cibinong	11.35	15.12	18.68	18.27	38.85	5	17	63
34	Kecamatan Gunung Putri	0.00	7.64	24.63	27.19	18.74	6	13	41
35	Kecamatan Citeureup	6.15	13.10	8.41	15.34	22.09	6	18	65
36	Kecamatan Sukaraja	0.00	22.55	14.37	16.55	16.52	6	17	72
37	Kecamatan Babakan Madang	2.45	18.32	17.15	15.56	23.36	6	17	59
38	Kecamatan Jonggol	4.61	15.06	6.69	12.10	18.84	6	17	52
39	Kecamatan Cileungsi	0.00	17.98	12.77	16.22	18.09	6	14	54
40	Kecamatan Cariu	11.98	21.50	17.82	16.57	16.76	6	17	47
41	Kecamatan Sukamakmur	4.08	11.01	12.37	18.25	13.71	6	17	66
42	Kecamatan Parung	4.86	13.63	14.74	14.67	12.54	6	17	65
43	Kecamatan Gunungsindur	8.29	21.09	13.81	21.80	22.13	6	18	65

No	Perangkat Daerah	Rata-Rata Tingkat Capaian IKU (%)	Realisasi Anggaran (%)	Rata-Rata Tingkat Capaian Program (Outcome) (%)	Rata-Rata Tingkat Capaian Kegiatan (Output) (%)	Rata-Rata Tingkat Capaian Sub Kegiatan (Output) (%)	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
44	Kecamatan Kemang	6.16	10.71	21.18	19.90	17.03	6	20	66
45	Kecamatan Bojonggede	0.00	17.37	12.03	6.05	2.08	6	19	71
46	Kecamatan Leuwiliang	5.54	14.84	10.39	11.61	16.95	6	16	59
47	Kecamatan Ciampea	2.56	6.75	8.58	10.97	2.04	6	17	51
48	Kecamatan Cibungbulang	4.37	21.72	26.48	29.67	42.30	6	18	56
49	Kecamatan Pamijahan	8.14	22.07	12.21	21.27	4.65	6	14	43
50	Kecamatan Rumpin	2.08	20.97	26.64	30.73	20.29	6	18	67
51	Kecamatan Jasinga	5.56	14.39	4.39	10.46	10.85	6	18	65
52	Kecamatan Parung Panjang	4.66	8.92	10.55	10.75	5.49	6	17	72
53	Kecamatan Nanggung	13.29	30.12	20.36	29.07	26.19	6	18	74
54	Kecamatan Cigudeg	2.62	15.48	11.84	13.06	11.10	6	19	72
55	Kecamatan Tenjo	6.38	21.79	9.77	19.37	21.25	6	17	56
56	Kecamatan Ciawi	7.37	21.82	23.97	27.59	24.42	5	17	52
57	Kecamatan Cisarua	0.34	20.27	15.00	10.48	22.82	6	17	56
58	Kecamatan Megamendung	7.87	22.50	18.58	25.17	5.91	6	17	57
59	Kecamatan Caringin	4.08	16.04	11.54	13.29	4.41	6	18	72
60	Kecamatan Cijeruk	2.51	15.74	12.76	9.12	6.17	6	18	61
61	Kecamatan Ciomas	8.30	16.96	20.39	23.47	39.34	6	19	61

No	Perangkat Daerah	Rata-Rata Tingkat Capaian IKU (%)	Realisasi Anggaran (%)	Rata-Rata Tingkat Capaian Program (Outcome) (%)	Rata-Rata Tingkat Capaian Kegiatan (Output) (%)	Rata-Rata Tingkat Capaian Sub Kegiatan (Output) (%)	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
62	Kecamatan Dramaga	3.08	19.09	18.31	13.29	12.62	5	16	56
63	Kecamatan Tamansari	3.55	19.66	21.23	21.82	21.38	6	18	61
64	Kecamatan Klapanunggal	2.98	17.20	16.30	16.55	20.33	6	17	58
65	Kecamatan Ciseeng	7.05	15.67	20.67	20.36	22.42	5	17	61
66	Kecamatan Rancabungur	6.74	17.02	19.52	28.34	23.41	6	18	75
67	Kecamatan Sukajaya	7.36	14.13	24.20	10.44	20.27	6	18	79
68	Kecamatan Tanjungsari	0.00	20.05	18.10	21.54	21.09	6	18	51
69	Kecamatan Tajurhalang	0.00	6.92	7.50	7.06	9.59	6	17	54
70	Kecamatan Cigombong	4.96	6.38	16.51	16.59	22.40	6	17	62
71	Kecamatan Leuwisadeng	3.63	30.90	15.58	30.08	19.55	6	17	55
72	Kecamatan Tenjolaya	0.00	19.55	7.24	4.71	1.54	6	18	75
Total		8.35	14.21	12.12	14.90	14.92	409	1278	4753

Sumber : Laporan Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten Bogor Triwulan I Tahun 2025, Bappedalitbang, 2025

Dari tabel diatas kita bisa melihat capaian awal kinerja perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Bogor, berdasarkan pengukuran terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU), tingkat realisasi anggaran, serta jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan yang diampu oleh masing-masing perangkat daerah. Data menunjukkan masih adanya variasi capaian di antara perangkat daerah, baik dari sisi kinerja maupun rata-rata penggunaan anggaran yang masih di bawah 20 persen. Hal ini menjadi dasar dalam penyiapan langkah-langkah percepatan pelaksanaan program dan penguatan monitoring evaluasi guna mencapai target daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan.

Apabila dilakukan penilaian menggunakan skala nilai peringkat kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, secara rinci dapat dilihat hasilnya sebagai berikut:

Tabel 2.3**Capaian Kinerja Perangkat Daerah berdasarkan Perhitungan Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No	Perangkat Daerah	Rata-Rata Tingkat Capaian IKU (%)	Evaluasi IKU	Rata-Rata Tingkat Capaian Program (Outcome) (%)	Evaluasi Capaian Program	Rata-Rata Tingkat Capaian Kegiatan (Output) (%)	Evaluasi Capaian Kegiatan	Rata-Rata Tingkat Capaian Sub Kegiatan (Output) (%)	Evaluasi Capaian Sub Kegiatan
1	Dinas Pendidikan	0.00	Sangat Kurang	0.00	Sangat Kurang	0.00	Sangat Kurang	17.22	Sangat Kurang
2	Dinas Kesehatan	80.47	Cukup	10.51	Sangat Kurang	21.94	Sangat Kurang	8.97	Sangat Kurang
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0.00	Sangat Kurang	0.00	Sangat Kurang	0.00	Sangat Kurang	0.00	Sangat Kurang
4	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	47.49	Sangat Kurang	31.48	Sangat Kurang	20.24	Sangat Kurang	17.09	Sangat Kurang
5	Satuan Polisi Pamong Praja	0.00	Sangat Kurang	12.50	Sangat Kurang	30.77	Sangat Kurang	21.51	Sangat Kurang
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0.00	Sangat Kurang	0.00	Sangat Kurang	19.17	Sangat Kurang	7.25	Sangat Kurang
7	Dinas Pemadam Kebakaran	64.36	Sangat Kurang	19.25	Sangat Kurang	6.40	Sangat Kurang	4.77	Sangat Kurang
8	Dinas Sosial	7.58	Sangat Kurang	15.85	Sangat Kurang	10.95	Sangat Kurang	17.93	Sangat Kurang
9	Dinas Tenaga Kerja	0.00	Sangat Kurang	0.00	Sangat Kurang	13.07	Sangat Kurang	4.10	Sangat Kurang
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0.00	Sangat Kurang	0.00	Sangat Kurang	12.25	Sangat Kurang	5.88	Sangat Kurang

No	Perangkat Daerah	Rata-Rata Tingkat Capaian IKU (%)	Evaluasi IKU	Rata-Rata Tingkat Capaian Program (Outcome) (%)	Evaluasi Capaian Program	Rata-Rata Tingkat Capaian Kegiatan (Output) (%)	Evaluasi Capaian Kegiatan	Rata-Rata Tingkat Capaian Sub Kegiatan (Output) (%)	Evaluasi Capaian Sub Kegiatan
11	Dinas Ketahanan Pangan	0.00	Sangat Kurang	0.00	Sangat Kurang	7.16	Sangat Kurang	6.41	Sangat Kurang
12	Dinas Lingkungan Hidup	0.00	Sangat Kurang	2.98	Sangat Kurang	11.35	Sangat Kurang	7.13	Sangat Kurang
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	59.54	Sangat Kurang	28.21	Sangat Kurang	28.47	Sangat Kurang	19.58	Sangat Kurang
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0.00	Sangat Kurang	0.00	Sangat Kurang	0.00	Sangat Kurang	16.18	Sangat Kurang
15	Dinas Perhubungan	0.00	Sangat Kurang	6.90	Sangat Kurang	11.27	Sangat Kurang	4.49	Sangat Kurang
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	0.00	Sangat Kurang	7.14	Sangat Kurang	3.34	Sangat Kurang	7.39	Sangat Kurang
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0.00	Sangat Kurang	0.00	Sangat Kurang	22.42	Sangat Kurang	4.77	Sangat Kurang
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0.00	Sangat Kurang	0.00	Sangat Kurang	0.00	Sangat Kurang	16.67	Sangat Kurang
19	Dinas Pemuda dan Olahraga	0.83	Sangat Kurang	0.00	Sangat Kurang	0.00	Sangat Kurang	29.47	Sangat Kurang
20	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	6.49	Sangat Kurang	23.94	Sangat Kurang	10.44	Sangat Kurang	14.03	Sangat Kurang
21	Dinas Arsip dan Perpustakaan	0.00	Sangat Kurang	0.00	Sangat Kurang	9.25	Sangat Kurang	12.26	Sangat Kurang
22	Dinas Perikanan dan Peternakan	30.55	Sangat Kurang	0.00	Sangat Kurang	0.00	Sangat Kurang	0.00	Sangat Kurang

No	Perangkat Daerah	Rata-Rata Tingkat Capaian IKU (%)	Evaluasi IKU	Rata-Rata Tingkat Capaian Program (Outcome) (%)	Evaluasi Capaian Program	Rata-Rata Tingkat Capaian Kegiatan (Output) (%)	Evaluasi Capaian Kegiatan	Rata-Rata Tingkat Capaian Sub Kegiatan (Output) (%)	Evaluasi Capaian Sub Kegiatan
23	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	27.06	Sangat Kurang	0.00	Sangat Kurang	13.34	Sangat Kurang	11.12	Sangat Kurang
24	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	7.52	Sangat Kurang	25.00	Sangat Kurang	25.00	Sangat Kurang	25.00	Sangat Kurang
25	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	0.00	Sangat Kurang	0.00	Sangat Kurang	0.00	Sangat Kurang	2.85	Sangat Kurang
26	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0.00	Sangat Kurang	0.00	Sangat Kurang	8.29	Sangat Kurang	12.85	Sangat Kurang
27	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	72.10	Kurang	24.80	Sangat Kurang	24.00	Sangat Kurang	11.86	Sangat Kurang
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0.00	Sangat Kurang	0.03	Sangat Kurang	17.48	Sangat Kurang	16.27	Sangat Kurang
29	Sekretariat Daerah	0.00	Sangat Kurang	0.00	Sangat Kurang	2.49	Sangat Kurang	13.24	Sangat Kurang
30	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	12.50	Sangat Kurang	7.73	Sangat Kurang	18.55	Sangat Kurang	14.39	Sangat Kurang
31	Inspektorat	0.00	Sangat Kurang	32.41	Sangat Kurang	17.36	Sangat Kurang	13.45	Sangat Kurang
32	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0.00	Sangat Kurang	0.81	Sangat Kurang	2.25	Sangat Kurang	10.34	Sangat Kurang
33	Kecamatan Cibinong	11.35	Sangat Kurang	18.68	Sangat Kurang	18.27	Sangat Kurang	38.85	Sangat Kurang

No	Perangkat Daerah	Rata-Rata Tingkat Capaian IKU (%)	Evaluasi IKU	Rata-Rata Tingkat Capaian Program (Outcome) (%)	Evaluasi Capaian Program	Rata-Rata Tingkat Capaian Kegiatan (Output) (%)	Evaluasi Capaian Kegiatan	Rata-Rata Tingkat Capaian Sub Kegiatan (Output) (%)	Evaluasi Capaian Sub Kegiatan
34	Kecamatan Gunung Putri	0.00	Sangat Kurang	24.63	Sangat Kurang	27.19	Sangat Kurang	18.74	Sangat Kurang
35	Kecamatan Citeureup	6.15	Sangat Kurang	8.41	Sangat Kurang	15.34	Sangat Kurang	22.09	Sangat Kurang
36	Kecamatan Sukaraja	0.00	Sangat Kurang	14.37	Sangat Kurang	16.55	Sangat Kurang	16.52	Sangat Kurang
37	Kecamatan Babakan Madang	2.45	Sangat Kurang	17.15	Sangat Kurang	15.56	Sangat Kurang	23.36	Sangat Kurang
38	Kecamatan Jonggol	4.61	Sangat Kurang	6.69	Sangat Kurang	12.10	Sangat Kurang	18.84	Sangat Kurang
39	Kecamatan Cileungsi	0.00	Sangat Kurang	12.77	Sangat Kurang	16.22	Sangat Kurang	18.09	Sangat Kurang
40	Kecamatan Cariu	11.98	Sangat Kurang	17.82	Sangat Kurang	16.57	Sangat Kurang	16.76	Sangat Kurang
41	Kecamatan Sukamakmur	4.08	Sangat Kurang	12.37	Sangat Kurang	18.25	Sangat Kurang	13.71	Sangat Kurang
42	Kecamatan Parung	4.86	Sangat Kurang	14.74	Sangat Kurang	14.67	Sangat Kurang	12.54	Sangat Kurang
43	Kecamatan Gunungsindur	8.29	Sangat Kurang	13.81	Sangat Kurang	21.80	Sangat Kurang	22.13	Sangat Kurang
44	Kecamatan Kemang	6.16	Sangat Kurang	21.18	Sangat Kurang	19.90	Sangat Kurang	17.03	Sangat Kurang
45	Kecamatan Bojonggede	0.00	Sangat Kurang	12.03	Sangat Kurang	6.05	Sangat Kurang	2.08	Sangat Kurang
46	Kecamatan Leuwiliang	5.54	Sangat Kurang	10.39	Sangat Kurang	11.61	Sangat Kurang	16.95	Sangat Kurang
47	Kecamatan Ciampea	2.56	Sangat Kurang	8.58	Sangat Kurang	10.97	Sangat Kurang	2.04	Sangat Kurang
48	Kecamatan Cibungbulang	4.37	Sangat Kurang	26.48	Sangat Kurang	29.67	Sangat Kurang	42.30	Sangat Kurang
49	Kecamatan Pamijahan	8.14	Sangat Kurang	12.21	Sangat Kurang	21.27	Sangat Kurang	4.65	Sangat Kurang
50	Kecamatan Rumpin	2.08	Sangat Kurang	26.64	Sangat Kurang	30.73	Sangat Kurang	20.29	Sangat Kurang
51	Kecamatan Jasinga	5.56	Sangat Kurang	4.39	Sangat Kurang	10.46	Sangat Kurang	10.85	Sangat Kurang
52	Kecamatan Parung Panjang	4.66	Sangat Kurang	10.55	Sangat Kurang	10.75	Sangat Kurang	5.49	Sangat Kurang
53	Kecamatan Nanggung	13.29	Sangat Kurang	20.36	Sangat Kurang	29.07	Sangat Kurang	26.19	Sangat Kurang

No	Perangkat Daerah	Rata-Rata Tingkat Capaian IKU (%)	Evaluasi IKU	Rata-Rata Tingkat Capaian Program (Outcome) (%)	Evaluasi Capaian Program	Rata-Rata Tingkat Capaian Kegiatan (Output) (%)	Evaluasi Capaian Kegiatan	Rata-Rata Tingkat Capaian Sub Kegiatan (Output) (%)	Evaluasi Capaian Sub Kegiatan
54	Kecamatan Cigudeg	2.62	Sangat Kurang	11.84	Sangat Kurang	13.06	Sangat Kurang	11.10	Sangat Kurang
55	Kecamatan Tenjo	6.38	Sangat Kurang	9.77	Sangat Kurang	19.37	Sangat Kurang	21.25	Sangat Kurang
56	Kecamatan Ciawi	7.37	Sangat Kurang	23.97	Sangat Kurang	27.59	Sangat Kurang	24.42	Sangat Kurang
57	Kecamatan Cisarua	0.34	Sangat Kurang	15.00	Sangat Kurang	10.48	Sangat Kurang	22.82	Sangat Kurang
58	Kecamatan Megamendung	7.87	Sangat Kurang	18.58	Sangat Kurang	25.17	Sangat Kurang	5.91	Sangat Kurang
59	Kecamatan Caringin	4.08	Sangat Kurang	11.54	Sangat Kurang	13.29	Sangat Kurang	4.41	Sangat Kurang
60	Kecamatan Cijeruk	2.51	Sangat Kurang	12.76	Sangat Kurang	9.12	Sangat Kurang	6.17	Sangat Kurang
61	Kecamatan Ciomas	8.30	Sangat Kurang	20.39	Sangat Kurang	23.47	Sangat Kurang	39.34	Sangat Kurang
62	Kecamatan Dramaga	3.08	Sangat Kurang	18.31	Sangat Kurang	13.29	Sangat Kurang	12.62	Sangat Kurang
63	Kecamatan Tamansari	3.55	Sangat Kurang	21.23	Sangat Kurang	21.82	Sangat Kurang	21.38	Sangat Kurang
64	Kecamatan Klapanunggal	2.98	Sangat Kurang	16.30	Sangat Kurang	16.55	Sangat Kurang	20.33	Sangat Kurang
65	Kecamatan Ciseeng	7.05	Sangat Kurang	20.67	Sangat Kurang	20.36	Sangat Kurang	22.42	Sangat Kurang
66	Kecamatan Rancabungur	6.74	Sangat Kurang	19.52	Sangat Kurang	28.34	Sangat Kurang	23.41	Sangat Kurang
67	Kecamatan Sukajaya	7.36	Sangat Kurang	24.20	Sangat Kurang	10.44	Sangat Kurang	20.27	Sangat Kurang
68	Kecamatan Tanjungsari	0.00	Sangat Kurang	18.10	Sangat Kurang	21.54	Sangat Kurang	21.09	Sangat Kurang
69	Kecamatan Tajurhalang	0.00	Sangat Kurang	7.50	Sangat Kurang	7.06	Sangat Kurang	9.59	Sangat Kurang
70	Kecamatan Cigombong	4.96	Sangat Kurang	16.51	Sangat Kurang	16.59	Sangat Kurang	22.40	Sangat Kurang
71	Kecamatan Leuwisadeng	3.63	Sangat Kurang	15.58	Sangat Kurang	30.08	Sangat Kurang	19.55	Sangat Kurang
72	Kecamatan Tenjolaya	0.00	Sangat Kurang	7.24	Sangat Kurang	4.71	Sangat Kurang	1.54	Sangat Kurang
Total		8.35		12.12		14.90		14.92	

Sumber : Laporan Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten Bogor Triwulan I Tahun 2025, Bappedalitbang, 2025

Secara umum dengan melihat tabel diatas, capaian kinerja dari seluruh perangkat daerah pada triwulan I tahun anggaran 2025 masih sangat kurang, hal ini terlihat dari (1) Capaian Kinerja IKU (Indikator Kinerja Utama) hanya mencapai 8,35%, mengindikasikan bahwa output strategis yang diharapkan dari perangkat daerah belum terlaksana secara optimal. (2) Capaian Program hanya 12,12%, yang berarti pelaksanaan program sebagai kerangka besar intervensi pembangunan masih jauh dari target yang direncanakan. (3) Capaian Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan masing-masing berada pada 14,90% dan 14,92%, mencerminkan lemahnya pelaksanaan di tingkat operasional, baik dari sisi implementasi teknis maupun serapan anggaran. Rendahnya capaian kinerja pada seluruh tingkatan menandakan adanya hambatan sistemik yang memengaruhi efektivitas perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian kegiatan pembangunan yang perlu mendapat perhatian untuk dilakukan perbaikan dan akselerasi yang signifikan pada pencapaian kinerja di triwulan berikutnya.

Selain pengukuran dari segi kinerja, perhitungan realisasi anggaran perangkat daerah sangat berpengaruh terhadap capaian kinerja perangkat daerah secara keseluruhan. Karena pada hakikatnya evaluasi terhadap hasil pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan untuk mengukur capaian target kinerja, daya serap anggaran, serta identifikasi terhadap hambatan/kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program/kegiatan. Evaluasi hasil RKPD dilakukan berdasarkan hasil evaluasi Renja perangkat daerah. Berikut diuraikan perbandingan jumlah dan pagu anggaran antara RKPD dan APBD Kabupaten Bogor serta pencapaian realisasi anggaran dan sisa anggaran Triwulan I Tahun 2025.

Tabel 2.4
Evaluasi Kinerja Anggaran RKPD Kabupaten
Bogor Triwulan I Tahun 2025

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU ANGGARAN RKPD (Rp)	PAGU ANGGARAN APBD (Rp)	REALISASI BELANJA		SISA ANGGARAN
				Rp	%	
1	Dinas Pendidikan	2,096,293,688,719	2,803,688,273,602	342,033,237,592	12.20	2,461,655,036,010
2	Dinas Kesehatan	2,665,974,024,253	2,511,731,212,973	491,978,883,574	19.59	2,019,752,329,399
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	826,510,399,656	591,682,641,761	26,479,576,114	4.48	565,203,065,647
4	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	389,640,122,051	393,968,957,826	24,672,433,019	6.26	369,296,524,807
5	Satuan Polisi Pamong Praja	61,515,164,889	54,829,642,064	11,831,375,805	21.58	42,998,266,259
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	26,438,602,319	26,972,119,793	3,591,615,589	13.32	23,380,504,204
7	Dinas Pemadam Kebakaran	40,967,041,458	43,586,213,709	7,219,309,745	16.56	36,366,903,964

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU ANGGARAN RKPD (Rp)	PAGU ANGGARAN APBD (Rp)	REALISASI BELANJA		SISA ANGGARAN
				Rp	%	
8	Dinas Sosial	54,320,369,442	51,539,750,612	14,370,941,690	27.88	37,168,808,922
9	Dinas Tenaga Kerja	29,411,522,781	24,363,657,823	3,406,048,234	13.98	20,957,609,589
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	40,760,916,829	25,070,628,734	3,843,224,089	15.33	21,227,404,645
11	Dinas Ketahanan Pangan	25,185,855,273	30,920,819,944	3,810,733,027	12.32	27,110,086,917
12	Dinas Lingkungan Hidup	223,778,875,718	216,913,030,477	26,166,602,085	12.06	190,746,428,392
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	68,524,225,986	80,752,567,175	16,559,943,953	20.51	64,192,623,222
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	44,714,790,000	115,526,801,632	49,968,351,228	43.25	65,558,450,404
15	Dinas Perhubungan	306,500,000,000	178,734,545,855	28,180,409,618	15.77	150,554,136,237
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	45,634,018,599	86,289,066,248	6,414,987,542	7.43	79,874,078,706
17	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	53,753,188,671	24,540,363,778	3,100,421,616	12.63	21,439,942,162
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	44,328,018,811	46,421,063,837	13,533,859,284	29.15	32,887,204,553
19	Dinas Pemuda dan Olahraga	170,059,642,513	272,852,956,837	34,259,605,591	12.56	238,593,351,246
20	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	43,587,045,047	38,728,235,056	4,120,403,015	10.64	34,607,832,041
21	Dinas Arsip dan Perpustakaan	21,194,378,343	15,343,443,572	2,397,193,284	15.62	12,946,250,288
22	Dinas Perikanan dan Peternakan	103,222,627,992	76,351,227,570	7,265,219,195	9.52	69,086,008,375
23	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	102,269,537,390	113,319,140,329	11,994,775,915	10.58	101,324,364,414
24	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	52,058,559,715	52,050,176,391	6,638,813,944	12.75	45,411,362,447
25	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	52,341,570,570	45,316,421,017.00	4,949,334,913	10.92	40,367,086,104
26	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1,245,272,911,668	1,948,754,549,792	298,599,750,193	15.32	1,650,154,799,599

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU ANGGARAN RKPD (Rp)	PAGU ANGGARAN APBD (Rp)	REALISASI BELANJA		SISA ANGGARAN
				Rp	%	
27	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	260,942,191,613	237,069,255,992	3,265,432,116	1.38	233,803,823,876
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	278,669,150,757	281,719,137,723	5,014,286,932	1.78	276,704,850,791
29	Sekretariat Daerah	147,957,445,784	175,673,554,380	33,410,580,774	19.02	142,262,973,606
30	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	178,788,717,612	217,667,410,548	30,650,227,885	14.08	187,017,182,663
31	Inspektorat	47,825,110,572	56,054,294,990	7,596,703,627	13.55	48,457,591,363
32	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	228,894,340,618	128,606,892,252	26,981,155,368	20.98	101,625,736,884
33	Kecamatan Cibinong	111,813,254,137	89,587,042,240	13,542,173,476	15.12	76,044,868,764
34	Kecamatan Gunung Putri	17,692,000,000	17,723,710,394	1,354,376,951	7.64	16,369,333,443
35	Kecamatan Citeureup	15,049,746,280	14,305,300,481	1,873,638,118	13.10	12,431,662,363
36	Kecamatan Sukaraja	9,529,100,000	8,762,014,085	1,975,481,566	22.55	6,786,532,519
37	Kecamatan Babakan Madang	6,264,847,205	6,256,515,778	1,146,352,090	18.32	5,110,163,688
38	Kecamatan Jonggol	7,194,455,271	7,852,093,161	1,182,285,527	15.06	6,669,807,634
39	Kecamatan Cileungsi	7,050,609,987	6,933,796,260	1,246,575,597	17.98	5,687,220,663
40	Kecamatan Cariu	6,869,564,055	6,146,667,646	1,321,317,539	21.50	4,825,350,107
41	Kecamatan Sukamakmur	9,385,473,922	9,014,951,495	992,131,508	11.01	8,022,819,987
42	Kecamatan Parung	6,807,911,933	7,393,052,463	1,007,841,164	13.63	6,385,211,299
43	Kecamatan Gunungsindur	7,363,834,475	7,029,549,479	1,482,193,376	21.09	5,547,356,103
44	Kecamatan Kemang	19,721,842,021	21,586,856,998	2,310,939,583	10.71	19,275,917,415
45	Kecamatan Bojonggede	11,138,180,400	11,961,267,750	2,077,752,727	17.37	9,883,515,023
46	Kecamatan Leuwiliang	7,462,414,493	10,507,509,045	1,559,654,578	14.84	8,947,854,467
47	Kecamatan Ciampea	20,369,431,450	20,638,957,917	1,392,446,109	6.75	19,246,511,808
48	Kecamatan Cibungbulang	7,449,380,563	7,279,841,577	1,581,358,622	21.72	5,698,482,955
49	Kecamatan Pamijahan	6,069,513,828	6,070,205,577	1,339,815,828	22.07	4,730,389,749
50	Kecamatan Rumpin	6,629,977,060	6,305,581,100	1,322,113,697	20.97	4,983,467,403
51	Kecamatan Jasinga	8,229,718,248	8,194,083,453	1,179,173,549	14.39	7,014,909,904
52	Kecamatan Parung Panjang	17,938,754,233	17,834,464,726	1,591,584,214	8.92	16,242,880,512
53	Kecamatan Nanggung	6,715,000,000	7,531,185,856	2,268,357,952	30.12	5,262,827,904
54	Kecamatan Cigudeg	9,233,254,384	9,404,756,711	1,455,539,649	15.48	7,949,217,062
55	Kecamatan Tenjo	5,834,500,000	6,145,640,957	1,339,350,191	21.79	4,806,290,766

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU ANGGARAN RKPD (Rp)	PAGU ANGGARAN APBD (Rp)	REALISASI BELANJA		SISA ANGGARAN
				Rp	%	
56	Kecamatan Ciawi	7,269,000,000	6,970,324,456	1,520,864,748	21.82	5,449,459,708
57	Kecamatan Cisarua	13,157,000,000	12,485,691,361	2,531,108,927	20.27	9,954,582,434
58	Kecamatan Megamendung	6,343,897,459	6,654,824,330	1,497,273,531	22.50	5,157,550,799
59	Kecamatan Caringin	7,761,102,667	7,561,479,920	1,212,709,756	16.04	6,348,770,164
60	Kecamatan Cijeruk	6,868,000,000	6,937,890,570	1,092,203,757	15.74	5,845,686,813
61	Kecamatan Ciomas	11,737,000,000	11,418,982,231	1,936,596,291	16.96	9,482,385,940
62	Kecamatan Dramaga	6,568,433,590	6,605,142,717	1,261,017,768	19.09	5,344,124,949
63	Kecamatan Tamansari	7,603,299,854	7,504,848,370	1,475,630,285	19.66	6,029,218,085
64	Kecamatan Klapanunggal	9,191,249,580	8,260,308,287	1,421,121,276	17.20	6,839,187,011
65	Kecamatan Ciseeng	8,644,799,780	8,008,405,754	1,254,650,463	15.67	6,753,755,291
66	Kecamatan Rancabungur	6,553,000,000	6,433,654,095	1,095,074,902	17.02	5,338,579,193
67	Kecamatan Sukajaya	9,028,570,546	9,296,558,984	1,313,864,299	14.13	7,982,694,685
68	Kecamatan Tanjungsari	6,669,496,196	6,507,255,202	1,304,380,131	20.05	5,202,875,071
69	Kecamatan Tajurhalang	19,970,076,593	19,479,834,315	1,347,430,940	6.92	18,132,403,375
70	Kecamatan Cigombong	18,996,754,246	19,815,047,443	1,264,383,063	6.38	18,550,664,380
71	Kecamatan Leuwisadeng	6,580,000,000	6,830,703,150	2,110,944,660	30.90	4,719,758,490
72	Kecamatan Tenjolaya	7,706,558,733	6,896,213,871	1,348,225,420	19.55	5,547,988,451
KABUPATEN BOGOR		10,469,795,058,838	11,439,170,264,497	1,625,835,370,384	14.21	9,813,334,894,113

Sumber : Laporan Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten Bogor Triwulan I Tahun 2025, Bappedalitbang, 2025

Realisasi anggaran Kabupaten Bogor yang baru mencapai 14,21% dari total anggaran sebesar Rp11,4 triliun merupakan indikator kinerja fiskal yang perlu mendapatkan perhatian serius. Dengan realisasi sebesar Rp1,62 triliun dan sisa anggaran mencapai Rp9,81 triliun, muncul pertanyaan fundamental mengenai efektivitas perencanaan, kesiapan pelaksanaan program, serta kinerja perangkat daerah dalam merealisasikan kegiatan sesuai rencana. Rendahnya capaian realisasi anggaran pada triwulan awal berisiko menimbulkan efek domino, seperti menumpuknya kegiatan di akhir tahun anggaran, rendahnya serapan tenaga kerja dari kegiatan pemerintah, serta berkurangnya dampak langsung pembangunan terhadap masyarakat. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun anggaran telah dialokasikan dengan jumlah besar, kemampuan serapan dan pelaksanaan kegiatan belum berjalan optimal.

Untuk mengatasi rendahnya realisasi anggaran sebesar 14,21%, Pemerintah Kabupaten Bogor perlu segera melakukan langkah-langkah percepatan pelaksanaan kegiatan. Pertama, evaluasi berkala terhadap progres fisik dan keuangan di masing-masing perangkat daerah perlu dilakukan secara lebih intensif dan adaptif. Kedua, penyederhanaan proses administrasi pengadaan barang dan jasa dapat mempercepat perputaran anggaran. Ketiga, peningkatan kapasitas manajerial dan teknis aparatur dalam perencanaan dan penganggaran juga menjadi kunci agar kegiatan dapat dijalankan lebih tepat waktu dan tepat sasaran. Terakhir, penting bagi pimpinan daerah untuk menguatkan mekanisme *reward and punishment* terhadap kinerja perangkat daerah, agar tercipta budaya kerja yang berorientasi pada hasil dan akuntabilitas. Dengan langkah-langkah ini, sisa anggaran yang besar masih memiliki peluang untuk dimanfaatkan secara optimal demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bogor.

Pencapaian kinerja pemerintah daerah dilihat dari urusan pemerintahan yang dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu dilakukan penilaian. Hal ini sangat penting karena terkait dengan pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah yang berkaitan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat. Adapun capaian kinerja berdasarkan urusan pemerintahan adalah sebagai berikut:

A. Urusan Pemerintahan Wajib

1. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar

Tabel 2.5

Capaian Kinerja Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Wajib
Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

No	Perangkat Daerah	Urusan	% Rata-Rata Tingkat Capaian IKU	% Realisasi Anggaran	% Rata-Rata Tingkat Capaian Program (Outcome)	% Rata-Rata Tingkat Capaian Kegiatan (Output)	% Rata-Rata Tingkat Capaian Sub Kegiatan (Output)	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Dinas Pendidikan	Pendidikan	0	12.2	0	0	17.22	4	14	93
2	Dinas Kesehatan	Kesehatan	80.47	19.59	10.51	21.94	8.97	5	24	105
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0	4.48	0	0	0	8	57	122
4	Dinas Perumahan, Kawasan Perukiman dan Pertanahan	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	15.80	6.26	48.79	25.12	52.10	7	20	53
5	Satuan Polisi Pamong Praja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dinas Pemadam Kebakaran	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	21.45	18.06	10.58	18.78	11.18	6	34	159
6	Dinas Sosial	Sosial	7.58	27.88	15.85	10.95	17.93	7	17	81
Total			20.88	14.24	14.29	12.80	17.90	37	166	613
Predikat			Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah			

Sumber : Laporan Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten Bogor Triwulan I Tahun 2025, diolah, Bappedalitbang, 2025

Berdasarkan data capaian indikator kinerja utama (IKU), realisasi anggaran, serta tingkat capaian output dan outcome dari program, kegiatan, dan sub kegiatan pada sejumlah perangkat daerah, dapat disampaikan evaluasi sebagai berikut:

Secara umum, rata-rata capaian IKU perangkat daerah masih tergolong rendah, yaitu hanya sebesar 20,88%, dengan rata-rata realisasi anggaran sebesar 14,24%. Hal ini menunjukkan bahwa belum terjadi keselarasan antara perencanaan kinerja dengan pelaksanaan anggaran di sebagian besar perangkat daerah. Selain itu, rata-rata tingkat capaian program (*outcome*) baru mencapai 14,29%, sedangkan capaian *output* kegiatan dan sub kegiatan masing-masing sebesar 12,80% dan 17,90%.

Beberapa hal penting yang dapat disoroti:

- a. Dinas Kesehatan memiliki capaian IKU tertinggi (80,47%), walaupun realisasi anggaran masih tergolong rendah (19,59%). Hal ini menunjukkan efektivitas relatif tinggi dalam pencapaian sasaran strategis meskipun dengan penggunaan anggaran yang belum optimal.
- b. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mencatat capaian program (*outcome*) tertinggi (48,79%) di antara perangkat daerah lain, mengindikasikan bahwa upaya menuju hasil telah berjalan cukup baik, meskipun capaian IKU masih moderat (15,80%).
- c. Beberapa perangkat daerah seperti Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah belum menunjukkan capaian IKU sama sekali (0%), yang dapat mengindikasikan belum dimulainya pengukuran kinerja atau masih adanya kendala dalam proses input dan pelaporan kinerja.
- d. Dinas Sosial menunjukkan realisasi anggaran tertinggi (27,88%), namun capaian IKU dan *outcome* belum sebanding, sehingga perlu ditinjau efisiensi dan efektivitas belanja yang dilakukan.

Secara keseluruhan, masih terdapat ketimpangan antara jumlah program/kegiatan/sub kegiatan dengan realisasi kinerja dan anggaran, sebagaimana terlihat pada Dinas Pendidikan dan Dinas PUPR yang memiliki jumlah sub kegiatan yang tinggi, namun capaian kinerja dan output sangat rendah

2. Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar

Tabel 2.6

Capaian Kinerja Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

No	Perangkat Daerah	Urusan	% Rata-Rata Tingkat Capaian IKU	% Realisasi Anggaran	% Rata-Rata Tingkat Capaian Program (Outcome)	% Rata-Rata Tingkat Capaian Kegiatan (Output)	% Rata-Rata Tingkat Capaian Sub Kegiatan (Output)	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Dinas Tenaga Kerja	Tenaga Kerja	0	14.05	0.00	11.07	48.33	5	18	55
2	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0	15.33	0	12.25	5.88	10	28	68
3	Dinas Ketahanan Pangan	Pangan	0	12.32	0	7.16	6.41	5	15	66
4	Dinas Perumahan, Kawasan Perkotaan dan Pertanahan	Pertanahan	80.61	6.92	17.77	17.77	0.00	4	4	5
5	Dinas Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	0	12.06	2.98	11.35	7.13	10	24	66
6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	59.54	20.51	28.21	28.47	19.58	5	17	68
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pemberdayaan Masyarakat Desa	0	43.25	0	0	16.18	5	11	67
8	Dinas Perhubungan	Perhubungan	0	15.77	6.9	11.27	4.49	3	22	86
9	Dinas Komunikasi dan Informatika	Komunikasi dan Informatika Statistika Persandian	0	7.43	7.14	3.34	7.39	5	14	66
10	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0	12.63	0	22.42	4.77	8	15	56
11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Penanaman Modal	0	29.15	0	0	16.67	6	13	60
12	Dinas Pemuda dan Olahraga	Kepemudaan dan Olahraga	0.83	12.56	0	0	29.47	4	16	92
13	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Kebudayaan	18.69	4.47	3.17	15.72	30.94	3	5	8
14	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah	Perpustakaan Kearsipan	0	15.62	0	9.25	12.26	5	18	58
Total		Total	11.41	17.02	4.73	10.72	14.96	78	220	821

No	Perangkat Daerah	Urusan	% Rata-Rata Tingkat Capaian IKU	% Realisasi Anggaran	% Rata-Rata Tingkat Capaian Program (Outcome)	% Rata-Rata Tingkat Capaian Kegiatan (Output)	% Rata-Rata Tingkat Capaian Sub Kegiatan (Output)	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Predikat			Sangat Kurang	Sangat Kurang	Sangat Kurang	Sangat Kurang	Sangat Kurang			

Sumber : Laporan Hasil Evaluasi RKPD Kabupaten Bogor Triwulan I Tahun 2025, diolah

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian kinerja Perangkat Daerah pengampu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, diperoleh gambaran umum bahwa secara keseluruhan pelaksanaan program dan kegiatan pada triwulan I Tahun 2025 menunjukkan tingkat pencapaian yang masih sangat rendah. Hal ini tercermin dari rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) hanya sebesar 11,41%, dengan realisasi anggaran sebesar 17,02%, rata-rata capaian program (*outcome*) sebesar 4,73%, capaian kegiatan (*output*) sebesar 10,72%, dan capaian sub kegiatan (*output*) sebesar 14,96%. Seluruh indikator capaian ini berada dalam kategori "Sangat Kurang", mengindikasikan adanya tantangan serius dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah.

- Dari 13 Perangkat Daerah yang dievaluasi, dengan hasil sebagai berikut:
- a. Sebagian besar perangkat daerah belum menunjukkan capaian IKU, di mana 10 dari 14 dinas tercatat dengan capaian IKU 0%. Hal ini menandakan belum terukurnya dampak hasil kinerja terhadap tujuan strategis instansi tersebut.
 - b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi salah satu perangkat daerah yang menunjukkan capaian IKU paling tinggi, yakni 59,54%, dengan realisasi anggaran sebesar 20,51%. Ini menandakan bahwa terdapat korelasi yang positif antara realisasi anggaran dan capaian kinerja pada dinas tersebut.
 - c. Beberapa perangkat daerah lain, seperti Dinas Pemuda dan Olahraga dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, mulai menunjukkan capaian pada indikator *outcome* dan *output* meskipun dengan realisasi anggaran yang masih rendah.
 - d. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Dinas Penanaman Modal dan PTSP tercatat memiliki realisasi anggaran yang relatif tinggi (di atas 25%), namun tidak diikuti oleh capaian kinerja yang memadai, mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara belanja dan hasil.

Dilihat dari jumlah program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan (masing-masing sebanyak 78 program, 220 kegiatan, dan 821 sub kegiatan), perlu dilakukan *review* menyeluruh terhadap perencanaan dan penganggaran, agar program yang direncanakan lebih terfokus, terukur, dan berdampak nyata terhadap capaian kinerja daerah.

B. Urusan Pemerintahan Pilihan

Tabel 2.7

Capaian Kinerja Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pemerintahan Pilihan

No	Perangkat Daerah	Urusan	% Rata-Rata Tingkat Capaian IKU	% Realisasi Anggaran	% Rata-Rata Tingkat Capaian Program (Outcome)	% Rata-Rata Tingkat Capaian Kegiatan (Output)	% Rata-Rata Tingkat Capaian Sub Kegiatan (Output)	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Dinas Perikanan dan Peternakan	Kelautan dan Perikanan Pertanian	30.55	9.52	0	0	0	10	31	65
2	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Pariwisata	0	12.36	57.47	1.05	25.12	4	6	20
3	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	Pertanian	27.06	10.58	0	13.34	11.12	6	15	69
4	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Perdagangan Perindustrian	7.52	12.75	25	25	25	10	25	89
5	Dinas Tenaga Kerja	Transmigrasi	0	0	0	0	0	1	1	4
Total		Total	16.28	10.55	16.49	7.88	12.25	31	78	247
Predikat			Sangat Kurang	Sangat Kurang	Sangat Kurang	Sangat Kurang	Sangat Kurang			

Sumber : Laporan Hasil Evaluasi RKPD Kabupaten Bogor Triwulan I Tahun 2025, diolah

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Perangkat Daerah (PD) yang berada di bawah sektor ekonomi, yaitu Dinas Perikanan dan Peternakan, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, serta Dinas Perdagangan dan Perindustrian, diketahui bahwa capaian kinerja secara umum berada pada kategori "Sangat Kurang". Rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) hanya sebesar 16,28%, menunjukkan bahwa target strategis belum tercapai secara optimal. Realisasi anggaran juga masih sangat rendah, yaitu 10,55%, yang mencerminkan belum maksimalnya serapan anggaran selama periode evaluasi.

Dari sisi *output* dan *outcome* program, hasilnya pun menunjukkan kinerja yang kurang memuaskan. Capaian rata-rata *outcome* program hanya sebesar 16,49%, sedangkan capaian *output* kegiatan dan sub kegiatan masing-masing berada di angka 13,88% dan 12,24%. Hal ini menandakan bahwa efektivitas pelaksanaan program belum berjalan sebagaimana mestinya.

Jika dilihat secara rinci:

- a. Dinas Perikanan dan Peternakan memiliki capaian IKU tertinggi sebesar 30,55%, tetapi capaian outcome dan outputnya masih 0%, dengan serapan anggaran hanya 9,52%.
- b. Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan menunjukkan capaian IKU sebesar 27,06%, namun outcome belum tercapai (0%), sedangkan output kegiatan dan sub kegiatan masing-masing sebesar 13,34% dan 11,12%.
- c. Dinas Perdagangan dan Perindustrian memiliki capaian IKU terendah (7,52%), namun menunjukkan hasil yang relatif lebih baik dalam hal outcome dan output (25%), serta serapan anggaran 12,75%.

Dari jumlah program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah direncanakan, yaitu 31 program, 78 kegiatan, dan 247 sub kegiatan, terlihat bahwa pelaksanaan masih jauh dari target. Hal ini perlu menjadi perhatian serius, mengingat program-program di sektor ekonomi berperan penting dalam mendorong pertumbuhan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Kinerja perangkat daerah masih tergolong sangat rendah pada triwulan ini. Diperlukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan terhadap program dan kegiatan, agar target pembangunan daerah dapat tercapai sesuai yang diharapkan.

C. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

Tabel 2.8
 Capaian Kinerja Perangkat Daerah Pengampu
 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

No	Perangkat Daerah	% Rata-Rata Tingkat Capaian IKU	% Realisasi Anggaran	% Rata-Rata Tingkat Capaian Program (Outcome)	% Rata-Rata Tingkat Capaian Kegiatan (Output)	% Rata-Rata Tingkat Capaian Sub Kegiatan (Output)	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	0.00	10.92	0.00	0.00	2.85	4	17	92
2	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0.00	15.32	0.00	8.29	12.85	3	14	85
3	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	72.10	1.38	24.80	24.00	11.86	2	9	60
4	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0.00	1.78	0.03	17.48	16.27	3	14	67

No	Perangkat Daerah	% Rata-Rata Tingkat Capaian IKU	% Realisasi Anggaran	% Rata-Rata Tingkat Capaian Program (Outcome)	% Rata-Rata Tingkat Capaian Kegiatan (Output)	% Rata-Rata Tingkat Capaian Sub Kegiatan (Output)	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Total		18.02	7.35	6.21	12.44	10.96	12	54	304
Predikat		Sangat Kurang	Sangat Kurang	Sangat Kurang	Sangat Kurang	Sangat Kurang			

Sumber : Laporan Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten Bogor Triwulan I tahun 2025

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), realisasi anggaran, serta capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan sampai dengan periode tertentu, dapat disimpulkan bahwa secara umum kinerja perangkat daerah yang dievaluasi masih berada pada kategori “Sangat Kurang”.

Tingkat rata-rata capaian IKU secara keseluruhan hanya mencapai 18,02%, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tiga perangkat daerah belum menunjukkan capaian IKU sama sekali (0,00%), yakni Bappeda Litbang, BPKAD, dan BKPSDM.
- b. Hanya Bapenda yang menunjukkan capaian signifikan pada IKU, yaitu sebesar 72,10%, yang turut menyumbang pada angka rata-rata keseluruhan.

Capaian rata-rata realisasi anggaran juga masih sangat rendah, yakni 7,35%, dengan BPKAD mencatatkan nilai tertinggi (15,32%), sedangkan Bapenda mencatatkan nilai terendah (1,38%). Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun beberapa perangkat daerah memiliki program strategis, pelaksanaan anggarannya belum optimal.

Dari sisi capaian program (outcome), nilai rata-rata berada pada angka 6,21%, yang menunjukkan bahwa output kegiatan belum secara signifikan memberikan hasil pada tingkat outcome. Capaian kegiatan (output) sedikit lebih tinggi di angka 12,44%, dengan variasi antar perangkat daerah cukup lebar, dari 0% (Bappedalitbang) hingga 24% (Bapenda).

Sementara itu, capaian sub kegiatan sebagai level pelaksanaan terkecil menunjukkan angka rata-rata 10,96%. Ini menunjukkan bahwa secara teknis, perangkat daerah telah mulai melaksanakan aktivitas, tetapi masih sangat jauh dari target yang seharusnya.

Dari segi jumlah, seluruh perangkat daerah yang dievaluasi mengelola total:

- 12 program
- 54 kegiatan
- 304 sub kegiatan

Namun capaian realisasi masih belum sejalan dengan jumlah tersebut, menunjukkan kemungkinan adanya hambatan dalam implementasi, perencanaan kegiatan yang belum matang, atau kendala administratif dan teknis lainnya.

D. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Tabel 2.9

Capaian Kinerja Perangkat Daerah Pengampu Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

No	Perangkat Daerah	% Rata-Rata Tingkat Capaian IKU	% Realisasi Anggaran	% Rata-Rata Tingkat Capaian Program (Outcome)	% Rata-Rata Tingkat Capaian Kegiatan (Output)	% Rata-Rata Tingkat Capaian Sub Kegiatan (Output)	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Sekretariat Daerah	0.00	19.02	0.00	2.49	13.24	3	20	76
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	12.50	14.08	7.73	18.55	14.39	2	17	85
Total		6.25	16.55	3.87	10.52	13.82	5	37	161
Predikat		Sangat Kurang	Sangat Kurang	Sangat Kurang	Sangat Kurang	Sangat Kurang			

Sumber : Laporan Hasil Evaluasi RKPD Kabupaten Bogor Triwulan I Tahun 2025, Bappedalitbang

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja dan realisasi anggaran hingga periode tertentu, diperoleh gambaran bahwa dua perangkat daerah, yaitu Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), menunjukkan tingkat capaian yang masih sangat kurang di berbagai indikator kinerja utama dan keluaran.

- Secara rinci:
1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
 - Sekretariat Daerah mencatat 0%, yang berarti belum ada capaian IKU yang terlaporkan atau tercapai.
 - Sekretariat DPRD mencatat capaian sebesar 12,50%, namun angka ini masih jauh dari target minimal.
 - Rata-rata capaian IKU antar dua perangkat daerah hanya 6,25%, yang dikategorikan Sangat Kurang.
 2. Realisasi Anggaran
 - Sekretariat Daerah baru merealisasikan 19,02% dari total anggaran.
 - Sekretariat DPRD hanya 14,08%.
 - Secara total, rata-rata realisasi anggaran adalah 16,55%, masih sangat rendah dibandingkan dengan waktu pelaksanaan yang telah berjalan.
 3. Capaian Program (Outcome)

- o Rata-rata capaian outcome hanya 3,87%, dengan Sekretariat Daerah mencatat 0% dan Sekretariat DPRD sebesar 7,73%.
4. Capaian Kegiatan (Output)
- o Tingkat capaian kegiatan rata-rata sebesar 10,52%, yang mencerminkan lambannya pelaksanaan kegiatan.
5. Capaian Sub Kegiatan (Output)
- o Meskipun sedikit lebih tinggi, rata-rata capaian output sub kegiatan hanya mencapai 13,82%, masih jauh dari target minimal pelaksanaan triwulan.

- Dari sisi struktur perencanaan:
- Total program yang direncanakan oleh kedua perangkat daerah sebanyak 5 program, terdiri atas 37 kegiatan dan 161 sub kegiatan.
 - Namun, realisasi dan capaian dari seluruh komponen ini menunjukkan bahwa pelaksanaan masih belum optimal.

Kinerja dua perangkat daerah yang dievaluasi berada pada predikat "Sangat Kurang" di seluruh aspek yang diukur: capaian IKU, realisasi anggaran, dan output-outcome program/kegiatan. Hal ini mengindikasikan adanya tantangan serius dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan serta program, baik dari sisi administratif maupun teknis.

E. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Tabel 2.10
 Capaian Kinerja Perangkat Daerah Pengampu
 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

No	Perangkat Daerah	% Rata-Rata Tingkat Capaian IKU	% Realisasi Anggaran	% Rata-Rata Tingkat Capaian Program (Outcome)	% Rata-Rata Tingkat Capaian Kegiatan (Output)	% Rata-Rata Tingkat Capaian Sub Kegiatan (Output)	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Inspektorat	0.00	13.55	32.41	17.36	13.45	3	12	53
Total		0.00	13.55	32.41	17.36	13.45	3	12	53
Predikat		Sangat Kurang	Sangat Kurang	Sangat Kurang	Sangat Kurang	Sangat Kurang			

Sumber : Laporan Hasil Evaluasi RKPD Kabupaten Bogor Triwulan I Tahun 2025, Bappedalitbang, 2025

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Bogor, secara umum menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pada periode ini masih berada pada kategori "Sangat Kurang". Hal ini terlihat dari berbagai indikator capaian yang seluruhnya berada jauh di bawah target yang diharapkan.

Persentase Tingkat Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) tercatat sebesar 0,00%, yang menunjukkan bahwa belum ada indikator utama yang berhasil dicapai selama periode evaluasi. Hal ini mengindikasikan perlunya perhatian serius terhadap perencanaan dan pelaksanaan strategi kinerja di lingkungan Inspektorat.

Selanjutnya, Realisasi Anggaran juga masih sangat rendah, yaitu hanya 13,55% dari total anggaran yang tersedia. Tingkat serapan anggaran yang minim ini menunjukkan belum optimalnya pelaksanaan kegiatan, serta kemungkinan adanya kendala administratif maupun teknis dalam proses pengadaan atau pelaksanaan program.

- Dari sisi capaian substansi:
- Capaian Program (Outcome) hanya sebesar 32,41%;
 - Capaian Kegiatan (Output) sebesar 17,36%; dan
 - Capaian Sub Kegiatan (Output) bahkan lebih rendah lagi yaitu 13,45%.

Jumlah program, kegiatan, dan sub kegiatan yang tercatat masing-masing sebanyak 3 program, 12 kegiatan, dan 53 sub kegiatan. Namun demikian, angka-angka capaian menunjukkan bahwa pelaksanaan masih jauh dari target dan perlu segera dilakukan langkah perbaikan.

F. Unsur Pemerintahan Umum

Tabel 2.11
Capaian Kinerja Perangkat Daerah Pengampu
Unsur Pemerintahan Umum

No	Perangkat Daerah	% Rata-Rata Tingkat Capaian IKU	% Realisasi Anggaran	% Rata-Rata Tingkat Capaian Program (Outcome)	% Rata-Rata Tingkat Capaian Kegiatan (Output)	% Rata-Rata Tingkat Capaian Sub Kegiatan (Output)	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0.00	20.98	0.81	2.25	10.34	6	13	80
Total		0.00	20.98	0.81	2.25	10.34	6	13	80
Predikat		Sangat Kurang	Sangat Kurang	Sangat Kurang	Sangat Kurang	Sangat Kurang			

Sumber : Laporan Hasil Evaluasi RKPD Kabupaten Bogor Triwulan I Tahun 2025, Bappedalitbang, 2025

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terlihat bahwa kinerja perangkat daerah ini masih sangat rendah pada seluruh indikator capaian. Hal ini tercermin dari:

- a. Tingkat capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebesar 0,00%, menunjukkan bahwa belum ada target kinerja utama yang berhasil dicapai sampai dengan periode evaluasi dilakukan.
- b. Realisasi anggaran hanya mencapai 20,98%, yang mengindikasikan rendahnya penyerapan anggaran dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan.
- c. Capaian rata-rata program (*outcome*) tercatat sebesar 0,81%, sementara capaian rata-rata kegiatan (*output*) hanya sebesar 2,25%, dan capaian sub kegiatan (*output*) sebesar 10,34%. Angka-angka ini menggambarkan bahwa dampak dan hasil pelaksanaan kegiatan masih jauh dari target yang ditetapkan.

Secara keseluruhan, dengan total 6 program, 13 kegiatan, dan 80 sub kegiatan, tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan belum optimal. Setiap aspek capaian diberi predikat "Sangat Kurang", menunjukkan perlunya perhatian serius dan tindakan korektif yang cepat.

Faktor-faktor penyebab rendahnya capaian ini perlu dianalisis lebih lanjut, seperti kemungkinan adanya hambatan administratif, perencanaan yang tidak realistis, keterbatasan sumber daya manusia, atau kendala koordinasi antar unit kerja. Perangkat daerah diharapkan segera melakukan evaluasi internal, memperbaiki perencanaan pelaksanaan kegiatan, serta mengoptimalkan penggunaan anggaran agar sasaran pembangunan di bidang politik dan kesatuan bangsa dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

G. Unsur Kewilayahan

Tabel 2.12

Capaian Kinerja Perangkat Daerah Pengampu

Unsur Kewilayahan

No	Perangkat Daerah	% Rata-Rata Tingkat Capaian IKU	% Realisasi Anggaran	% Rata-Rata Tingkat Capaian Program (Outcome)	% Rata-Rata Tingkat Capaian Kegiatan (Output)	% Rata-Rata Tingkat Capaian Sub Kegiatan (Output)	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Kecamatan Cibinong	11.35	15.12	18.68	18.27	38.85	5	17	63
2	Kecamatan Gunung Putri	0.00	7.64	24.63	27.19	18.74	6	13	41
3	Kecamatan Citeureup	6.15	13.10	8.41	15.34	22.09	6	18	65
4	Kecamatan Sukaraja	0.00	22.55	14.37	16.55	16.52	6	17	72
5	Kecamatan Babakan Madang	2.45	18.32	17.15	15.56	23.36	6	17	59
6	Kecamatan Jonggol	4.61	15.06	6.69	12.10	18.84	6	17	52
7	Kecamatan Cileungsi	0.00	17.98	12.77	16.22	18.09	6	14	54
8	Kecamatan Cariu	11.98	21.50	17.82	16.57	16.76	6	17	47

No	Perangkat Daerah	% Rata-Rata Tingkat Capaian IKU	% Realisasi Anggaran	% Rata-Rata Tingkat Capaian Program (Outcome)	% Rata-Rata Tingkat Capaian Kegiatan (Output)	% Rata-Rata Tingkat Capaian Sub Kegiatan (Output)	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
9	Kecamatan Sukamakmur	4.08	11.01	12.37	18.25	13.71	6	17	66
10	Kecamatan Parung	4.86	13.63	14.74	14.67	12.54	6	17	65
11	Kecamatan Gunungsindur	8.29	21.09	13.81	21.80	22.13	6	18	65
12	Kecamatan Kemang	6.16	10.71	21.18	19.90	17.03	6	20	66
13	Kecamatan Bojonggede	0.00	17.37	12.03	6.05	2.08	6	19	71
14	Kecamatan Leuwiliang	5.54	14.84	10.39	11.61	16.95	6	16	59
15	Kecamatan Ciampea	2.56	6.75	8.58	10.97	2.04	6	17	51
16	Kecamatan Cibungbulang	4.37	21.72	26.48	29.67	42.30	6	18	56
17	Kecamatan Pamijahan	8.14	22.07	12.21	21.27	4.65	6	14	43
18	Kecamatan Rumpin	2.08	20.97	26.64	30.73	20.29	6	18	67
19	Kecamatan Jasinga	5.56	14.39	4.39	10.46	10.85	6	18	65
20	Kecamatan Parung Panjang	4.66	8.92	10.55	10.75	5.49	6	17	72
21	Kecamatan Nanggung	13.29	30.12	20.36	29.07	26.19	6	18	74
22	Kecamatan Cigudeg	2.62	15.48	11.84	13.06	11.10	6	19	72
23	Kecamatan Tenjo	6.38	21.79	9.77	19.37	21.25	6	17	56
24	Kecamatan Ciawi	7.37	21.82	23.97	27.59	24.42	5	17	52
25	Kecamatan Cisarua	0.34	20.27	15.00	10.48	22.82	6	17	56
26	Kecamatan Megamendung	7.87	22.50	18.58	25.17	5.91	6	17	57
27	Kecamatan Caringin	4.08	16.04	11.54	13.29	4.41	6	18	72
28	Kecamatan Cijeruk	2.51	15.74	12.76	9.12	6.17	6	18	61
29	Kecamatan Ciomas	8.30	16.96	20.39	23.47	39.34	6	19	61
30	Kecamatan Dramaga	3.08	19.09	18.31	13.29	12.62	5	16	56
31	Kecamatan Tamansari	3.55	19.66	21.23	21.82	21.38	6	18	61
32	Kecamatan Klapanunggal	2.98	17.20	16.30	16.55	20.33	6	17	58
33	Kecamatan Ciseeng	7.05	15.67	20.67	20.36	22.42	5	17	61
34	Kecamatan Rancabungur	6.74	17.02	19.52	28.34	23.41	6	18	75
35	Kecamatan Sukajaya	7.36	14.13	24.20	10.44	20.27	6	18	79
36	Kecamatan Tanjungsari	0.00	20.05	18.10	21.54	21.09	6	18	51
37	Kecamatan Tajurhalang	0.00	6.92	7.50	7.06	9.59	6	17	54
38	Kecamatan Cigombong	4.96	6.38	16.51	16.59	22.40	6	17	62

No	Perangkat Daerah	% Rata-Rata Tingkat Capaian IKU	% Realisasi Anggaran	% Rata-Rata Tingkat Capaian Program (Outcome)	% Rata-Rata Tingkat Capaian Kegiatan (Output)	% Rata-Rata Tingkat Capaian Sub Kegiatan (Output)	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
39	Kecamatan Leuwisadeng	3.63	30.90	15.58	30.08	19.55	6	17	55
40	Kecamatan Tenjolaya	0.00	17.04	7.24	4.71	1.54	6	18	75
Total		4.62	16.99	15.58	17.63	17.49	236	690	2447
Predikat		Sangat Kurang	Sangat Kurang	Sangat Kurang	Sangat Kurang	Sangat Kurang	467	1363	4831

Sumber : Laporan Hasil Evaluasi RKPD Kabupaten Bogor Triwulan I Tahun 2025, Bappedalitbang

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap 40 Kecamatan di Kabupaten Bogor, secara umum kinerja perangkat daerah pada periode ini masih berada dalam kategori *sangat kurang*, ditinjau dari berbagai aspek capaian kinerja.

a. Tingkat Capaian IKU dan Realisasi Anggaran

Rata-rata tingkat capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) hanya mencapai 4,62%, mencerminkan ketidaksesuaian yang cukup signifikan antara target dan realisasi indikator utama kinerja masing-masing Kecamatan. Realisasi anggaran pun tergolong rendah, yakni rata-rata 16,99%, menunjukkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran yang masih harus ditingkatkan.

b. Capaian Output dan Outcome Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Capaian outcome program secara rata-rata hanya 15,58%, sedangkan capaian output kegiatan mencapai 17,63% dan output sub kegiatan 17,49%. Angka-angka ini mengindikasikan bahwa dampak maupun hasil langsung dari pelaksanaan program belum maksimal dan masih jauh dari target yang diharapkan.

c. Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Secara keseluruhan, terdapat 236 program, 690 kegiatan, dan 2.447 sub kegiatan yang dilaksanakan oleh 40 Kecamatan. Meskipun dari sisi kuantitas kegiatan terlihat besar, hal tersebut belum diiringi oleh kualitas capaian yang optimal.

d. Capaian Tertinggi dan Terendah

Beberapa Kecamatan menunjukkan capaian sub kegiatan yang relatif tinggi, seperti Kecamatan Cibungbulang (42,30%) dan Kecamatan Ciomas (39,34%). Sebaliknya, Kecamatan Tenjolaya dan Bojonggede menunjukkan capaian sub kegiatan yang sangat rendah, masing-masing hanya sebesar 1,54% dan 2,08%. Pada indikator capaian IKU, sebagian besar Kecamatan masih berada di angka 0%, seperti Gunung Putri, Sukaraja, Cileungsi, Bojonggede, Tanjungsari, Tajurhalang, dan Tenjolaya.

Secara agregat, semua indikator capaian kinerja (IKU, anggaran, outcome dan output) masih tergolong *sangat kurang*. Hal ini perlu menjadi perhatian serius, khususnya dalam hal:

- Perencanaan program dan kegiatan yang lebih realistis dan terukur.
- Peningkatan kapasitas pelaksana kegiatan di tingkat Kecamatan.
- Monitoring dan evaluasi yang lebih intensif terhadap pelaksanaan program dan penggunaan anggaran.
- Optimalisasi peran camat sebagai koordinator wilayah pembangunan.

Perlu strategi percepatan untuk meningkatkan efektivitas kinerja, serta penguatan sinergi antara Kecamatan dan perangkat daerah teknis lainnya guna memastikan pencapaian target pembangunan daerah.

Secara umum, pelaksanaan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Triwulan I tahun anggaran 2025 di Kabupaten Bogor memiliki faktor penghambat dan pendorong. Faktor penghambat dan pendorong tersebut, antara lain:

1. Faktor Penghambat:

a. Rendahnya Pemahaman Perencanaan Berbasis Kinerja

Banyak perangkat daerah menunjukkan capaian IKU, outcome, dan output yang rendah, mengindikasikan masih lemahnya pemahaman terhadap perencanaan dan penganggaran berbasis hasil. Hal ini menyebabkan kegiatan tidak selaras dengan sasaran strategis.

b. Keterbatasan Kapasitas SDM Perencana dan Pelaksana

Masih terdapat gap kompetensi pada aparatur dalam menyusun, melaksanakan, dan melaporkan kegiatan sesuai indikator kinerja. Hal ini memperlambat proses pelaksanaan dan berimbas pada realisasi yang rendah.

c. Kurangnya Monitoring dan Evaluasi yang Efektif

Sistem pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan belum berjalan optimal. Akibatnya, terdapat kegiatan yang tidak tepat sasaran atau terlambat dilaksanakan.

d. Ketidaksesuaian Antara Perencanaan dan Penganggaran

Terdapat indikasi bahwa beberapa kegiatan dirancang tanpa memperhitungkan ketersediaan anggaran yang memadai, sehingga pelaksanaan menjadi tidak maksimal.

e. Kendala Teknis dan Administratif

Proses pengadaan, regulasi, atau mekanisme birokrasi yang rumit menjadi faktor penunda realisasi anggaran dan capaian kegiatan di sejumlah perangkat daerah, contohnya adalah (Penyesuaian dan perubahan rincian

belanja pada RKA-SKPD dan DPA-SKPD akibat adanya perubahan kriteria atau aturan penggunaan anggaran pada kegiatan yg bersumber dari dana transfer / juknis baru tersedia pasca penetapan APBD).

f. Minimnya Kolaborasi Antar-Unit Kerja

Kegiatan lintas sektor sering kali tidak terkoordinasi dengan baik, menyebabkan tumpang tindih atau ketidakefisienan dalam pelaksanaan kegiatan.

2. Faktor Pendorong:

a. Adanya perangkat daerah dengan kinerja relatif lebih tinggi

Beberapa perangkat daerah menunjukkan capaian kinerja yang lebih tinggi dibanding rata-rata. Hal ini bisa menjadi role model dalam implementasi program dan peningkatan kapasitas.

b. Komitmen pimpinan perangkat daerah

Perangkat daerah yang memiliki pimpinan dengan kepemimpinan kuat dan komitmen tinggi terhadap pencapaian kinerja menunjukkan hasil yang lebih baik dalam pelaksanaan program dan serapan anggaran.

c. Ketersediaan Sistem Informasi Kinerja

Penggunaan teknologi dan sistem informasi dalam perencanaan dan pelaporan mulai diterapkan di seluruh perangkat daerah dan menjadi pendorong efisiensi dan akuntabilitas.

d. Dukungan Stakeholder Lokal

Partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan lokal dalam mendukung pelaksanaan program turut memperkuat capaian di beberapa perangkat daerah terutama kecamatan, dalam kegiatan yang berbasis kebutuhan lokal.

3. Tindak Lanjut:

a. Peningkatan Kapasitas Aparatur Perangkat Daerah

- Melaksanakan pelatihan teknis dan pendampingan penyusunan dokumen perencanaan berbasis kinerja (RPJMD, Renstra, Renja, dan RKA) secara berkala.
- Mengembangkan kurikulum pelatihan berbasis studi kasus lokal, agar perencana memahami konteks wilayah masing-masing (khusus bagi perangkat daerah kecamatan).
- Mengintegrasikan materi penguatan IKU dan IKK dalam kegiatan bimbingan teknis atau workshop yang diselenggarakan oleh perangkat daerah terkait perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia.

- b. Penguatan Sistem Monitoring dan Evaluasi
 - Membentuk tim monev lintas sektor yang fokus melakukan pemantauan triwulanan terhadap pelaksanaan kegiatan di perangkat daerah.
 - Mengembangkan dashboard pemantauan real-time capaian kinerja berbasis aplikasi untuk deteksi dini terhadap deviasi output dan serapan anggaran.
 - Memastikan laporan monev menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan dan rekomendasi perencanaan tahun berikutnya.
- c. Penyelarasan Perencanaan dan Penganggaran
 - Melakukan review dan sinkronisasi RKPD dengan Renja perangkat daerah agar kegiatan yang dirancang sesuai dengan pagu anggaran yang tersedia.
 - Mendorong peran aktif TAPD dalam asistensi anggaran agar perencanaan berbasis prioritas dan hasil (*result-based budgeting*).
- d. Pemberian Insentif Kinerja Kecamatan
 - Mengembangkan skema *reward dan punishment* berbasis indikator kinerja daerah untuk mendorong semangat capaian target yang realistis dan terukur.
 - Menjadikan perangkat daerah berkinerja tinggi sebagai *pilot project* dan tempat studi tiru bagi kecamatan lain.
- e. Penyederhanaan Proses Administratif
 - Menyusun standar operasional prosedur (SOP) pelaksanaan kegiatan yang disederhanakan namun akuntabel.
 - Mendorong percepatan pelaksanaan kegiatan sejak awal tahun anggaran untuk menghindari penumpukan pada triwulan akhir.
- f. Penguatan Koordinasi dan Kolaborasi
 - Menetapkan forum koordinasi antar perangkat daerah sebagai wadah sinergi antara kecamatan, desa, dan perangkat daerah teknis.
 - Melibatkan perangkat daerah sektor pendukung dalam perencanaan khususnya di kecamatan (misal: Dinkes, Dinsos, Disdik) melalui kegiatan integratif.
- g. Pemanfaatan Teknologi Informasi
 - Optimalisasi penggunaan aplikasi perencanaan dan pelaporan seperti SIPD, e-Monev, dan e-Kinerja dengan pelatihan langsung kepada operator perangkat daerah.
 - Mendorong digitalisasi proses pelaporan untuk meningkatkan kecepatan dan akurasi data.

h. Peningkatan Partisipasi Masyarakat

- Memperkuat musrenbang partisipatif agar usulan masyarakat lebih tepat sasaran dan menjadi dasar penyusunan kegiatan prioritas.

Rekomendasi ini disusun untuk mendukung peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang akuntabel, partisipatif, dan berbasis hasil.

Secara rinci hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I sebagaimana tercantum pada **Buku II**.

Adapun terkait evaluasi sasaran daerah Kabupaten Bogor untuk perubahan RKPD tahun 2025, disajikan realisasi sasaran daerah Kabupaten Bogor tahun 2024, target 2025 dan target perubahan tahun 2025 sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.13
Evaluasi Sasaran Kabupaten Bogor pada Perubahan RKPD Tahun 2025

TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	REALISASI 2024	TARGET 2025	TARGET P-2025
1.1	Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas			1	IPM	Poin	73,63	74,11	74,02
		1.1.1	Meningkatnya pelayanan pendidikan	a.	Indeks Pendidikan	Poin	63,38	63,42	63.42
		1.1.2	Meningkatnya pelayanan kesehatan	a.	Indeks Kesehatan	Poin	84.46	85,14	85.14
		1.1.3	Meningkatnya ketahanan pangan	a.	Indeks Ketahanan Pangan	Poin	70,01	69,08	70,50
		1.1.4	Meningkatnya pelayanan ketenteraman dan ketertiban masyarakat	a.	Penurunan Gangguan Trantibum	%	87	90	
		1.1.5	Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan	a.	Cakupan Layanan Adminduk	%	76,01	84,94	
		1.1.6	Meningkatnya pelayanan infrastruktur publik	a.	Indeks Konektivitas Infrastruktur	poin	0,18	1,72	
				b.	Persentase Kawasan Permukiman Layak	%	99,57	99,59	
		1.1.7	Meningkatnya aksesibilitas ekonomi masyarakat	a.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	5.21	5,81	5,15-5,81

TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	REALISASI 2024	TARGET 2025	TARGET P-2025
		1.1.8	Meningkatnya pelayanan sosial kepada masyarakat	a.	Angka Kemiskinan	%	7,05	7,04	6,39-7,05
1.2	Terwujudnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik			1	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Poin	84,13	82,84	84,95
		1.2.1	Meningkatnya profesionalitas ASN	a.	Indeks Profesionalitas ASN	Poin	84,07	73	
		1.2.2	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	a.	Nilai SAKIP	Poin	69,38	70,15	69,80
				b.	Opini BPK	Predikat	WDP	WTP	
				c.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Poin	4,1	3,77	4,15
				d.	Indeks Desa Membangun (IDM)	Poin	0.808	0,8005	
		1.2.3	Meningkatnya pelayanan kewenangan daerah	a.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	84,92	85,35	
1.3	Terwujudnya Kabupaten Bogor yang Berdaya Saing			1	PDRB (ADHB)	Trilyun Rp	311.71	311,3	
		1.3.1	Meningkatnya inovasi daerah yang implementatif	a.	Indeks Inovasi Daerah	Poin	88,21	74,6	
		1.3.2	Meningkatnya investasi	a.	Nilai Realisasi Investasi Daerah	Triliun Rp	20.9	15,75	
		1.3.3	Meningkatnya pendapatan daerah	a.	Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	44.71	60,63	

TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	REALISASI 2024	TARGET 2025	TARGET P-2025
1.4	Terwujudnya Daya Dukung Lingkungan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi			1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	59,72	59,26	59,26
		1.4.1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	a.	Indeks Kualitas Air	Poin	51,64	67,20	
				b.	Indeks Kualitas Udara	Poin	75,65	50,17	
				c.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Poin	42,97	62,45	
		1.4.2	Menurunnya tingkat risiko bencana	a.	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Poin	101,72	105	101

Sumber : Rancangan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029

Sasaran pembangunan daerah adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Terdapat 8 sasaran daerah yang mendukung tujuan pertama, yaitu terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas, 3 sasaran daerah yang mendukung tujuan kedua, yaitu terwujudnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik, 3 sasaran daerah yang mendukung tujuan ketiga, yaitu terwujudnya Kabupaten Bogor yang berdaya saing, dan terdapat 2 sasaran daerah yang mendukung tujuan keempat, yaitu terwujudnya daya dukung lingkungan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

2.2 Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten Bogor Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025

Penetapan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan salah satu upaya percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang menggunakan prinsip pemerataan dan keadilan, Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah diamanatkan untuk memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dengan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah. Selain itu, dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 298 undang-undang tersebut, bahwa Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.

SPM diartikan sebagai ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Penerapan SPM dimaksudkan untuk menjamin akses dan mutu bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Adapun urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri dari :

1. Bidang Urusan Pendidikan;
2. Bidang Urusan Kesehatan;
3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum;
4. Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
5. Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat;
6. Bidang Urusan Sosial.

Keenam urusan wajib tersebut kemudian dikelompokkan menjadi 6 (enam) Jenis Standar Pelayanan Minimal yang masing-masingnya memiliki muatan materi SPM

yang mencakup Jenis, Mutu dan Penerima Pelayanan Dasar.

Sehubungan dengan penerapan SPM di Kabupaten Bogor, luas wilayah dan banyaknya jumlah penduduk menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten Bogor dalam menjangkau dan menerapkan standar pelayanan minimal bagi masyarakatnya. Namun Pemerintah Kabupaten Bogor berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas penerapan SPM.

Hal tersebut dapat dilihat dari belanja daerah Pemerintah Kabupaten Bogor yang telah memprioritaskan pendanaan pelaksanaan SPM pada setiap urusan sesuai dengan yang ditentukan. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Bogor juga secara berkelanjutan terus meningkatkan jumlah anggaran belanja untuk penguatan penerapan SPM di Kabupaten Bogor. Hal itu dilandasi oleh paradigma dalam penerapan SPM, bahwa bukan kinerja Pemerintah Daerah yang menjadi prioritas utama, tetapi terpenuhinya kebutuhan dasar warga negara yang prioritas utama.

Adapun penerapan Standar Pelayanan Minimal didasarkan pada prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran dan ketepatan. Sasaran Penerapan SPM tersebut dilakukan dengan beberapa tahapan sebagai berikut :

1. Pengumpulan data kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
2. Penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
3. Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
4. Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

Pemerintah Kabupaten Bogor selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas setiap tahapan penerapan SPM di Kabupaten Bogor. Upaya optimalisasi penerapan SPM sebagaimana dimaksud, dilakukan melalui pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor dengan fungsi utama mengoordinasikan penerapan SPM di Pemerintah Kabupaten Bogor. Selanjutnya dalam rangka memastikan pencapaian SPM. Pemerintah Kabupaten Bogor secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan setiap jenis SPM yang disusun dalam bentuk Rencana Aksi Penerapan SPM setiap tahun. Berikut ini disajikan data capaian SPM Kabupaten Bogor Triwulan I Tahun 2025.

Tabel 2.14
Capaian Standar Pelayanan Minimal
Kabupaten Bogor Triwulan I Tahun 2025

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Total Pencapaian
I	Kategori Indeks Pencapaian SPM Bidang Urusan Pendidikan	42.59%
1	Pendidikan Dasar Usia Dini	17.55%
2	Pendidikan Dasar	19.12%
3	Pendidikan Kesetaraan	91.11%
II	Kategori Indeks Pencapaian SPM Bidang Urusan Kesehatan	38.57%
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	30.76%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	32.09%
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	32.22%
4	Pelayanan Kesehatan Balita	30.52%
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	49.22%
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	37.91%
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	36.57%
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	39.55%
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	44.19%
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	54.87%
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	35.74%
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	39.23%
III	Kategori Indeks Pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum	2.99%
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	2.57%
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	3.41%
IV	Kategori Indeks Pencapaian SPM Bidang Urusan Permukiman	21.56%
1	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	18.12%
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	25.00%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Total Pencapaian
V	Kategori Indeks Pencapaian SPM Bidang Urusan Trantibumlinmas	36.94%
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)	36.94%
VI	Kategori Indeks Pencapaian SPM Bidang Urusan Kebencanaan	13.96%
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)	18.39%
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)	8.65%
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)	14.83%
VII	Kategori Indeks Pencapaian SPM Bidang Urusan Pemadam Kebakaran	13.66%
1	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)	13.66%
VIII	Kategori Indeks Pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial	8.85%
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	5.81%
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	7.13%
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	9.50%
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	12.27%
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	9.54%

Sumber : <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/>

2.3 Evaluasi Capaian Pelaksanaan Penerapan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) di Kabupaten Bogor

SDG's (*Sustainable Development Goals*) merupakan kelanjutan dari program pembangunan berkelanjutan (Millenium Development Goals) MDGs yang memiliki 17 tujuan pembangunan berkelanjutan dengan 169 target. Oleh karena itu, SDG's memiliki cakupan yang lebih luas dan akan mampu lebih tanggap atas penyebab utama kemiskinan serta kebutuhan universal. Tujuan SDG's mencakup tiga dimensi dari pembangunan berkelanjutan, yaitu pertumbuhan ekonomi dan inklusi sosial serta perlindungan terhadap lingkungan.

Tujuan SDG's mencakup lebih banyak aspek kehidupan yang diiringi dengan ambisi untuk menanggapi perubahan iklim, ketidaksetaraan, pekerjaan yang layak, pertumbuhan ekonomi, desa dan pemukiman masyarakat, energi, industrialisasi, konsumsi dan produksi yang berkelanjutan serta keadilan.

Percepatan pencapaian target tujuan pembangunan berkelanjutan SDG's merupakan amanah dari Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* yang dimaksud dalam peraturan tersebut adalah untuk (1) menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan (2) menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat (3) menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif (4) dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Selanjutnya peranan Pelaksanaan TPB/SDG's di Pemerintahan Kabupaten Bogor pada tahun 2016-2018 telah mengimplementasikan 17 (tujuh belas) tujuan dengan rencana pelaksanaan TPB/SDG's mengarah kepada sasaran membangun kelembagaan, dengan target yang dicapai yaitu Integrasi TPB/SDG's dalam membangun perencanaan daerah, membangun pemahaman publik akan pentingnya SDG's dan relevansi keterlibatan semua pihak dalam pelaksanaan serta pencapaiannya. Pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Bogor kembali akan merencanakan dan mengevaluasi pembangunan dengan pedoman peraturan Presiden atau Inpres No. 59 tahun 2017 yang didalamnya memuat 17 tujuan dan 169 target yang terukur dengan tenggang waktu yang ditentukan. Adapun hasil evaluasi pencapaian target SDG's dijelaskan melalui uraian berikut ini :

1) Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan

a. Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Bogor tahun 2024 tercatat sebesar 7,05%, lebih rendah dibandingkan tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Barat 7,46% maupun tingkat nasional 9,03%. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bogor memiliki kondisi ekonomi yang lebih baik atau penanganan kemiskinan yang lebih efektif dibandingkan rata-rata daerah lain di provinsi maupun tingkat nasional. Selama tahun 2022-2024, persentase penduduk miskin di Kabupaten Bogor cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2022, kemiskinan di Kabuoaten Bogor berada di angka 7,73%, kemudian pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 7,27%. Pada tahun 2024, angka kemiskinan ini kembali mengalami penurunan menjadi 7,05%.

b. Proporsi Peserta Jaminan Kesehatan

Pada tahun 2024 menunjukkan bahwa cakupan di Kabupaten Bogor mencapai 97,04%, lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Barat 95,97% tetapi masih lebih rendah dari tingkat nasional 98,67%. Hal ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Bogor memiliki akses layanan jaminan kesehatan yang relatif baik di tingkat provinsi, namun ada ruang untuk perbaikan agar mencapai tingkat nasional. Selama tahun 2022-2024, proporsi peserta jaminan kesehatan di Kabupaten Bogor cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2022, proporsi peserta jaminan kesehatan di Kabupaten Bogor mencapai 65,7%. Kemudian, pada tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 80,83%. Pada tahun 2024, proporsi peserta jaminan kesehatan di Kabupaten Bogor kembali meningkat menjadi 97,04%.

c. Rumah Tangga yang Mendapatkan Bantuan PKH

Selama tahun 2022-2024, jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Bogor cenderung fluktuatif. pada tahun 2022 jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan PKH di Kabupaten Bogor terdapat 125767 jiwa, meningkat menjadi 132.466 jiwa pada tahun 2023, namun kemudian menurun signifikan menjadi 113.232 rumah tangga pada tahun 2024.

d. Akses pada Layanan Air Minum dan Fasilitas Penyehatan Dasar

Pada tahun 2024, persentase indeks fasilitas penyehatan dasar dan Penduduk dengan Layanan Air Minum di Kabupaten Bogor memiliki angka proyeksi capaian tahun 2024 sebesar 81,12% dan 76,8%. Sedangkan, untuk provinsi Jawa Barat dan Nasional masih belum ada update terbaru pada tahun 2024. Pada tahun 2024, persentase indeks fasilitas penyehatan dasar dan Penduduk dengan Layanan Air Minum di Kabupaten Bogor memiliki angka proyeksi capaian tahun 2024 sebesar 81,12% dan 76,8%. Sedangkan, untuk provinsi Jawa Barat dan Nasional masih belum ada update terbaru pada tahun 2024. indeks fasilitas penyehatan dasar di Kabupaten Bogor mengalami peningkatan mulai dari 78,47% di tahun 2022 menjadi 79,78% pada tahun 2023. Kemudian, pada tahun 2024 memiliki nilai proyeksi sebesar 81,12%. Adapun perkembangan penduduk dengan layanan air minum cenderung meningkat dari angka 74,24% tahun 2022 dan memiliki nilai 75,55% pada tahun 2023, kemudian memiliki angka proyeksi sebesar 76,08% di tahun 2024.

2) Tujuan 2 Tanpa Kelaparan

a. Prevalensi Kekurangan Gizi (*Underweight*) pada Anak Balita

Selama tahun 2022-2024, prevalensi kekurangan gizi pada anak balita di Kabupaten Bogor cenderung menurun. Prevalensi kekurangan gizi pada anak balita di Kabupaten Bogor menunjukkan tren penurunan yang konsisten dari tahun 2022 hingga 2024. Pada tahun 2022, prevalensi kekurangan gizi tercatat sebesar 4,9%, menurun cukup signifikan menjadi 3,04% pada tahun 2023, dan kembali sedikit menurun pada angka proyeksi menjadi 2,95% pada tahun 2024.

b. Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat

Pada tahun 2024, prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan di Kabupaten Bogor yang tercatat memiliki angka proyeksi sebesar 39,83%. Selama tahun 2022-2024, prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan di Kabupaten Bogor cenderung mengalami penurunan. Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan di Kabupaten Bogor dari tahun 2022 hingga 2024 menunjukkan tren penurunan yang sangat kecil, dari 40% pada tahun 2022 dan 2023. Kemudian memiliki angka proyeksi sebesar 39,83% pada tahun 2024.

c. Prevalensi Stunting Pendek dan Sangat Pendek Pada Balita

Pada tahun 2024, data persentase stunting tahun 2024 menunjukkan bahwa Kabupaten Bogor memiliki angka proyeksi yang sangat rendah, yaitu 1,49%, jauh lebih baik dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Barat 15% maupun tingkat nasional 14%. Selama tahun 2022-2024, prevalensi stunting pada anak di bawah lima tahun (balita) di Kabupaten Bogor cenderung mengalami penurunan. Grafik tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2022 prevalensi stunting tercatat sebesar 4,8%, kemudian mengalami penurunan tajam menjadi 1,59% pada tahun 2023, dan sedikit lebih rendah lagi menjadi 1,49% pada angka proyeksi tahun 2024.

d. Kualitas Konsumsi Pangan Menurut Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Selama tahun 2022-2024, kualitas konsumsi pangan menurut skor PPH di Kabupaten Bogor cenderung mengalami peningkatan. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) di Kabupaten Bogor cenderung mengalami peningkatan dari yang semula sebesar 80,6% pada tahun 2022 menjadi 90% pada angka proyeksi di tahun 2024.

e. Nilai Tambah Pertanian dibagi Jumlah Tenaga Kerja Sektor Pertanian

Pada tahun 2024, nilai tambah per pekerja di sektor pertanian Kabupaten Bogor mencapai Rp 193,000,000.00 jumlah ini merupakan angka proyeksi pada tahun 2024. Selama tahun 2022-2024, nilai tambah pertanian dibagi jumlah tenaga kerja sektor pertanian di Kabupaten Bogor cenderung mengalami penurunan. Nilai

tambah pertanian dibagi jumlah tenaga kerja sektor pertanian di Kabupaten Bogor mengalami penurunan dari yang semula sebesar 1.95% di tahun 2022 dan menjadi 1.95% pada tahun 2023 kemudian pada tahun 2024 memiliki angka proyeksi 1.93%.

3) Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera

a. Angka Kematian Balita (AKBa), Angka Kematian Neonatal (AKN), dan Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup

Selama tahun 2022-2024, Angka Kematian Balita (AKBa) mengalami penurunan, Angka Kematian Neonatal (AKN) dan Angka Kematian Bayi (AKB) cenderung fluktuatif. Angka Kematian Balita (AKBa) di Kabupaten Bogor mengalami penurunan di tahun 2023 dari yang semula sebesar 0.9 menjadi 0.49 pada angka proyeksi tahun 2024. Angka Kematian Neonatal (AKN) mengalami fluktuatif mulai dari 0.8 pada tahun 2022 dan 0.5 pada tahun 2023. Kemudian menjadi 0.53 pada angka proyeksi tahun 2024. Angka Kematian Bayi (AKB) menurun dari yang semula 0.8 menjadi 0.6 di tahun 2023 dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2024 dengan angka proyeksi 0.56.

b. Prevalensi HIV, Insiden Tuberkulosis, dan Kejadian Malaria

Jumlah kasus tuberkulosis per 100.000 penduduk di Kabupaten Bogor memiliki angka proyeksi pada tahun 2024 yaitu 24 kasus. Kemudian untuk Provinsi Jawa Barat dan Nasional belum ada update terbaru. Selama tahun 2022-2024, insiden tuberkulosis per 100000 mengalami penurunan. Kemudian penduduk prevalensi HIV dan kejadian malaria per 1000 orang pada populasi dewasa cenderung fluktuatif. Insiden tuberkulosis di Kabupaten Bogor menurun mulai dari 57 kasus pada tahun 2022 dan 32 kasus pada tahun 2023. Kemudian memiliki angka proyeksi pada tahun 2024 sebanyak 24 kasus. Adapun kejadian malaria pada tahun 2022 yaitu 12 kasus, pada tahun 2023 memiliki 29 kasus dan pada tahun 2024 memiliki angka proyeksi sebanyak 26 kasus. Sama halnya dengan prevalensi HIV mengalami fluktuatif dengan adanya penurunan angka menjadi 0.0046 di tahun 2022 yang disusul dengan peningkatan angka menjadi 0.0051 di tahun 2023 dan kemudian turun menjadi 0.0049 pada angka proyeksi tahun 2024.

c. Jumlah Penduduk yang dicakup Asuransi Kesehatan

Selama tahun 2022-2024, jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan per 1000 penduduk di Kabupaten Bogor mengalami peningkatan. jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan di Kabupaten Bogor mengalami peningkatan dari yang semula sebesar 95% di tahun 2022 menjadi 100% di tahun 2023 dan tahun 2024 pada angka proyeksi.

d. Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas

Selama tahun 2022-2024, persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas Kabupaten Bogor cenderung konstan. Persentase ketersediaan obat di Kabupaten Bogor cenderung konstan di angka 100% selama tahun 2022-2024.

4) Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas

a. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Pada tahun 2024 Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Dasar (SD) dan Angka Partisipasi Kasar SMP di Kabupaten Bogor berturut turut mencapai 97.49% dan 81.7%, masing-masing di bawah rata-rata Jawa Barat sebesar 104.5% dan 94.6% serta rata rata nasional sebesar 106.% pada Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Dasar (SD). Selama tahun 2022-2024, persentase APK SD cenderung fluktuatif, sementara persentase APK SMP mengalami peningkatan. Persentase APK SD mengalami penurunan pada tahun 2022 dari yang semula 97.48% menjadi 94.56%, sementara tahun 2023 terjadi peningkatan angka menjadi 97.5%. Sementara itu, persentase APK SMP terus mengalami peningkatan selama tahun 2021-2023 dari sebesar 93.16% menjadi 93.18%.

b. Rasio APM SD dan Rasio APK SMP

Rasio Angka Partisipasi Murni SD dan SMP kabupaten Bogor pada tahun 2023 berturut-turut memiliki 89.35% dan 92.07%. masing-masing lebih rendah dari rata-rata Jawa Barat sebesar 98.20% dan 83.61%, dan rata-rata nasional sebesar 97.89% dan 81.35%. Dengan demikian ,rasio APM SD dan SMP Kabupaten Bogor belum cukup untuk melampaui rata-rata Jawa Barat dan nasional. Selama tahun 2021-2023, Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SD; SMP; SMA/K; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi mengalami peningkatan. Pada tahun 2022, rasio tersebut tercatat sebesar 89,35%, meningkat menjadi 89,58% pada tahun 2023, dan naik lagi menjadi 89,90% pada angka proyeksi tahun 2024.

c. Angka Melek Aksara

Persentase angka melek aksara tahun 2024 menunjukkan bahwa Kabupaten Bogor memiliki tingkat melek aksara sebesar 99,24%. Angka ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional 96,53% namun sedikit lebih rendah dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Barat 99,97%. Selama tahun 2022-2024, persentase angka melek aksara pada penduduk umur > 15 tahun di Kabupaten Bogor cenderung fluktuatif. Pada tahun 2022 angka melek aksara tercatat 98,56%, meningkat cukup besar menjadi 99,61% di tahun 2023, namun sedikit turun menjadi 99,24% pada tahun 2024.

5) Tujuan 5 Kesetaraan Gender

a. Kebijakan Responsif Gender dan Prevalensi Kekerasan terhadap Anak Perempuan

Selama tahun 2022-2024, jumlah kebijakan responsif gender yang mendukung pemberdayaan perempuan dan prevalensi kekerasan anak perempuan di Kabupaten Bogor cenderung fluktuatif. Jumlah kebijakan responsif gender yang mendukung pemberdayaan perempuan di Kabupaten Bogor menurun pada tahun 2022 dari yang semula sebesar 30% menjadi 32% pada tahun 2023. Kemudian turun menjadi 31% pada angka proyeksi tahun 2024. Prevalensi kekerasan anak perempuan juga mengalami fluktuatif dari yang semula sebanyak 198 pada tahun 2022 menjadi 205 di tahun 2023 dan 204 pada angka proyeksi di tahun 2024.

b. Proporsi Kursi Perempuan di Parlemen dan Legislatif

Pada tahun 2024, proporsi perempuan di parlemen (tingkat pusat dan daerah) Kabupaten Bogor sebesar 12% pada angka proyeksi. Namun, pada Provinsi Jawa Barat dan Nasional belum ada update terbaru. Selama tahun 2021-2023, proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen (tingkat pusat dan daerah) mengalami penurunan, sementara di tingkat legislatif cenderung konstan. Terjadi penurunan angka proporsi kursi perempuan di parlemen dari yang semula sebesar 15% di tahun 2021 menjadi 12% di tahun 2022 dan 2023. Sementara itu, proporsi kursi perempuan di legislatif cenderung konstan di angka 49% selama tahun 2021-2022.

6) Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak

a. Rumah Tangga dengan Akses Layanan Sumber Air Minum Layak

Persentase rumah tangga dengan sumber air minum layak di Kabupaten Bogor sebesar 76,57% pada tahun 2024 menunjukkan bahwa sekitar tiga perempat rumah tangga di wilayah ini memiliki akses ke air minum yang memenuhi standar kelayakan. Namun, angka ini masih jauh di bawah rata-rata Provinsi Jawa Barat 93,86% dan nasional 92,64%. Oleh karena itu, persentase rumah tangga dengan akses terhadap layanan sumber air minum layak di Kabupaten Bogor masih belum cukup baik untuk melampaui capaian masing-masing di Jawa Barat dan nasional. Selama tahun 2022-2024, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak di Kabupaten Bogor mengalami peningkatan. Persentase rumah tangga dengan sumber air minum layak di Kabupaten Bogor menunjukkan tren peningkatan yang stabil dari tahun 2022 hingga 2024. Pada tahun 2022, persentasenya tercatat sebesar 74,25%, kemudian meningkat menjadi 75,55% pada tahun 2023, dan mencapai 76,57% pada tahun 2024.

b. Rumah Tangga dengan Akses Layanan Sanitasi Layak

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak pada tahun 2024 adalah 71.49%, di bawah rata-rata Jawa Barat sebesar 74.88% dan rata-rata nasional sebesar 83.6%. Dengan demikian, persentase rumah tangga dengan sanitasi layak di Kabupaten Bogor masih belum cukup baik untuk melampaui capaian masing-masing di Jawa Barat dan nasional. Selama tahun 2022-2024, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak di Kabupaten Bogor mengalami fluktuatif. Persentase rumah tangga dengan sanitasi layak di Kabupaten Bogor menunjukkan fluktuasi yang relatif stabil antara tahun 2022 hingga 2024. Pada tahun 2022, persentasenya tercatat sebesar 71,61%, yang sedikit meningkat menjadi 71,93% pada tahun 2023, namun menurun sedikit menjadi 71,49% pada tahun 2024.

c. Desa/Kelurahan yang Melaksanakan STBM

Jumlah desa dan kelurahan yang menerapkan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) pada tahun 2023 adalah 98%. Ini lebih tinggi dari rata-rata Jawa Barat sebesar 91,56% dan rata-rata nasional sebesar 80,92%. Oleh karena itu, jumlah desa dan kelurahan yang menerapkan STBM di Kabupaten Bogor lebih baik dibandingkan dengan rata-rata masing-masing wilayah tersebut. Selama tahun 2022-2024, jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM di Kabupaten Bogor cenderung konstan. jumlah desa yang melaksanakan STBM di Kabupaten Bogor cenderung konstan, sebanyak 435 desa selama tahun 2022-2024.

Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Kabupaten Bogor memiliki angka sebesar 98,00 persen. Angka ini sudah berada di atas capaian rata-rata provinsi dan nasional, dimana capaian rata-rata Jawa Barat memiliki angka sebesar 84,70 persen dan rata-rata capaian nasional sebesar 77,30 persen.

d. Rumah Tangga dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat

Selama tahun 2022-2024, proporsi rumah tangga dengan sistem pengelolaan air limbah terpusat di Kabupaten Bogor cenderung meningkat. Proporsi rumah tangga dengan sistem pengelolaan air limbah terpusat di Kabupaten Bogor menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dalam tiga tahun terakhir, dengan persentase mencapai 71,61% pada 2022, 71,93% pada 2023, dan 72,05% angka proyeksi pada tahun 2024.

7) Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau

Dalam implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable

Development Goals (SDG's) yang berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017, tidak semua Tujuan/Goals, Target, ataupun indikator dapat diterapkan di seluruh daerah di Indonesia. Terdapat beberapa hal yang menjadi penyebab Tujuan, Target, dan Indikator tidak dapat diterapkan di semua daerah: (1) Indikator tersebut bukan merupakan kewenangan dari daerah yang bersangkutan, (2) Tidak sesuai dengan karakteristik dan kondisi geografis daerah tersebut, dan (3) Cakupan penghitungan indikator tidak dapat diterapkan pada daerah otonom terendah. Terkait dengan hal tersebut, maka tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau tidak dapat diterapkan di Kabupaten Bogor.

8) Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

a. Laju Pertumbuhan PDRB per Kapita (ADHK)

Laju pertumbuhan PDRB per kapita Kabupaten Bogor pada tahun 2024 sebesar 5,01% pada angka proyeksi. Kemudian untuk provinsi Jawa Barat dan Nasional belum ada update terbaru. Selama tahun 2022-2024, laju pertumbuhan PDRB per kapita di Kabupaten Bogor di Kabupaten Bogor cenderung fluktuatif. laju pertumbuhan PDRB per kapita di Kabupaten Bogor meningkat menjadi 5.25% pada tahun 2022, kemudian menurun ke angka 4.67% pada tahun 2023 dan naik kembali pada tahun 2024 dengan angka proyeksi 5.01%.

b. Proporsi Lapangan Kerja Informal Sektor Non-Pertanian

Pada tahun 2024, proporsi lapangan kerja informal di sektor non-pertanian di Kabupaten Bogor sebesar 6,12%. Kemudian untuk provinsi Jawa Barat dan Nasional belum ada update terbaru. Selama tahun 2022-2024, proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian di Kabupaten Bogor cenderung konstan. proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian di Kabupaten Bogor cenderung konstan di angka 6.12% selama tahun 2022-2024.

c. Tenaga Kerja Informal Sektor Pertanian

Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian di Kabupaten Bogor pada tahun 2024 sebesar 16%. Kemudian untuk provinsi Jawa Barat dan Nasional belum ada update terbaru. Selama tahun 2022-2024, persentase tenaga kerja informal sektor pertanian di Kabupaten Bogor cenderung konstan. Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian di Kabupaten Bogor konstan di angka 16% selama tahun 2022-2024.

d. Tingkat Pengangguran Terbuka

Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2024 menunjukkan bahwa Kabupaten Bogor memiliki angka pengangguran sebesar 7,34%, lebih tinggi

dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Barat 6,75% dan tingkat nasional 4,91%. Hal ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Bogor menghadapi tantangan yang lebih besar dalam menciptakan lapangan kerja dibandingkan banyak wilayah lain di Jawa Barat maupun secara nasional. Selama tahun 2021-2023, tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelompok umur di Kabupaten Bogor cenderung fluktuatif. Pada tahun 2022 Tingkat Pengangguran Terbuka tercatat sebesar 7,4%, kemudian menurun menjadi 7,08% pada tahun 2023, namun kembali meningkat menjadi 7,34% pada tahun 2024.

9) Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur

a. Proporsi Nilai Tambah Sektor Industri Manufaktur

Proporsi nilai tambah industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita di Kabupaten Bogor pada tahun 2023 sebesar 43%. Ini lebih tinggi dari rata-rata di Jawa Barat sebesar 42.98% dan rata-rata nasional sebesar 20.47%. Dengan demikian, proporsi nilai tambah industri manufaktur di Kabupaten Bogor masih lebih baik dibandingkan dengan rata-rata di kedua wilayah tersebut. Selama tahun 2022-2024, proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan Perkapita di Kabupaten Bogor cenderung konstan. Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur cenderung konstan di angka 43% selama tahun 2022-2024.

b. Laju Pertumbuhan PDB Industri Manufaktur

Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur di Kabupaten Bogor hanya 4% pada tahun 2023, lebih rendah dari rata-rata Jawa Barat sebesar 4,74% dan rata-rata nasional sebesar 4.64%. Dengan demikian, laju pertumbuhan industri manufaktur di Kabupaten Bogor masih belum cukup baik untuk melampaui capaian masing-masing di Jawa Barat dan nasional. Selama tahun 2021-2023, persentase laju pertumbuhan PDB industri manufaktur di Kabupaten Bogor cenderung fluktuatif. Persentase laju pertumbuhan PDB industri manufaktur di Kabupaten Bogor mengalami peningkatan di tahun 2022 menjadi 5.12%, tetapi angka ini menurun kembali ke angka 4% di tahun 2024.

10) Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan

a. Jumlah Desa Mandiri

Selama tahun 2022-2024, persentase jumlah desa mandiri di Kabupaten Bogor terus mengalami peningkatan. Jumlah desa mandiri di Kabupaten Bogor meningkat selama tahun 2022-2024 dari yang semula sebanyak 95 menjadi 160 desa.

b. Jumlah Penanganan Pengaduan Pelanggaran HAM

Pada tahun 2024, jumlah penanganan pengaduan pelanggaran HAM di Kabupaten Bogor adalah 20,32 kasus. Sementara itu, di tingkat Provinsi Jawa Barat terdapat 342 kasus penanganan pelanggaran HAM, dan di tingkat nasional terdapat 3.091 kasus. Selama tahun 2022-2024, jumlah penanganan pengaduan pelanggaran HAM di Kabupaten Bogor cenderung meningkat. Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran HAM di Kabupaten Bogor mengalami peningkatan dari yang semula sebanyak 20,23 kasus di tahun 2022 menjadi 24,27 kasus di tahun 2024.

11) Tujuan 11 Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan

a. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak dan Terjangkau

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau pada tahun 2023 adalah 22,11%. Ini lebih rendah dari rata-rata Jawa Barat sebesar 53,37% dan rata-rata nasional sebesar 60,66%. Dengan demikian, proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau di Kabupaten Bogor masih belum cukup baik untuk melampaui rata-rata kedua wilayah tersebut. Selama tahun 2022-2024, proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau di Kabupaten Bogor cenderung fluktuatif. Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau di Kabupaten Bogor meningkat di setiap tahunnya, terlihat pada jumlah tahun 2022 sebesar 2486 dan terus meningkat menjadi 4289 di tahun 2024.

b. Jumlah Kematian dan Orang yang Terdampak Bencana

Selama tahun 2022-2024, jumlah kematian dan orang yang terdampak bencana di Kabupaten Bogor cenderung fluktuatif. Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana mengalami peningkatan pada tahun 2023 menjadi 1410 jiwa, sedangkan untuk tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 1331 jiwa.

c. Rumah Tangga di Perkotaan yang Terlayani Pengelolaan Sampah

Selama tahun 2022-2024, persentase rumah tangga di perkotaan yang terlayani pengelolaan sampah di Kabupaten Bogor cenderung mengalami peningkatan. Persentase rumah tangga di perkotaan yang terlayani pengelolaan sampah di Kabupaten Bogor cenderung mengalami peningkatan dari yang semula sebesar 75.53% di tahun 2022 menjadi 83.75% di tahun 2024.

12) Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab

a. Jumlah Limbah B3 yang Terkelola

Selama tahun 2022-2024, jumlah limbah B3 yang terkelola di Kabupaten Bogor cenderung fluktuatif. Jumlah limbah B3 yang terkelola di Kabupaten Bogor fluktuatif dengan adanya peningkatan limbah di tahun 2023 sebanyak 1.277.430, lalu disusul dengan adanya penurunan di tahun 2024 menjadi 1.233.194.

b. Jumlah Timbunan Sampah yang didaur Ulang

Jumlah timbunan sampah yang didaur ulang di Kabupaten Bogor sebesar 562.000 pada tahun 2023. Jumlah timbunan sampah di Jawa Barat sebesar 2.463.135.55 dan nasional sebesar 20.997.082.67. Selama tahun 2022-2024, jumlah timbunan sampah yang didaur ulang di Kabupaten Bogor cenderung meningkat. Jumlah timbunan sampah yang didaur ulang di Kabupaten Bogor terus mengalami peningkatan selama tahun 2022-2024 dari yang semula sebanyak 187.9 menjadi 197.14.

c. Jumlah Fasilitas Publik yang Menerapkan SPM

Selama tahun 2022-2024, jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) di Kabupaten Bogor cenderung meningkat. Jumlah fasilitas publik yang menerapkan SPM di Kabupaten Bogor mengalami peningkatan selama tahun 2022-2024 dari yang semula sebesar 88% menjadi 92%.

13) Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim

Dalam implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDG's) yang berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017, tidak semua Tujuan/Goals, Target, ataupun indikator dapat diterapkan di seluruh daerah di Indonesia. Terdapat beberapa hal yang menjadi penyebab Tujuan, Target, dan Indikator tidak dapat diterapkan di semua daerah: (1) Indikator tersebut bukan merupakan kewenangan dari daerah yang bersangkutan, (2) Tidak sesuai dengan karakteristik dan kondisi geografis daerah tersebut, dan (3) Cakupan penghitungan indikator tidak dapat diterapkan pada daerah otonom terendah. Terkait dengan hal tersebut, maka tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim tidak dapat diterapkan di Kabupaten Bogor, mengingat karakteristik geografis yang tidak sesuai dengan Kabupaten Bogor.

14) Tujuan 14 Ekosistem Laut

Dalam implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDG's) yang berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017, tidak semua Tujuan/Goals, Target, ataupun indikator dapat

diterapkan di seluruh daerah di Indonesia. Terdapat beberapa hal yang menjadi penyebab Tujuan, Target, dan Indikator tidak dapat diterapkan di semua daerah: (1) Indikator tersebut bukan merupakan kewenangan dari daerah yang bersangkutan, (2) Tidak sesuai dengan karakteristik dan kondisi geografis daerah tersebut, dan (3) Cakupan penghitungan indikator tidak dapat diterapkan pada daerah otonom terendah. Terkait dengan hal tersebut, maka tujuan 14 Ekosistem Laut tidak dapat diterapkan di Kabupaten Bogor, mengingat Kabupaten Bogor tidak memiliki kelautan.

15) Tujuan 15 Ekosistem Darat

a. Proporsi Tutupan Hutan Terhadap Luas Lahan

Selama tahun 2022-2024, proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan di Kabupaten Bogor cenderung fluktuatif. Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan di Kabupaten Bogor fluktuatif dengan adanya penurunan angka di tahun 2023 menjadi 44.15 dan disusul oleh peningkatan angka menjadi 44.52 di tahun 2024.

16) Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh

a. Jumlah Masyarakat Miskin yang Memperoleh Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi

Selama tahun 2022-2024, jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi di Kabupaten Bogor cenderung konstan. Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi di Kabupaten Bogor di angka 21 di tahun 2022 dan meingkat menjadi 114 di tahun 2024.

b. Instansi Pemerintah Dengan SAKIP > B

Selama tahun 2022-2024, persentase instansi pemerintah dengan SAKIP > B di Kabupaten Bogor cenderung konstan. Persentase instansi pemerintah dengan SAKIP > B di Kabupaten Bogor cenderung menurun di angka 44.52% di tahun 2024.

c. Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran

Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada usia 0-17 tahun di Kabupaten Bogor pada tahun 2023 sebesar 99,69%. Ini lebih tinggi dari rata-rata Jawa Barat sebesar 88,44% dan rata-rata nasional sebesar 90,41%. Dengan demikian, persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Bogor lebih baik daripada rata-rata masing-masing. Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Bogor menurun dari yang semula sebesar 92.66% di tahun 2022 menjadi 91.28% di tahun 2023.

17) Tujuan 17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

a. Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB

Selama tahun 2022-2024, total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya di Kabupaten Bogor cenderung fluktuatif. Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya di Kabupaten Bogor fluktuatif dengan adanya penurunan angka menjadi 0,87 di tahun 2023, disusul dengan peningkatan angka menjadi 0,98 di tahun 2024.

b. Rasio Penerimaan Pajak terhadap PDB

Rasio penerimaan pajak terhadap PDB Kabupaten Bogor pada tahun 2022 adalah 63.02 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 10.4 persen. Oleh karena itu, rasio ini lebih baik dari rata-rata nasional. Selama tahun 2022-2024, rasio penerimaan pajak terhadap PDB di Kabupaten Bogor cenderung fluktuatif. Rasio penerimaan pajak terhadap PDB di Kabupaten Bogor cenderung meningkat, dimana semula pada tahun 2022 sebesar 41.38% menjadi 43.15% pada tahun 2024.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Kerangka Ekonomi Daerah

Kondisi ekonomi Kabupaten Bogor tidak terlepas dari kondisi ekonomi nasional dan Jawa Barat. Kebijakan-kebijakan ekonomi nasional secara umum dapat mempengaruhi kondisi ekonomi Kabupaten Bogor, termasuk Jawa Barat. Di sisi lain, kebijakan yang diberlakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, juga dapat mempengaruhi kondisi ekonomi Kabupaten Bogor.

Pemerintah pusat telah menetapkan 6 (enam) indikator ekonomi makro yang menjadi fokus indikator ekonomi daerah. Indikator-indikator makro daerah tersebut merepresentasikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu:

- (1) Indeks Pembangunan Manusia (IPM);
- (2) Angka Kemiskinan;
- (3) Angka Pengangguran;
- (4) Pertumbuhan Ekonomi;
- (5) Pendapatan Perkapita, dan
- (6) Ketimpangan Pendapatan yang direpresentasikan oleh Gini Rasio.

Memedomani target kinerja makro nasional, Jawa Barat dan Kabupaten Bogor, proyeksi capaian kinerja tersebut disajikan pada Tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Proyeksi Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Bogor
disandingkan dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2025
dalam Perubahan RKPD tahun 2025

No	Indikator	Satuan	Nasional	Provinsi Jawa Barat	Kabupaten Bogor
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	0,56	0,57	74,02
2	Laju pertumbuhan ekonomi (LPE)	%	5,3	4,96-5,37	5,15-5,81
3	Pengangguran	%	4,50-5,00	5,94-6,56	7,41-8,07
4	Kemiskinan	%	7,0-8,0	5,85-6,46	6,39-7,05
5	Gini Rasio	poin	0,379-0,382	0,383-0,390	0,364-0,371
6	Pendapatan perkapita	Rp Juta		59,6	55,31 - 55,67

Sumber: Data BPS, diolah

Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2025, ditetapkan misi nasional yang disebut dengan Asta Cita sebagai berikut:

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan

industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;

4. Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Provinsi Jawa Barat tahun 2025-2029 memiliki visi **“Jabar Istimewa : Lembur Diurus, Kota Ditata”**. Dalam mencapai visi tersebut, Provinsi Jawa Barat menetapkan misi sebagai berikut:

1. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, cerdas, berpengetahuan, bertakwa, dan profesional pada bidang tugasnya masing-masing;
2. Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis sumber daya lokal, berdaulat, berkelanjutan, berbasis sains, dan teknologi dengan memanfaatkan ragam teknologi masa kini;
3. Mengurangi disparitas pembangunan utara selatan, dan mendorong masuknya investasi serta pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, perekonomian dan lingkungan hidup yang proporsional;
4. Memperkuat transformasi birokrasi yang berorientasi terhadap pelayanan publik yang bermartabat, efektif, efisien, dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih, dan *clear governance*;

Target makro ekonomi Kabupaten Bogor Tahun 2025 diharapkan dapat dicapai di akhir tahun 2025. Optimisme ini dibangun atas

beberapa kondisi perekonomian daerah Kabupaten Bogor yang mengindikasikan beberapa hal positif, yaitu:

1. Aktivitas ekonomi masyarakat yang sudah berada pada tingkat normal setelah berakhirnya pandemi;
2. Semakin banyaknya Angkatan kerja yang terserap oleh berbagai sektor ekonomi; dan
3. Mulai optimalnya kembali pelayanan publik.

Disamping itu, capaian makro ekonomi Kabupaten Bogor tahun 2024 menunjukkan hal yang secara umum positif, diantaranya:

1. Capaian IPM Kabupaten Bogor dari tahun 2023 ke tahun 2024 mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bogor Tahun 2023-2024 dan target Tahun 2025

Indikator	Capaian		Target	Keterangan
	2023	2024	2025	
IPM (Poin)	73,02	73,63	74,02	IPM ditargetkan meningkat 0,39 poin pada akhir tahun 2025

Sumber : Hasil Analisa Bappedalitbang Kabupaten Bogor

- Peningkatan capaian IPM Kabupaten Bogor tahun 2023 terhadap tahun 2024 sebesar 0,61 poin. Adapun untuk tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Bogor optimis untuk dapat menaikkan capaian IPM sebesar 0,39 poin dari capaian tahun 2024. Dengan demikian perlu upaya yang signifikan dalam menstimulasi faktor-faktor pembentuk IPM, yaitu kesehatan, pendidikan, dan daya beli.
2. Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun 2023. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 3.3 sebagai berikut

Tabel 3.3
Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Bogor
Tahun 2023-2024 dan Target Tahun 2025

Indikator	Capaian		Target	Keterangan
	2023	2024	2025	
LPE (%)	5,19	5,21	5,15 - 5,81	Peningkatan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 sebesar 0,02 persen.

Sumber: Hasil Analisa Bappedalitbang Kabupaten Bogor

Ekonomi Kabupaten Bogor tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 0,02 persen dari tahun 2023. Hal ini memperlihatkan bahwa perekonomian di Kabupaten Bogor mengalami perkembangan yang positif. Namun pada tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Bogor optimis dapat meningkatkan kembali pertumbuhan ekonomi dengan kisaran 5,15 hingga 5,81 persen.

3. Tingkat pengangguran di Kabupaten Bogor pasca pandemi mengalami penurunan akibat mulai normalnya aktivitas ekonomi. Kondisi tahun 2023 dan 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.4 sebagai berikut:

Tabel 3.4
Kondisi Tingkat Pengangguran Kabupaten Bogor
Tahun 2023-2024 dan Target Tahun 2025

Indikator	Capaian		Target	Keterangan
	2023	2024	2025	
Pengangguran (%)	8,47	7,34	7,17- 7,79	Penurunan tingkat pengangguran tahun 2024 sebesar 0,87 persen.

Sumber: Hasil Analisa Bappedalitbang Kabupaten Bogor

Aktivitas perekonomian yang terus bergerak positif mendukung penurunan tingkat pengangguran terbuka. Selain pemulihan ekonomi, peningkatan lapangan kerja sektor formal ikut mendukung menurunnya tingkat pengangguran terbuka. Dengan aktivitas perekonomian dan peningkatan lapangan kerja di Kabupaten Bogor, tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2025 ditargetkan dengan kisaran 7,17 hingga 7,79 persen.

4. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Bogor juga mengalami penurunan pada tahun 2023. Kondisi tingkat kemiskinan tahun 2023-2024 disajikan pada Tabel 3.5 sebagai berikut:

Tabel 3.5
Kondisi Tingkat Kemiskinan Kabupaten Bogor
Tahun 2023-2024 dan Target Tahun 2025

Indikator	Capaian		Target	Keterangan
	2023	2024	2025	
Kemiskinan (%)	7,27	7,05	6,39 - 7,05	Penurunan tingkat kemiskinan pada tahun 2024 sebesar 0,22 persen

Sumber: Hasil Analisa Bappedalitbang Kabupaten Bogor

Tingkat kemiskinan tahun 2024 berhasil turun sebesar 0,22 persen dibanding tahun 2023. Penurunan tingkat kemiskinan pada tahun 2024 didukung oleh program penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi dan komprehensif, melibatkan berbagai sektor dan pemangku kepentingan. Seiring dengan menurunnya tingkat pengangguran dan peningkatan laju pertumbuhan ekonomi yang membaik, tingkat kemiskinan pun diharapkan dapat diturunkan lagi pada akhir tahun 2025 dengan kisaran 6,39 hingga 7,05 persen.

5. Pendapatan perkapita tahun 2023-2024 mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan kondisi optimis masyarakat dalam mengakses sumber ekonomi. Capaian pendapatan perkapita tahun 2023-2024 dapat dilihat pada Tabel 3.6 sebagai berikut:

Tabel 3.6
Kondisi Pendapatan Perkapita Kabupaten Bogor
Tahun 2023-2024 dan Target Tahun 2025

Indikator	Capaian		Target	Keterangan
	2023	2024	2025	
Pendapatan Perkapita (juta Rupiah)	51,37	54,86	55,31- 55,67	Peningkatan pendapatan per kapita tahun 2024 sebesar 3,49 juta Rupiah

Sumber: Hasil Analisa Bappedalitbang Kabupaten Bogor

Pendapatan perkapita mengalami peningkatan sebesar 3,49 juta Rupiah pada tahun 2024 jika dibandingkan dengan tahun 2023. peningkatan pendapatan per kapita berbanding lurus dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat. Kombinasi dari pertumbuhan ekonomi, kebijakan fiskal yang mendukung, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan investasi dalam infrastruktur ikut berkontribusi pada peningkatan pendapatan per kapita di Kabupaten Bogor pada tahun 2024. Berdasarkan kondisi ini, pendapatan per kapita Kabupaten Bogor pada tahun 2025 ditargetkan Kembali meningkat pada kisaran 55,31 hingga 55,67 juta rupiah.

6. Gini rasio Kabupaten Bogor menunjukkan ketimpangan pendapatan masyarakat. Kondisi tahun 2023-2024 dapat dilihat pada Tabel 3.7 sebagai berikut:

Tabel 3.7
Gini Rasio Kabupaten Bogor
Tahun 2023-2024 dan Target Tahun 2025

Indikator	Capaian		Target	Keterangan
	2023	2024	2025	
Gini Rasio (poin)	0,369	0,398	0,364-0,371	Ketimpangan pendapatan mengalami peningkatan sebesar 0,029 poin pada 2024

Sumber: Hasil Analisa Bappedalitbang Kabupaten Bogor

Ketimpangan pendapatan masyarakat tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023. Hal ini salah satunya dipicu oleh tidak meratanya pertumbuhan ekonomi di setiap sektornya. Untuk menurunkan ketimpangan pendapatan diperlukan kebijakan dalam pemberdayaan masyarakat serta penguatan infrastruktur dan aksesibilitas untuk membuka peluang ekonomi. Dengan kebijakan tersebut rasio gini Kabupaten Bogor tahun 2025 ditargetkan mengalami penurunan pada kisaran 0,364- 0,371 poin.

Berdasarkan kondisi yang telah diuraikan, perubahan target kinerja makro ekonomi Kabupaten Bogor tahun 2025 disajikan pada tabel 3.8 sebagai berikut:

Tabel 3.8
Perubahan Proyeksi Indikator Makro Pembangunan
Kabupaten Bogor Tahun 2025

NO	Indikator	Satuan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,81	5,15 - 5,81
2	Pendapatan perkapita	Rp Juta	57,28	55,31 - 55,67
3	IPM	Poin	74,11	74,02
4	Kemiskinan	%	7,04	6,39 - 7,05
5	Pengangguran	%	8,07	7,17-7,79
6	Gini Rasio	Poin	0,348	0,364 - 0,371

Sumber: Hasil Analisa Bappedalitbang dan BPS Kabupaten Bogor, diolah

1. Pendapatan Per kapita
- Memperhatikan realisasi pendapatan per kapita pada tahun 2024 sebesar 54,86 juta rupiah, maka ditetapkan target pendapatan per kapita pada tahun 2025 dengan kisaran 55,31-55,67 juta rupiah.
2. IPM
- Target IPM pada RKPD Kabupaten Bogor pada tahun 2025 ditetapkan sebesar 74,11 poin. Memperhatikan bahwa realisasi IPM pada 2025 mencapai 73,63 poin dari target sebesar 73,64 poin, maka IPM Kabupaten Bogor pada perubahan RKPD 2025 ditetapkan ulang menjadi 74,02 poin.
3. Pengangguran
- Berdasarkan kondisi perekonomian yang semakin membaik dan kembali normal, tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Bogor cenderung mengalami penurunan hingga tahun 2024 mencapai 7,34 persen. Memperhatikan capaian pada tahun 2024, maka dilakukan perhitungan dan penetapan ulang target tingkat pengangguran terbuka pada perubahan RKPD 2025 berada di kisaran 7,17-7,79 persen.

4. Rasio Gini

Ketimpangan pendapatan di Kabupaten Bogor yang tercermin dari angka rasio gini disebabkan tidak meratanya pertumbuhan ekonomi di setiap sektornya. Tidak meratanya pendapatan masyarakat terlihat pada rasio gini tahun 2024 yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Memperhatikan capaian pada tahun 2024, maka perlu dilakukan perhitungan dan penetapan ulang target rasio gini pada perubahan RKPD 2025 berada pada kisaran 0,364 - 0,371 poin.

Tahun 2025 merupakan tahun pertama dalam RPJMD Tahun 2025-2029 atau periodisasi kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Kabupaten Bogor memiliki visi **“Kabupaten Bogor Istimewa dan Gemilang”**. Dalam rangka pencapaian visi dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Baik;
2. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Maju;
3. Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Berkeadilan;
4. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas;
5. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.

Kebijakan ekonomi Kabupaten Bogor disusun demi pencapaian visi dan misi Daerah. Dalam mendukung program kerja Bupati dan Wakil Bupati terpilih, Pemerintah Kabupaten Bogor menetapkan arah kebijakan daerah, yaitu:

1. Misi: Mewujudkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Baik:
 - Peningkatan Jaringan Intra Pemerintah (JIP) dan layanan internet publik
 - Memperluas Jaringan dengan Penyediaan Layanan digital bagi seluruh wilayah Kabupaten Bogor dengan mengatasi blank

spot/lemah sinyal di wilayah Kabupaten Bogor melalui koordinasi dengan pihak swasta

- Penguatan sistem layanan terintegrasi untuk layanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik
- Peningkatan kesiapsiagaan dalam menangani aduan masyarakat
- Pengembangan data digital desa
- Sekolah Pemerintahan Desa

2. Misi: Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Maju

- Pembangunan Jalan Bojonggede-Kemang
- Pembangunan Drainase Lingkungan di Kabupaten Bogor
- Uji Coba Pengembangan Angkutan Umum Massal Koridor 2 Dengan Skema *Buy The Service* (BTS) Mandiri dengan Pihak Swasta
- Pembangunan SPAM
- Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Limbah Domestik
- Penanganan Rumah Tidak Layak Huni
- Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Operasi Pasar dalam rangka pengendalian Inflasi
- Pengadaan Cadangan Pangan Beras, Minyak dan Telur
- Pembentukan Koperasi Merah Putih
- Kemitraan antara UMKM dengan toko modern
- Penyediaan dan pendistribusian benih ikan
- Pengadaan dan pendistribusian sarana dan prasarana produksi perikanan ke masyarakat di kawasan minapolitan
- Penebaran benih ikan di Perairan Umum Daratan
- Peningkatan Kapasitas Nelayan Menjadi Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)
- Pemberian bantuan pupuk dan pestisida untuk produksi benih padi, pemberian bantuan alat mesin pertanian untuk fasilitasi penangkaran benih padi, pemberian bantuan benih padi untuk memfasilitasi penangkaran benih, penyediaan bantuan irigasi perpipaan, pembangunan gudang untuk memfasilitasi penyimpanan benih padi, dan optimalisasi produksi benih padi

- Penyiapan informasi investasi
 - Revalidasi Geopark Bogor Halimun Salak
 - Evaluasi penilaian kinerja BUMD
 - Memperkuat kelembagaan BUMDes
3. Misi: Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Berkeadilan
- Penanganan sampah di tingkat desa dan kawasan
 - Revitalisasi TPA Galuga
 - Pembangunan Ruang Terbuka Publik
 - Penguatan kesiapsiagaan bencana
4. Misi: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas
- Pemberian bantuan biaya sekolah siswa miskin yang tidak dapat bersekolah di SMP Negeri
 - Pemberian bantuan biaya pendidikan kesetaraan
 - Pemberian beasiswa untuk guru, serta insentif untuk guru honor
 - Pemberian dukungan sekolah rakyat
 - Pemenuhan kebutuhan Ruang Kelas Layak Belajar pada SD dan SMP Negeri
 - Peningkatan dukungan terhadap sekolah madrasah, sekolah terbuka, pesantren, pengembangan sekolah berbasis asrama dan lembaga pendidikan keagamaan lainnya
 - Peningkatan *Universal Health Coverage (UHC)*
 - Penyediaan pelayanan dan penunjang pelayanan
 - Peningkatan mutu sistem Triase melalui penyediaan tenaga kesehatan terlatih dalam triase
 - Penambahan alat-alat medis, seperti ventilator, defibrillator, dan alat monitoring pasien
 - Penambahan tempat tidur IGD
 - Pembangunan Masjid Agung Kabupaten Bogor
5. Misi: Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
- Pemutakhiran data fakir miskin

- Operasional Wisma Istimewa di BKS Citereup untuk permakanaan, sandang dan antar jemput klien
- Pemberian alat bantu untuk disabilitas
- Pemenuhan kebutuhan dasar, pengembangan mata pencaharian, dan pendampingan intensif masyarakat miskin dan rentan miskin

3.2 Kebijakan Keuangan Daerah

Penyusunan perubahan RKPD Tahun 2025 dilakukan untuk mengakomodir perubahan penjabaran APBD kesatu dan kedua yang terjadi sebelumnya sebagai konsekuensi dari penganggaran kegiatan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, juga untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang baru dilantik pada tanggal 20 Februari tahun 2025 setelah penetapan APBD Tahun 2025, sekaligus sebagai pelaksanaan tahun pertama RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029.

3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Proyeksi kemampuan keuangan daerah dalam perubahan RKPD Tahun 2025 disajikan dalam Tabel 3.9.

Tabel 3.9
Proyeksi Keuangan Daerah dalam Perubahan RKPD Tahun 2025

URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	5.145.530.165.866	5.064.164.392.880	-81.365.772.986
Pajak Daerah	3.817.688.382.057	3.736.322.609.071	-81.365.772.986
Retribusi Daerah	1.114.144.878.174	1.114.295.244.174	150.366.000
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	81.939.611.038	81.939.611.038	0
Lain-lain PAD yang Sah	131.757.294.597	131.606.928.597	-150.366.000
Pendapatan Transfer	5.695.539.650.625	6.243.982.050.233	548.442.399.608
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	5.062.138.343.000	5.606.044.235.272	543.905.892.272
Pendapatan Transfer Antar Daerah	633.401.307.625	637.937.814.961	4.536.507.336
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	11.020.973.546	17.680.301.421	6.659.327.875
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	11.020.973.546	17.680.301.421	6.659.327.875
PENDAPATAN DAERAH	10.852.090.790.037	11.325.826.744.534	473.735.954.497
Belanja Operasi	7.996.657.108.791	8.595.255.789.455	598.598.680.664
Belanja Modal	1.559.839.337.645	1.893.686.628.924	333.847.291.279

URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
Belanja Tidak Terduga	100.633.181.707	73.983.181.707	-26.650.000.000
Belanja Transfer	1.787.211.151.879	1.731.606.251.929	-55.604.899.950
BELANJA DAERAH	11.444.340.780.022	12.294.531.852.015	850.191.071.993
SURPLUS/DEFISIT	-592.249.989.985	-968.705.107.481	-376.455.117.496
Penerimaan Pembiayaan	681.417.989.985	333.774.597.168	-347.643.392.817
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	681.417.989.985	333.774.597.168	-347.643.392.817
Pengeluaran Pembiayaan	89.168.000.000	89.168.000.000	0
Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	89.168.000.000	89.168.000.000	0
PEMBIAYAAN DAERAH	592.249.989.985	244.606.597.168	-347.643.392.817
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	-724.098.510.313	-724.098.510.313

Sumber : SIPD-RI, 2025

Pendapatan Daerah pada Perubahan RKPD tahun 2025 secara umum mengalami peningkatan dibanding sebelum perubahan. Peningkatan ini disumbang oleh meningkatnya Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Namun demikian, dengan adanya ketentuan mengenai tarif Opsen PKB, Opsen BBNKB, Pajak MBLB dan Opsen MBLB berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan, target pendapatan dari PAD menurun.

Berkaitan dengan kebijakan belanja, khususnya dalam mendukung program prioritas pusat Asta Cita dan program daerah yang merupakan penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati, dilakukan pemetaan ulang program prioritas pada semua urusan, melalui tahapan sebagai berikut:

1. Melakukan efisiensi belanja-belanja yang tidak berdampak langsung kepada masyarakat, termasuk di dalamnya belanja perjalanan dinas, kegiatan seremonial, seminar/*focus group discussion (FGD)*, hibah kepada Kementerian/Lembaga, serta belanja-belanja yang bersifat pendukung yang tidak memiliki output yang terukur;

2. Melakukan realokasi anggaran terhadap program-program prioritas, baik yang mendukung pemerintah pusat, maupun visi misi Kabupaten Bogor;
3. Mengalokasikan anggaran kegiatan yang bersumber dari dana transfer yang meliputi DAK Fisik dan Non Fisik, Dana Bagi Hasil, dan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat;
4. Melakukan verifikasi terhadap rincian belanja pada setiap perangkat daerah sehingga penganggaran menjadi lebih efektif dan efisien.

Dengan demikian, diharapkan perubahan kebijakan belanja daerah, tidak akan menimbulkan defisit, tapi justru meningkatkan efektivitas penganggaran.

Kebijakan Pembiayaan Daerah disusun dengan melakukan penyesuaian Penerimaan Pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2024. Di samping itu, rencana Pengeluaran Pembiayaan dalam bentuk Penyertaan Modal Daerah pada BUMD tetap dialokasikan dalam rangka menunjang pencapaian kinerja Pemerintah Daerah.

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Perencanaan tahun 2025 yang tercantum dalam RKPD Tahun 2025 disusun pada tahun 2024 sebelum dilantiknya presiden dan wakil presiden periode tahun 2025-2029, serta bupati dan wakil bupati periode tahun 2025-2030. Ketika RKPD Kabupaten Bogor Tahun 2025 disusun, masih mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 yang belum memiliki visi dan misi pemerintah daerah. Dengan demikian, ketika telah dilantik presiden dan wakil presiden, serta bupati dan wakil bupati, maka tahun 2025 merupakan tahun awal berlakunya RPJMN Tahun 2025-2029 dan RPJMD Tahun 2025-2029 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan prioritas pembangunan.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, pemerintah telah memastikan beberapa hal yang harus termuat dalam Perubahan RKPD Tahun 2025, yaitu:

1. adanya penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih;
2. mengakomodir Asta Cita ke dalam dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025;
3. memastikan perubahan kebijakan pembangunan daerah diarahkan untuk mendukung prioritas nasional, antara lain:
 - a. penguatan sumberdaya manusia, pendidikan dan kesehatan;
 - b. program makan begizi gratis (MBG);
 - c. pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrim;
 - d. pengendalian inflasi di daerah;
 - e. peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah;
 - f. dukungan swasembada pangan;
 - g. pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Dengan demikian, urgensi perubahan RKPD Tahun 2025 adalah memastikan bahwa seluruh program prioritas nasional dan visi misi kepala daerah dapat terlaksana di tahun 2025 melalui penyesuaian kebijakan daerah.

Salah satu kebijakan nasional yang menjadi bagian penting dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 adalah tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang secara prinsip berisi efisiensi terhadap belanja daerah untuk direalokasikan kepada upaya pencapaian 8 (delapan) misi atau Asta Cita, 17 (tujuh belas) program prioritas, dan mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8%, pada bidang:

- pendidikan
- kesehatan
- infrastruktur dan sanitasi
- optimalisasi penanganan pengendalian inflasi
- stabilitas harga makanan dan minuman
- penyediaan cadangan pangan, dan
- prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pencapaian lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan ketentuan umum Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, **sasaran** pembangunan daerah didefinisikan sebagai rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/ perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Sasaran juga merupakan penjabaran/bentuk implementasi dari tujuan, dimana **tujuan** didefinisikan sebagai suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.

RKPD Tahun 2025 belum memuat visi dan misi daerah. Mengacu pada substansi Rencana Pembangunan Daerah tahun 2024-2026, substansi utama tahun 2025 mengacu pada tujuan dan sasaran daerah sebagaimana diuraikan dalam Tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Daerah Tahun 2024-2026

TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA 2025
1.1	Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas			1	IPM	Poin	74,11
		1.1.1	Meningkatnya pelayanan pendidikan	a.	Indeks Pendidikan	Poin	63,42
		1.1.2	Meningkatnya pelayanan kesehatan	a.	Indeks Kesehatan	Poin	85,14
		1.1.3	Meningkatnya ketahanan pangan	a.	Indeks Ketahanan Pangan	Poin	69,08
		1.1.4	Meningkatnya pelayanan ketenteraman dan ketertiban masyarakat	a.	Penurunan Gangguan Trantibum	%	90
		1.1.5	Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan	a.	Cakupan Layanan Adminduk	%	84,94
		1.1.6	Meningkatnya pelayanan infrastruktur publik	a.	Indeks Konektivitas Infrastruktur	poin	1,72
				b.	Persentase Kawasan Permukiman Layak	%	99,59
		1.1.7	Meningkatnya aksesibilitas ekonomi masyarakat	a.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	5,81
		1.1.8	Meningkatnya pelayanan sosial kepada masyarakat	a.	Angka Kemiskinan	%	7,04
1.2	Terwujudnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik			1	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Poin	82,84
		1.2.1	Meningkatnya profesionalitas ASN	a.	Indeks Profesionalitas ASN	Poin	73

TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA 2025
		1.2.2	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	a.	Nilai SAKIP	Poin	70,15
				b.	Opini BPK	Predikat	WTP
				c.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Poin	3,77
				d.	Indeks Desa Membangun (IDM)	Poin	0,8005
		1.2.3	Meningkatnya pelayanan kewenangan daerah	a.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	85,35
1.3	Terwujudnya Kabupaten Bogor yang Berdaya Saing			1	PDRB (ADHB)	Triliun Rp	311,3
		1.3.1	Meningkatnya inovasi daerah yang implementatif	a.	Indeks Inovasi Daerah	Poin	74,6
		1.3.2	Meningkatnya investasi	a.	Nilai Realisasi Investasi Daerah	Triliun Rp	15,75
		1.3.3	Meningkatnya pendapatan daerah	a.	Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	60,63
1.4	Terwujudnya Daya Dukung Lingkungan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi			1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	59,26
		1.4.1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	a.	Indeks Kualitas Air	Poin	67,2
				b.	Indeks Kualitas Udara	Poin	50,17
				c.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Poin	62,45
		1.4.2	Menurunnya tingkat risiko bencana	a.	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Poin	105

Sumber : Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026

Keberadaan visi dan misi yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2025-2029 diakomodir dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 untuk memayungi perencanaan pembangunan tahun 2025.

“Kabupaten Bogor Istimewa dan Gemilang” merupakan visi pembangunan daerah tahun 2025-2029 untuk periode bupati dan wakil bupati tahun 2025-2030. Visi tersebut dijabarkan ke dalam 5 (lima) misi, yaitu:

1. Mewujudkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Baik;
2. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Maju;
3. Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Berkeadilan;
4. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas;
5. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.

Berdasarkan misi tersebut, tujuan dan sasaran pembangunan daerah mengalami perubahan, sebagaimana dijabarkan dalam Tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4.2

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah tahun 2025-2029

Visi/Misi		Tujuan		Sasaran		Satuan	Indikator	Target Kinerja Tahun 2025	
Visi: Kabupaten Bogor Istimewa dan Gemilang									
1	Mewujudkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Baik	1	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan			Poin	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	84,95	
				1.1	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang akuntabel, terintegrasi dan berbasis digital	Poin	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4,4	
				1.2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Predikat	Nilai SAKIP	69,8	
				1.3	Meningkatnya kualitas penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik	Poin	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	4,15	

Visi/Misi		Tujuan		Sasaran		Satuan	Indikator	Target Kinerja Tahun 2025
2	Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Maju	2	Meningkatnya produktivitas ekonomi daerah			%	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	5,15 - 5,81
				2.1	Meningkatnya Produksi Barang dan Jasa Daerah (PDRB Sekunder dan Tersier)	Juta Rupiah	PDRB ADHB	316.462.692
				2.2	Meningkatnya ketersediaan pangan menuju swasembada pangan	Poin	Indeks Ketahanan Pangan	70,5
				2.3	Meningkatnya pemerataan pembangunan antar wilayah	Poin	Indeks Ketimpangan Williamson	0,955
3	Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Berkeadilan	3	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan resiliensi terhadap bencana			Poin	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	59,26

Visi/Misi		Tujuan		Sasaran		Satuan	Indikator	Target Kinerja Tahun 2025
				3.1	Meningkatnya ketahanan bencana	Poin	Indeks Risiko Bencana (IRBI)	101
				3.2	Meningkatnya tata kelola lingkungan hidup yang berkelanjutan	%	Penurunan Intensitas Emisi GRK	0,55
4	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	4	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia			Poin	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	74,02
				4.1	Meningkatnya akses layanan pendidikan	Tahun	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	8,4
				4.2	Meningkatnya akses layanan kesehatan	Tahun	Angka Harapan Hidup (AHH)	75,34
5	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	5	Meningkatnya taraf hidup masyarakat			Poin	Gini Rasio	0,364-0,371
				5.1	Menurunnya tingkat kemiskinan	%	Angka kemiskinan	6,39 - 7,05

Visi/Misi		Tujuan		Sasaran		Satuan	Indikator	Target Kinerja Tahun 2025
				5.2	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	%	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	7,41 - 8,07
				5.3	Meningkatnya kesempatan berusaha bagi masyarakat	Rp/tahun	Pendapatan Perkapita	55,31-55,67

Sumber : Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Prioritas pembangunan daerah merupakan gambaran prioritas pembangunan tahun 2025 yang dikaitkan dengan program pembangunan daerah dalam RPJMD Tahun 2025-2029. Untuk perubahan tahun 2025, prioritas pembangunan daerah dijabarkan dari sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dijabarkan dalam Tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.3
Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025
Berdasarkan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029

Sasaran Daerah	Program Prioritas	Sesudah Perubahan (Rp)	PD Pengampu
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang akuntabel, terintegrasi dan berbasis digital	Program Pendaftaran Penduduk	16.668.195.174,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Program Pencatatan Sipil	3.815.717.183,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2.868.993.652,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	8.489.101.383,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	4.613.384.930,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	78.054.132.976,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	4.399.364.704,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	1.076.247.957,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sasaran Daerah	Program Prioritas	Sesudah Perubahan (Rp)	PD Pengampu
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	4.330.842.902,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program Penataan Desa	104.242.670.890,00	Dinas Pembudayaan Masyarakat dan Desa
	Program Peningkatan Kerjasama Desa	248.744.593,00	Dinas Pembudayaan Masyarakat dan Desa
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	16.503.429.745,00	Dinas Pembudayaan Masyarakat dan Desa
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	21.155.529.086,00	Dinas Pembudayaan Masyarakat dan Desa
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.944.575.728,00	Inspektorat
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	2.872.805.445,00	Inspektorat
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2.734.261.173,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	10.042.764.433,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
	Program Riset dan Inovasi Daerah	3.463.362.738,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Sasaran Daerah	Program Prioritas	Sesudah Perubahan (Rp)	PD Pengampu
	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	35.080.781.028,00	Sekretariat Daerah
	Program Perekonomian dan Pembangunan	9.675.497.585,00	Sekretariat Daerah
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	9.636.139.350,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Program Kepegawaian Daerah	12.920.575.500,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1.814.113.223.091,00	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.337.561.520,00	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	25.697.229.378,00	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
	Program Pengelolaan Arsip	1.448.441.327,00	Dinas Arsip dan Perpustakaan
	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	132.891.465,00	Dinas Arsip dan Perpustakaan
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	69.181.096.056,00	Sekretariat DPRD
Meningkatnya kualitas penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	26.519.069.481,00	Dinas Komunikasi dan Informasi
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	43.832.564.229,00	Dinas Komunikasi dan Informasi
	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	2.504.339.486,00	Dinas Komunikasi dan Informasi
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	737.085.539,00	Dinas Komunikasi dan Informasi

Sasaran Daerah	Program Prioritas	Sesudah Perubahan (Rp)	PD Pengampu
Meningkatnya Produksi Barang dan Jasa Daerah (PDRB Sekunder dan Tersier)	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	1.044.828.536,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	1.344.875.472,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Program Pengembangan UMKM	697.301.352,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	233.768.787,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	5.894.787.595,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	3.956.157.873,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	Program Pengembangan Ekspor	1.144.758.271,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	2.340.849.376,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	391.466.454,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	13.573.235.466,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	497.668.964,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Program Promosi Penanaman Modal	719.599.623,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sasaran Daerah	Program Prioritas	Sesudah Perubahan (Rp)	PD Pengampu
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	744.149.910,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1.920.146.609,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	1.513.820.925,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1.920.146.609,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	5.581.579.025,00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Meningkatnya ketersediaan pangan menuju swasembada pangan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	8.725.761.226,00	Dinas Ketahanan Pangan
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	24.232.519.914,00	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	6.593.048.696,00	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	12.358.237.976,00	Dinas Perikanan dan Peternakan
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	6.879.404.244,00	Dinas Perikanan dan Peternakan
Meningkatnya pemerataan pembangunan antar wilayah	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	52.019.580.203,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/kota	42.922.397.697,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sasaran Daerah	Program Prioritas	Sesudah Perubahan (Rp)	PD Pengampu
	Program Kawasan Permukiman	15.528.692.492,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	42.917.048.386,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
	Program Penyelenggaraan Jalan	653.007.664.353,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	67.070.768.134,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Penataan Bangunan Gedung	246.753.391.670,00	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
	Program Pengelolaan Perkeretaapian	270.754.600,00	Dinas Perhubungan
Meningkatnya ketahanan bencana	Program Penanggulangan Bencana	9.542.625.053,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	25.616.071.376,00	Dinas Pemadam Kebakaran
Meningkatnya tata kelola lingkungan hidup yang berkelanjutan	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	8.963.001.492,00	Dinas Lingkungan Hidup
	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/kota	42.922.397.697,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	4.400.909.062,00	Dinas Lingkungan Hidup

Sasaran Daerah	Program Prioritas	Sesudah Perubahan (Rp)	PD Pengampu
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	4.072.824.963,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Pengelolaan Persampahan	148.322.471.417,00	Dinas Lingkungan Hidup
	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	134.710.278.815,00	Dinas Perhubungan
Meningkatnya akses layanan Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	1.387.559.539.147,00	Dinas Pendidikan
	Program Pemenuhan Hak Anak	182.230.634,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	15.428.127.115,00	Dinas Pemuda dan Olahraga
Meningkatnya akses layanan Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1.289.989.712.077,00	Dinas Kesehatan
	Program Pembinaan Keluarga Berencana	9.612.330.868,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	26.217.024.843,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Menurunnya kemiskinan	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.458.407.100,00	Dinas Sosial
	Program Pemberdayaan Sosial	8.110.063.576,00	Dinas Sosial
Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	Program Penempatan Tenaga Kerja	1.130.281.430,00	Dinas Tenaga Kerja
	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	4.197.621.662,00	Dinas Tenaga Kerja

Sasaran Daerah	Program Prioritas	Sesudah Perubahan (Rp)	PD Pengampu
Meningkatnya kesempatan berusaha bagi masyarakat	Program Pengembangan UMKM	697.301.352,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Sumber : Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029 dan Usulan Perangkat Daerah Tahun 2025, diolah

Dalam Perubahan RKPD Tahun 2025, terdapat 13 (tiga belas) sasaran pembangunan daerah yang didukung oleh 81 program prioritas, dengan total indikasi anggaran sebesar Rp6.687.272.249.844 (Enam Triliun Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Empat Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

sasaran pembangunan-1, Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang akuntabel, terintegrasi dan berbasis digital, didukung oleh 13 program prioritas dengan indikatif anggaran sebesar Rp266.466.355.175 (Dua Ratus Enam Puluh Enam Miliar Empat Ratus Enam Puluh Enam Juta Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu Seratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).

sasaran pembangunan-2, Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, didukung oleh 15 program prioritas dengan indikatif anggaran sebesar Rp2.001.281.205.817 (Dua Triliun Satu Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Ribu Delapan Ratus Tujuh Belas Rupiah).

sasaran pembangunan-3, Meningkatkan kualitas penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik, didukung oleh 4 program prioritas dengan indikatif anggaran sebesar Rp73.593.058.735 (Tujuh Puluh Tiga Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Lima Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah).

sasaran pembangunan-4, Meningkatkan Produksi Barang dan Jasa Daerah (PDRB Sekunder dan Tersier), didukung oleh 17 program prioritas dengan indikatif anggaran sebesar Rp43.519.140.847 (Empat Puluh Tiga Miliar Lima Ratus Sembilan Belas Juta Seratus Empat Puluh Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah).

sasaran pembangunan-5, Meningkatkan ketersediaan pangan menuju swasembada pangan, didukung oleh 5 program prioritas dengan indikatif anggaran sebesar Rp58.788.972.056 (Lima Puluh Delapan Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Lima Puluh Enam Rupiah).

sasaran pembangunan-6, Meningkatnya pemerataan pembangunan antar wilayah, didukung oleh 8 program prioritas, dengan indikatif anggaran sebesar Rp1.120.490.297.535 (Satu Triliun Seratus Dua Puluh Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah).

sasaran pembangunan-7, Meningkatnya ketahanan bencana, didukung oleh 2 program prioritas, dengan indikatif anggaran sebesar Rp35.158.696.429 (Tiga Puluh Lima Miliar Seratus Lima Puluh Delapan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah).

sasaran pembangunan-8, Meningkatnya tata kelola lingkungan hidup yang berkelanjutan, didukung oleh 6 program prioritas, dengan indikatif anggaran sebesar Rp343.391.883.446 (Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Empat Puluh Enam Rupiah).

sasaran pembangunan-9, Meningkatnya akses layanan pendidikan, didukung oleh 3 program prioritas, dengan indikasi anggaran sebesar Rp1.403.169.896.896 (Satu Triliun Empat Ratus Tiga Miliar Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah).

sasaran pembangunan-10, Meningkatnya akses layanan kesehatan, didukung oleh 3 program prioritas, dengan indikasi anggaran sebesar Rp1.325.819.067.788 (Satu Triliun Tiga Ratus Dua Puluh Lima Miliar Delapan Ratus Sembilan Belas Juta Enam Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah).

sasaran pembangunan-11, Menurunnya kemiskinan, didukung oleh 2 program prioritas, dengan indikasi anggaran sebesar Rp9.568.470.676 (Sembilan Miliar Lima Ratus Enam Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah).

sasaran pembangunan-12, Menurunnya tingkat pengangguran terbuka, didukung oleh 2 program prioritas, dengan indikasi anggaran sebesar Rp5.327.903.092 (Lima Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tiga Ribu Sembilan Puluh Dua Rupiah).

sasaran pembangunan-13, Meningkatnya kesempatan berusaha bagi masyarakat, didukung oleh 1 program prioritas, dengan indikasi anggaran sebesar Rp697.301.352 (Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Satu Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Dua Rupiah).

Adapun untuk sinkronisasi antar pusat dan daerah dapat dipetakan berdasarkan keterdukungan program pembangunan terhadap visi dan misi nasional maupun Jawa Barat, yang dijabarkan sebagai berikut:

- a. Program pembangunan daerah yang mendukung pencapaian Asta Cita, dijabarkan sebagai berikut:
 - Asta Cita pertama : Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM), didukung oleh 6 program dengan indikasi anggaran sebesar Rp105.796.327.214 (Seratus Lima Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Empat Belas Rupiah).
 - Asta Cita kedua : Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru; didukung oleh 24 program, dengan indikasi anggaran sebesar Rp227.265.007.088 (Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Miliar Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Tujuh Ribu Delapan Puluh Delapan Rupiah).
 - Asta Cita ketiga: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi; didukung oleh 40 program, dengan indikasi anggaran sebesar Rp1.634.950.945.327 (Satu Triliun Enam Ratus Tiga Puluh Empat Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah).
 - Asta Cita keempat : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran Perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas; didukung oleh 36 program, dengan indikasi anggaran sebesar Rp6.613.702.756.824 (Enam Triliun Enam Ratus Tiga Belas Miliar Tujuh Ratus Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Empat Rupiah).
 - Asta Cita kelima : Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri; didukung oleh 16 program, dengan indikasi anggaran sebesar Rp86.952.232.479 (Delapan Puluh Enam Miliar Sembilan Ratus Lima

Puluh Dua Juta Dua Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah).

- Asta Cita keenam : Membangun dari desa dan dari bawah untuk penumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan; didukung oleh 5 program, dengan indikasi anggaran sebesar Rp156.626.801.632 (Seratus Lima Puluh Enam Miliar Enam Ratus Dua Puluh Enam Juta Delapan Ratus Satu Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah).
- Asta Cita ketujuh : Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; didukung oleh 267 program, dengan indikasi anggaran sebesar Rp3.212.179.061.361 (Tiga Triliun Dua Ratus Dua Belas Miliar Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Enam Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Satu Rupiah).
- Asta Cita Kedelapan : Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan. Alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur, didukung oleh 20 program, dengan indikasi anggaran sebesar Rp349.730.041.162 (Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Juta Empat Puluh Satu Ribu Seratus Enam Puluh Dua Rupiah).

Adapun uraian masing-masing dijabarkan dalam Tabel 4.4 sebagai berikut:

Tabel 4.4

Program Pembangunan Daerah yang Mendukung Asta Cita Tahun 2025

©	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	PD PENGAMPU
1	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, Dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	4.399.364.704	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	1.076.247.957	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	4.613.384.930	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	4.330.842.902	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

©	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	PD PENGAMPU
		Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	78.054.132.976	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13.322.353.745	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
2	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara Dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air Ekonomi Syariah. Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau,	Program Penanganan Kerawanan Pangan	597.319.113	Dinas Ketahanan Pangan
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	2.059.267.121	Dinas Ketahanan Pangan
		Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	3.797.057.736	Dinas Ketahanan Pangan
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	8.725.761.226	Dinas Ketahanan Pangan

©	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	PD PENGAMPU
	Dan Ekonomi Biru	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	14.376.614.515	Dinas Ketahanan Pangan
		Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	182.309.372	Dinas Koperasi Dan UMKM
		Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	5.894.787.595	Dinas Koperasi Dan UMKM
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan	13.710.892.076	Dinas Koperasi Dan UMKM
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	541.111.291	Dinas Perikanan Dan Peternakan
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	12.358.237.976	Dinas Perikanan Dan Peternakan
		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	216.181.192	Dinas Perikanan Dan Peternakan
		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	7.876.401.750	Dinas Perikanan Dan Peternakan

©	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	PD PENGAMPU
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	6.879.404.244	Dinas Perikanan Dan Peternakan
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	27.290.647.172	Dinas Perikanan Dan Peternakan
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1.831.750.084	Dinas Perikanan Dan Peternakan
		Program Perizinan Usaha Pertanian	40.052.671	Dinas Perikanan Dan Peternakan
		Program Penyuluhan Pertanian	1.004.178.690	Dinas Perikanan Dan Peternakan
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	28.403.844.807	Dinas Perikanan Dan Peternakan
		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	1.435.251.171	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Perkebunan

©	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	PD PENGAMPU
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	50.427.158.742	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Perkebunan
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	6.593.048.696	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Perkebunan
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	24.232.519.914	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Perkebunan
		Program Penyuluhan Pertanian	7.020.474.366	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Perkebunan
		Program Perizinan Usaha Pertanian	1.770.735.568	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Perkebunan

©	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	PD PENGAMPU
3	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur Dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif Serta Mengembangkan Agromaritim Industri Di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi;	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	1.344.875.472	Dinas Koperasi Dan UMKM
		Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	234.655.474	Dinas Koperasi Dan UMKM
		Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	382.709.255	Dinas Koperasi Dan UMKM
		Program Pengembangan UMKM	697.301.352	Dinas Koperasi Dan UMKM
		Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	233.768.787	Dinas Koperasi Dan UMKM
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	85.070.786.142	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Program Penyelenggaraan Jalan	653.007.664.353	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

©	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	PD PENGAMPU
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	42.922.397.697	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	31.204.563.235	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	52.019.580.203	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	67.070.768.134	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	2.798.750.855	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	4.072.824.963	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Program Kawasan Permukiman	15.528.692.492	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan

©	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	PD PENGAMPU
		Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	7.817.410.609	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
		Program Penataan Bangunan Gedung	246.753.391.670	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
		Program Penatagunaan Tanah *	1.693.066.263	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
		Program Pengelolaan Tanah Kosong *	174.399.754	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
		Program Pengembangan Perumahan	76.457.887.917	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan

©	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	PD PENGAMPU
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	42.917.048.386	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
		Program Penyelenggaraan Jalan	6.811.994.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
		Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	536.407.111	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
		Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh		Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
		Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee *	449.038.650	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan

©	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	PD PENGAMPU
		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	51.556.760.976	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
		Program Hubungan Industrial	1.108.872.489	Dinas Tenaga Kerja
		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	4.197.621.662	Dinas Tenaga Kerja
		Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	65.302.625	Dinas Tenaga Kerja
		Program Penempatan Tenaga Kerja	1.130.281.430	Dinas Tenaga Kerja
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	18.572.082.378	Dinas Tenaga Kerja
		Program Perencanaan Tenaga Kerja	158.432.800	Dinas Tenaga Kerja
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	15.428.127.115	Dinas Pemuda Dan Olahraga

©	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	PD PENGAMPU
		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	2.847.607.823	Dinas Pemuda Dan Olahraga
		Program Pemasaran Pariwisata	5.295.723.714	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan HKI	1.513.820.925	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
		Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	1.866.023.514	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1.920.146.609	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
		Program Pengelolaan Perkeretaapian	270.754.600	Dinas Perhubungan

©	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	PD PENGAMPU
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	54.109.125.078	Dinas Perhubungan
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	134.710.278.815	Dinas Perhubungan
4	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (Sdm), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, Sena Penguatan Peran Perempuan. Pemuda (Generasi Milenial Dan Generasi Z), Dan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	122.622.854.965	Dinas Pemuda Dan Olahraga
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	76.780.731.908	Dinas Pemuda Dan Olahraga
		Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	49.200.000	Dinas Pendidikan
		Program Pengelolaan Pendidikan	1.387.559.539.147	Dinas Pendidikan
		Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra	177.585.534	Dinas Pendidikan

©	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	PD PENGAMPU
	Penyandang Disabilitas	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.739.938.149.593	Dinas Pendidikan
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1.090.179.900	Dinas Kesehatan
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1.289.989.712.077	Dinas Kesehatan
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	5.021.401.934	Dinas Kesehatan
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.532.196.213.943	Dinas Kesehatan
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	80.555.900	Dinas Kesehatan

©	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	PD PENGAMPU
		Program Pemberdayaan Sosial	8.110.063.576	Dinas Sosial
		Program Penanganan Bencana	3.054.311.100	Dinas Sosial
		Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	1.480.000	Dinas Sosial
		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	798.646.299	Dinas Sosial
		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	22.517.190.298	Dinas Sosial
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	1.458.407.100	Dinas Sosial
		Program Rehabilitasi Sosial	10.905.502.225	Dinas Sosial

©	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	PD PENGAMPU
		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	26.217.024.843	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	9.612.330.868	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	182.230.634	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

©	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	PD PENGAMPU
		Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	677.177.274	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	97.368.557	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
		Program Pengendalian Penduduk	992.034.178	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

©	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	PD PENGAMPU
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	220.241.110	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	15.920.510.446	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
		Program Perlindungan Khusus Anak	1.303.565.014	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

©	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	PD PENGAMPU
		Program Perlindungan Perempuan	333.390.685	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
		Program Kepegawaian Daerah	12.920.575.500	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	9.636.139.350	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	243.159.259.023	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

©	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	PD PENGAMPU
		Program Aplikasi Informatika	43.832.564.229	Dinas Komunikasi Dan Informatika
		Program Informasi dan Komunikasi Publik	26.519.069.481	Dinas Komunikasi Dan Informatika
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	16.486.125.108	Dinas Komunikasi Dan Informatika
		Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	2.504.339.486	Dinas Komunikasi Dan Informatika
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	737.085.539	Dinas Komunikasi Dan Informatika
5	Melanjutkan Hilirisasi Dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya	Program Pelayanan Penanaman Modal	3.282.938.563	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

©	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	PD PENGAMPU
	Alam Untuk Meningkatkan Nilai Tambah Di Dalam Negeri	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	808.423.456	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	497.668.964	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	744.149.910	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	37.001.316.038	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Promosi Penanaman Modal	719.599.623	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan

©	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	PD PENGAMPU
				Terpadu Satu Pintu
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	513.159.121	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
		Program Pengembangan Ekspor	1.144.758.271	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri	391.466.454	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
		Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	151.245.959	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	13.573.235.466	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian

©	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	PD PENGAMPU
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	18.203.365.857	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	2.340.849.376	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
		Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	1.044.828.536	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	3.956.157.873	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
		Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	2.579.069.012	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
6	Membangun Dari Desa Dan Dari Bawah Untuk	Program Administrasi Pemerintahan Desa	16.503.429.745	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

©	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	PD PENGAMPU
	Penumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, Dan Pemberantasan Kemiskinan	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	21.155.529.086	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
		Program Penataan Desa	104.242.670.890	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
		Program Peningkatan Kerjasama Desa	248.744.593	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	14.476.427.318	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
7	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum Dan Birokrasi, Serta	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	35.080.781.028	Sekretariat Daerah
		Program Penunjang Urusan Pemerintah	148.327.586.304	Sekretariat Daerah

©	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	PD PENGAMPU
	Memperkuat Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, Dan Penyelundupan	Program Perekonomian Dan Pembangunan	9.675.497.585	Sekretariat Daerah
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	69.181.096.056	Sekretariat DPRD
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	109.456.480.366	Sekretariat DPRD
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	10.042.764.433	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	24.874.769.491	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah

©	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	PD PENGAMPU
		Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2.734.261.173	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
		Program Riset Dan Inovasi Daerah	3.463.362.738	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.337.561.520	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1.814.113.223.091	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	45.199.323.807	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	25.697.229.378	Badan Pengelolaan

©	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	PD PENGAMPU
				Pendapatan Daerah
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	198.099.311.616	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
		Program Pencatatan Sipil	3.815.717.183	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
		Program Pendaftaran Penduduk	16.668.195.174	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2.868.993.652	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
		Program Pengelolaan Profil Kependudukan	51.984.750	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

©	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	PD PENGAMPU
		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	39.555.618.052	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
		Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	8.489.101.383	Satuan Polisi Pamong Praja
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	44.471.207.185	Satuan Polisi Pamong Praja
		Program Penanggulangan Bencana	9.542.625.053	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	15.829.494.740	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	25.616.071.376	Dinas Pemadam Kebakaran

©	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	PD PENGAMPU
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	15.099.523.387	Dinas Pemadam Kebakaran
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	49.466.535.855	Inspektorat
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.944.575.728	Inspektorat
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	2.872.805.445	Inspektorat
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	136.266.900	Kecamatan Cibinong
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	37.197.675.235	Kecamatan Cibinong

©	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	PD PENGAMPU
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	50.236.682.034	Kecamatan Cibinong
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	1.788.141.884	Kecamatan Cibinong
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	335.776.187	Kecamatan Cibinong
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	90.252.462	Kecamatan Gunung Putri
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	486.488.536	Kecamatan Gunung Putri
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	258.114.303	Kecamatan Gunung Putri

©	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	PD PENGAMPU
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	15.994.772.047	Kecamatan Gunung Putri
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	954.722.446	Kecamatan Gunung Putri
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	39.360.600	Kecamatan Gunung Putri
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	131.058.295	Kecamatan Citeureup
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	5.436.890.254	Kecamatan Citeureup
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	417.286.248	Kecamatan Citeureup

©	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	PD PENGAMPU
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.748.306.250	Kecamatan Citeureup
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	663.820.488	Kecamatan Citeureup
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	17.938.946	Kecamatan Citeureup
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	195.646.413	Kecamatan Sukaraja
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	382.808.019	Kecamatan Sukaraja
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	299.612.839	Kecamatan Sukaraja

©	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	PD PENGAMPU
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.674.475.162	Kecamatan Sukaraja
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	1.222.907.597	Kecamatan Sukaraja
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	94.064.055	Kecamatan Sukaraja
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	81.164.800	Kecamatan Babakan Madang
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	432.836.778	Kecamatan Babakan Madang
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	462.817.452	Kecamatan Babakan Madang

©	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	PD PENGAMPU
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.648.591.683	Kecamatan Babakan Madang
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	637.078.515	Kecamatan Babakan Madang
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	91.526.550	Kecamatan Babakan Madang
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	68.740.289	Kecamatan Jonggol
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	413.225.153	Kecamatan Jonggol
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	371.669.355	Kecamatan Jonggol
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.911.992.522	Kecamatan Jonggol

©	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	PD PENGAMPU
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	1.167.720.427	Kecamatan Jonggol
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	28.745.415	Kecamatan Jonggol
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	70.040.584	Kecamatan Cileungsi
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	347.859.319	Kecamatan Cileungsi
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	220.582.358	Kecamatan Cileungsi
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.384.124.222	Kecamatan Cileungsi

©	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	PD PENGAMPU
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	647.414.003	Kecamatan Cileungsi
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	46.151.366	Kecamatan Cileungsi
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	123.000.825	Kecamatan Cariu
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	484.616.038	Kecamatan Cariu
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	374.654.307	Kecamatan Cariu
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.812.302.428	Kecamatan Cariu

©	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	PD PENGAMPU
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	395.996.473	Kecamatan Cariu
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	56.097.575	Kecamatan Cariu
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.584.831.898	Kecamatan Sukamakmur
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	770.013.520	Kecamatan Sukamakmur
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	337.977.446	Kecamatan Sukamakmur
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	88.920.140	Kecamatan Sukamakmur

©	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	PD PENGAMPU
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	68.365.701	Kecamatan Sukamakmur
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	264.842.790	Kecamatan Sukamakmur
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.600.500.754	Kecamatan Parung
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	992.783.150	Kecamatan Parung
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	347.856.859	Kecamatan Parung
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	78.797.900	Kecamatan Parung

©	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	PD PENGAMPU
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100.195.450	Kecamatan Parung
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	370.418.350	Kecamatan Parung
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.337.653.563	Kecamatan Gunung Sindur
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	582.835.730	Kecamatan Gunung Sindur
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	383.706.685	Kecamatan Gunung Sindur
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	134.698.750	Kecamatan Gunung Sindur

©	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	PD PENGAMPU
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	193.846.497	Kecamatan Gunung Sindur
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	496.808.254	Kecamatan Gunung Sindur
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	16.624.932.329	Kecamatan Kemang
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	1.473.675.966	Kecamatan Kemang
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	2.688.747.179	Kecamatan Kemang
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	217.491.878	Kecamatan Kemang

©	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	PD PENGAMPU
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	144.231.037	Kecamatan Kemang
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	535.278.609	Kecamatan Kemang
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.526.415.337	Kecamatan Bojonggede
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	667.433.881	Kecamatan Bojonggede
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	3.168.043.062	Kecamatan Bojonggede
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	99.415.240	Kecamatan Bojonggede

©	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	PD PENGAMPU
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	230.224.336	Kecamatan Bojonggede
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	367.235.894	Kecamatan Bojonggede
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.130.592.799	Kecamatan Leuwiliang
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	720.232.151	Kecamatan Leuwiliang
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	475.741.092	Kecamatan Leuwiliang
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	79.545.957	Kecamatan Leuwiliang

©	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	PD PENGAMPU
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	120.542.261	Kecamatan Leuwiliang
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	246.929.785	Kecamatan Leuwiliang
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	19.209.494.711	Kecamatan Ciampea
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	834.593.952	Kecamatan Ciampea
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	351.685.708	Kecamatan Ciampea
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	64.816.063	Kecamatan Ciampea

©	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	PD PENGAMPU
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	51.806.579	Kecamatan Ciampea
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	234.060.904	Kecamatan Ciampea
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.520.845.827	Kecamatan Cibungbulang
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	1.120.161.900	Kecamatan Cibungbulang
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	401.144.650	Kecamatan Cibungbulang
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	56.634.000	Kecamatan Cibungbulang

©	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	PD PENGAMPU
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	12.720.000	Kecamatan Cibungbulang
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	280.835.200	Kecamatan Cibungbulang
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.932.927.352	Kecamatan Pamijahan
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	532.857.500	Kecamatan Pamijahan
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	351.412.550	Kecamatan Pamijahan
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	13.612.500	Kecamatan Pamijahan

©	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	PD PENGAMPU
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	28.594.500	Kecamatan Pamijahan
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	323.301.175	Kecamatan Pamijahan
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.721.759.508	Kecamatan Rumpin
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	911.337.085	Kecamatan Rumpin
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	280.173.573	Kecamatan Rumpin
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	86.827.135	Kecamatan Rumpin

©	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	PD PENGAMPU
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	84.129.596	Kecamatan Rumpin
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	188.057.663	Kecamatan Rumpin
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.838.382.696	Kecamatan Jasinga
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	730.704.472	Kecamatan Jasinga
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	325.011.321	Kecamatan Jasinga
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	110.952.883	Kecamatan Jasinga

©	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	PD PENGAMPU
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	25.188.395	Kecamatan Jasinga
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	328.843.686	Kecamatan Jasinga
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	15.729.116.672	Kecamatan Parung Panjang
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	1.044.256.608	Kecamatan Parung Panjang
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	404.544.749	Kecamatan Parung Panjang
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	83.839.681	Kecamatan Parung Panjang

©	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	PD PENGAMPU
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	211.195.731	Kecamatan Parung Panjang
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	514.011.285	Kecamatan Parung Panjang
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.012.714.691	Kecamatan Nanggung
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	745.554.536	Kecamatan Nanggung
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	406.525.885	Kecamatan Nanggung
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	65.116.986	Kecamatan Nanggung

©	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	PD PENGAMPU
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	154.280.741	Kecamatan Nanggung
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	299.493.017	Kecamatan Nanggung
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.203.676.249	Kecamatan Cigudeg
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	1.208.318.199	Kecamatan Cigudeg
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	394.054.305	Kecamatan Cigudeg
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	218.179.558	Kecamatan Cigudeg

©	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	PD PENGAMPU
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	49.195.018	Kecamatan Cigudeg
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	493.833.382	Kecamatan Cigudeg
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.719.341.996	Kecamatan Tenjo
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	830.776.155	Kecamatan Tenjo
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	374.328.595	Kecamatan Tenjo
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	60.134.300	Kecamatan Tenjo

©	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	PD PENGAMPU
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	70.259.050	Kecamatan Tenjo
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	238.300.861	Kecamatan Tenjo
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.141.987.656	Kecamatan Ciawi
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	991.917.350	Kecamatan Ciawi
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	377.437.950	Kecamatan Ciawi
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	121.785.600	Kecamatan Ciawi

©	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	PD PENGAMPU
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	87.602.800	Kecamatan Ciawi
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	357.093.100	Kecamatan Ciawi
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.662.731.489	Kecamatan Cisarua
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	985.442.550	Kecamatan Cisarua
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	3.331.297.492	Kecamatan Cisarua
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	61.864.475	Kecamatan Cisarua

©	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	PD PENGAMPU
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	91.818.875	Kecamatan Cisarua
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	452.536.480	Kecamatan Cisarua
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.031.429.508	Kecamatan Megamendung
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	1.012.266.575	Kecamatan Megamendung
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	438.172.347	Kecamatan Megamendung
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	59.198.050	Kecamatan Megamendung

©	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	PD PENGAMPU
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	29.267.400	Kecamatan Megamendung
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	189.490.450	Kecamatan Megamendung
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.792.856.317	Kecamatan Caringin
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	752.349.838	Kecamatan Caringin
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	424.093.516	Kecamatan Caringin
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	139.171.614	Kecamatan Caringin

©	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	PD PENGAMPU
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	126.747.164	Kecamatan Caringin
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	431.261.471	Kecamatan Caringin
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.039.704.950	Kecamatan Cijeruk
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	954.705.229	Kecamatan Cijeruk
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	383.019.432	Kecamatan Cijeruk
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	143.967.554	Kecamatan Cijeruk

©	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	PD PENGAMPU
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	74.912.103	Kecamatan Cijeruk
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	439.081.302	Kecamatan Cijeruk
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.461.520.742	Kecamatan Ciomas
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	732.463.349	Kecamatan Ciomas
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	2.949.812.995	Kecamatan Ciomas
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	113.389.600	Kecamatan Ciomas

©	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	PD PENGAMPU
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	41.491.689	Kecamatan Ciomas
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	222.803.856	Kecamatan Ciomas
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.052.927.629	Kecamatan Dramaga
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	573.810.493	Kecamatan Dramaga
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	582.350.189	Kecamatan Dramaga
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	97.020.000	Kecamatan Dramaga

©	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	PD PENGAMPU
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	91.933.296	Kecamatan Dramaga
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	307.101.110	Kecamatan Dramaga
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.956.027.141	Kecamatan Tamansari
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	918.633.930	Kecamatan Tamansari
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	368.193.436	Kecamatan Tamansari
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	95.011.284	Kecamatan Tamansari

©	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	PD PENGAMPU
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	52.915.109	Kecamatan Tamansari
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	209.067.470	Kecamatan Tamansari
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.924.141.441	Kecamatan Klapanunggal
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	1.252.277.793	Kecamatan Klapanunggal
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	450.173.541	Kecamatan Klapanunggal
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	116.990.332	Kecamatan Klapanunggal

©	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	PD PENGAMPU
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	83.542.677	Kecamatan Klapanunggal
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	530.682.503	Kecamatan Klapanunggal
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.153.871.467	Kecamatan Ciseeng
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	1.098.579.461	Kecamatan Ciseeng
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	347.144.181	Kecamatan Ciseeng
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	102.867.562	Kecamatan Ciseeng

©	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	PD PENGAMPU
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	116.020.699	Kecamatan Ciseeng
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	289.922.384	Kecamatan Ciseeng
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.980.348.509	Kecamatan Rancabungur
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	742.229.107	Kecamatan Rancabungur
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	372.677.473	Kecamatan Rancabungur
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	114.272.331	Kecamatan Rancabungur

©	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	PD PENGAMPU
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	46.709.928	Kecamatan Rancabungur
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	269.916.747	Kecamatan Rancabungur
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.108.647.522	Kecamatan Sukajaya
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	968.529.832	Kecamatan Sukajaya
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	510.433.450	Kecamatan Sukajaya
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	120.225.350	Kecamatan Sukajaya

©	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	PD PENGAMPU
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	212.621.780	Kecamatan Sukajaya
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	528.601.050	Kecamatan Sukajaya
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.157.075.106	Kecamatan Tanjungsari
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	746.891.312	Kecamatan Tanjungsari
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	403.051.619	Kecamatan Tanjungsari
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	132.149.194	Kecamatan Tanjungsari

©	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	PD PENGAMPU
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	268.749.234	Kecamatan Tanjungsari
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	349.730.811	Kecamatan Tanjungsari
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	17.095.960.041	Kecamatan Tajurhalang
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	1.216.431.074	Kecamatan Tajurhalang
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	524.028.474	Kecamatan Tajurhalang
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	130.036.884	Kecamatan Tajurhalang

©	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	PD PENGAMPU
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	111.767.878	Kecamatan Tajurhalang
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	494.109.964	Kecamatan Tajurhalang
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	16.716.209.448	Kecamatan Cigombong
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	1.000.956.676	Kecamatan Cigombong
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	444.022.684	Kecamatan Cigombong
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	149.984.974	Kecamatan Cigombong

©	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	PD PENGAMPU
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	190.416.283	Kecamatan Cigombong
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	604.253.918	Kecamatan Cigombong
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.405.095.609	Kecamatan Leuwisadeng
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	646.822.796	Kecamatan Leuwisadeng
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	421.342.554	Kecamatan Leuwisadeng
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	146.082.867	Kecamatan Leuwisadeng

©	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	PD PENGAMPU
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	45.661.245	Kecamatan Leuwisadeng
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	310.698.079	Kecamatan Leuwisadeng
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.918.123.670	Kecamatan Tenjolaya
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	767.963.908	Kecamatan Tenjolaya
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	350.947.546	Kecamatan Tenjolaya
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	85.001.114	Kecamatan Tenjolaya

©	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	PD PENGAMPU
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	109.410.183	Kecamatan Tenjolaya
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	449.578.391	Kecamatan Tenjolaya
8	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan Yang Harmonis Dengan Lingkungan. Alam Dan Budaya, Serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama Untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil Dan Makmur	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	1.144.338.333	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	1.377.001.403	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	2.810.001.679	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Persampahan	148.322.471.417	Dinas Lingkungan Hidup

©	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	PD PENGAMPU
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	839.046.135	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	8.963.001.492	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	1.729.905.835	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	4.400.909.062	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	39.831.976.026	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	3.265.661.506	Dinas Lingkungan Hidup

©	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	PD PENGAMPU
		Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	4.399.364.704	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	1.076.247.957	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	4.613.384.930	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	4.330.842.902	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

©	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	PD PENGAMPU
		Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	78.054.132.976	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13.322.353.745	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	5.581.579.025	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
		Program Pengembangan Kebudayaan	7.493.768.025	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	1.725.259.738	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	16.448.794.272	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata

Sumber : Rancangan Akhir Perubahan Renja PD Tahun 2025, diolah

- b. Program Pembangunan Daerah yang Mendukung Misi Provinsi Jawa Barat, dijabarkan sebagai berikut:
- misi kesatu : Mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, cerdas, berpengetahuan, bertakwa, dan profesional pada bidang tugasnya masing-masing, didukung oleh 18 program, dengan indikasi anggaran sebesar Rp6.247.051.105.285 (Enam Triliun Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Miliar Lima Puluh Satu Juta Seratus Lima Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah).
 - misi kedua : Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis sumber daya lokal, berdaulat, berkelanjutan, berbasis sains, dan teknologi dengan memanfaatkan ragam teknologi masa kini, didukung oleh 18 program, dengan indikasi anggaran sebesar Rp66.579.435.308 (Enam Puluh Enam Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Delapan Rupiah).
 - Misi ketiga : Mengurangi disparitas pembangunan utara selatan, dan mendorong masuknya investasi serta pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, perekonomian dan lingkungan hidup yang proporsional; didukung oleh 45 program, dengan indikasi anggaran sebesar Rp7.016.498.833.273 (Tujuh Triliun Enam Belas Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah).
 - Misi keempat : Memperkuat transformasi birokrasi yang berorientasi terhadap pelayanan publik yang bermartabat, efektif, efisien, dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih, dan *clear governance*, didukung oleh 256 program, dengan indikasi anggaran sebesar Rp3.030.170.529.426 (Tiga Triliun Tiga Puluh Miliar Seratus Tujuh Puluh Juta Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Dua Puluh Enam Rupiah).

Uraian lengkap dijabarkan dalam Tabel 4.5 sebagai berikut:

Tabel 4.5

Program Pembangunan Daerah yang Mendukung Misi Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

NO	PRIORITAS JAWA BARAT	PROGRAM	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	PD PENGAMPU
1	Mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter, cerdas, berpengetahuan, bertakwa, dan profesional pada bidang tugasnya masing-masing	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	49.200.000	Dinas Pendidikan
		Program Pengelolaan Pendidikan	1.387.559.539.147	Dinas Pendidikan
		Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra	177.585.534	Dinas Pendidikan
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.739.938.149.593	Dinas Pendidikan
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1.090.179.900	Dinas Kesehatan
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1.289.989.712.077	Dinas Kesehatan
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	5.021.401.934	Dinas Kesehatan
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.532.196.213.943	Dinas Kesehatan
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	80.555.900	Dinas Kesehatan
		Program Hubungan Industrial	1.108.872.489	Dinas Tenaga Kerja

NO	PRIORITAS JAWA BARAT	PROGRAM	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	PD PENGAMPU
		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	4.197.621.662	Dinas Tenaga Kerja
		Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	65.302.625	Dinas Tenaga Kerja
		Program Penempatan Tenaga Kerja	1.130.281.430	Dinas Tenaga Kerja
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	18.572.082.378	Dinas Tenaga Kerja
		Program Perencanaan Tenaga Kerja	158.432.800	Dinas Tenaga Kerja
		Program Kepegawaian Daerah	12.920.575.500	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	9.636.139.350	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

NO	PRIORITAS JAWA BARAT	PROGRAM	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	PD PENGAMPU
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	243.159.259.023	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2	Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis sumber daya lokal, berdaulat, berkelanjutan, berbasis sains, dan teknologi dengan memanfaatkan ragam teknologi masa kini	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	182.309.372	Dinas Koperasi Dan UMKM
		Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	5.894.787.595	Dinas Koperasi Dan UMKM
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	1.344.875.472	Dinas Koperasi Dan UMKM
		Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	234.655.474	Dinas Koperasi Dan UMKM
		Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	382.709.255	Dinas Koperasi Dan UMKM
		Program Pengembangan UMKM	697.301.352	Dinas Koperasi Dan UMKM
		Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	233.768.787	Dinas Koperasi Dan UMKM
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan	13.710.892.076	Dinas Koperasi Dan UMKM
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	513.159.121	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian

NO	PRIORITAS JAWA BARAT	PROGRAM	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	PD PENGAMPU
		Program Pengembangan Ekspor	1.144.758.271	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri	391.466.454	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
		Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	151.245.959	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	13.573.235.466	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	18.203.365.857	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	2.340.849.376	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
		Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	1.044.828.536	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	3.956.157.873	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
		Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	2.579.069.012	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
3	Mengurangi disparitas pembangunan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	85.070.786.142	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

NO	PRIORITAS JAWA BARAT	PROGRAM	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	PD PENGAMPU
	utara selatan, dan mendorong masuknya investasi serta pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, perekonomian dan lingkungan hidup yang proporsional	Program Penyelenggaraan Jalan	653.007.664.353	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		Program Pelayanan Penanaman Modal	3.282.938.563	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	808.423.456	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	497.668.964	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	744.149.910	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	37.001.316.038	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	PRIORITAS JAWA BARAT	PROGRAM	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	PD PENGAMPU
		Program Promosi Penanaman Modal	719.599.623	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	49.200.000	Dinas Pendidikan
		Program Pengelolaan Pendidikan	1.387.559.539.147	Dinas Pendidikan
		Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra	177.585.534	Dinas Pendidikan
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.739.938.149.593	Dinas Pendidikan
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1.090.179.900	Dinas Kesehatan
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1.289.989.712.077	Dinas Kesehatan
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	5.021.401.934	Dinas Kesehatan
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.532.196.213.943	Dinas Kesehatan

NO	PRIORITAS JAWA BARAT	PROGRAM	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	PD PENGAMPU
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	80.555.900	Dinas Kesehatan
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	1.144.338.333	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	1.377.001.403	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	2.810.001.679	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Persampahan	148.322.471.417	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	839.046.135	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	8.963.001.492	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	1.729.905.835	Dinas Lingkungan Hidup

NO	PRIORITAS JAWA BARAT	PROGRAM	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	PD PENGAMPU
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	4.400.909.062	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	39.831.976.026	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	3.265.661.506	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	182.309.372	Dinas Koperasi Dan UMKM
		Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	5.894.787.595	Dinas Koperasi Dan UMKM
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	1.344.875.472	Dinas Koperasi Dan UMKM
		Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	234.655.474	Dinas Koperasi Dan UMKM
		Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	382.709.255	Dinas Koperasi Dan UMKM
		Program Pengembangan UMKM	697.301.352	Dinas Koperasi Dan UMKM
		Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	233.768.787	Dinas Koperasi Dan UMKM

NO	PRIORITAS JAWA BARAT	PROGRAM	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	PD PENGAMPU
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan	13.710.892.076	Dinas Koperasi Dan UMKM
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	513.159.121	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
		Program Pengembangan Ekspor	1.144.758.271	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri	391.466.454	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
		Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	151.245.959	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	13.573.235.466	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	18.203.365.857	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	2.340.849.376	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
		Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	1.044.828.536	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	3.956.157.873	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
		Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	2.579.069.012	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian

NO	PRIORITAS JAWA BARAT	PROGRAM	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	PD PENGAMPU
4	Memperkuat transformasi birokrasi yang berorientasi terhadap pelayanan publik yang bermartabat, efektif, efisien, dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih, dan clear governance	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	35.080.781.028	Sekretariat Daerah
		Program Penunjang Urusan Pemerintah	148.327.586.304	Sekretariat Daerah
		Program Perekonomian Dan Pembangunan	9.675.497.585	Sekretariat Daerah
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	69.181.096.056	Sekretariat DPRD
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	109.456.480.366	Sekretariat DPRD
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	10.042.764.433	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	24.874.769.491	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah

NO	PRIORITAS JAWA BARAT	PROGRAM	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	PD PENGAMPU
		Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2.734.261.173	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
		Program Riset Dan Inovasi Daerah	3.463.362.738	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.337.561.520	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1.814.113.223.091	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	45.199.323.807	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	25.697.229.378	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

NO	PRIORITAS JAWA BARAT	PROGRAM	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	PD PENGAMPU
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	198.099.311.616	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	49.466.535.855	Inspektorat
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.944.575.728	Inspektorat
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	2.872.805.445	Inspektorat
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	136.266.900	Kecamatan Cibinong
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	37.197.675.235	Kecamatan Cibinong
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	50.236.682.034	Kecamatan Cibinong
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	1.788.141.884	Kecamatan Cibinong
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	335.776.187	Kecamatan Cibinong
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	90.252.462	Kecamatan Gunung Putri

NO	PRIORITAS JAWA BARAT	PROGRAM	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	PD PENGAMPU
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	486.488.536	Kecamatan Gunung Putri
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	258.114.303	Kecamatan Gunung Putri
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	15.994.772.047	Kecamatan Gunung Putri
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	954.722.446	Kecamatan Gunung Putri
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	39.360.600	Kecamatan Gunung Putri
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	131.058.295	Kecamatan Citeureup
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	5.436.890.254	Kecamatan Citeureup
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	417.286.248	Kecamatan Citeureup
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.748.306.250	Kecamatan Citeureup
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	663.820.488	Kecamatan Citeureup

NO	PRIORITAS JAWA BARAT	PROGRAM	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	PD PENGAMPU
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	17.938.946	Kecamatan Citeureup
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	195.646.413	Kecamatan Sukaraja
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	382.808.019	Kecamatan Sukaraja
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	299.612.839	Kecamatan Sukaraja
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.674.475.162	Kecamatan Sukaraja
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	1.222.907.597	Kecamatan Sukaraja
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	94.064.055	Kecamatan Sukaraja
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	81.164.800	Kecamatan Babakan Madang
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	432.836.778	Kecamatan Babakan Madang
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	462.817.452	Kecamatan Babakan Madang

NO	PRIORITAS JAWA BARAT	PROGRAM	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	PD PENGAMPU
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.648.591.683	Kecamatan Babakan Madang
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	637.078.515	Kecamatan Babakan Madang
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	91.526.550	Kecamatan Babakan Madang
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	68.740.289	Kecamatan Jonggol
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	413.225.153	Kecamatan Jonggol
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	371.669.355	Kecamatan Jonggol
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.911.992.522	Kecamatan Jonggol
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	1.167.720.427	Kecamatan Jonggol
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	28.745.415	Kecamatan Jonggol
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	70.040.584	Kecamatan Cileungsi

NO	PRIORITAS JAWA BARAT	PROGRAM	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	PD PENGAMPU
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	347.859.319	Kecamatan Cileungsi
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	220.582.358	Kecamatan Cileungsi
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.384.124.222	Kecamatan Cileungsi
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	647.414.003	Kecamatan Cileungsi
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	46.151.366	Kecamatan Cileungsi
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	123.000.825	Kecamatan Cariu
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	484.616.038	Kecamatan Cariu
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	374.654.307	Kecamatan Cariu
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.812.302.428	Kecamatan Cariu
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	395.996.473	Kecamatan Cariu

NO	PRIORITAS JAWA BARAT	PROGRAM	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	PD PENGAMPU
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	56.097.575	Kecamatan Cariu
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.584.831.898	Kecamatan Sukamakmur
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	770.013.520	Kecamatan Sukamakmur
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	337.977.446	Kecamatan Sukamakmur
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	88.920.140	Kecamatan Sukamakmur
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	68.365.701	Kecamatan Sukamakmur
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	264.842.790	Kecamatan Sukamakmur
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.600.500.754	Kecamatan Parung
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	992.783.150	Kecamatan Parung
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	347.856.859	Kecamatan Parung

NO	PRIORITAS JAWA BARAT	PROGRAM	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	PD PENGAMPU
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	78.797.900	Kecamatan Parung
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100.195.450	Kecamatan Parung
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	370.418.350	Kecamatan Parung
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.337.653.563	Kecamatan Gunung Sindur
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	582.835.730	Kecamatan Gunung Sindur
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	383.706.685	Kecamatan Gunung Sindur
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	134.698.750	Kecamatan Gunung Sindur
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	193.846.497	Kecamatan Gunung Sindur
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	496.808.254	Kecamatan Gunung Sindur
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	16.624.932.329	Kecamatan Kemang

NO	PRIORITAS JAWA BARAT	PROGRAM	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	PD PENGAMPU
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	1.473.675.966	Kecamatan Kemang
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	2.688.747.179	Kecamatan Kemang
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	217.491.878	Kecamatan Kemang
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	144.231.037	Kecamatan Kemang
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	535.278.609	Kecamatan Kemang
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.526.415.337	Kecamatan Bojonggede
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	667.433.881	Kecamatan Bojonggede
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	3.168.043.062	Kecamatan Bojonggede
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	99.415.240	Kecamatan Bojonggede
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	230.224.336	Kecamatan Bojonggede

NO	PRIORITAS JAWA BARAT	PROGRAM	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	PD PENGAMPU
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	367.235.894	Kecamatan Bojonggede
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.130.592.799	Kecamatan Leuwiliang
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	720.232.151	Kecamatan Leuwiliang
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	475.741.092	Kecamatan Leuwiliang
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	79.545.957	Kecamatan Leuwiliang
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	120.542.261	Kecamatan Leuwiliang
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	246.929.785	Kecamatan Leuwiliang
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	19.209.494.711	Kecamatan Ciampea
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	834.593.952	Kecamatan Ciampea
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	351.685.708	Kecamatan Ciampea

NO	PRIORITAS JAWA BARAT	PROGRAM	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	PD PENGAMPU
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	64.816.063	Kecamatan Ciampea
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	51.806.579	Kecamatan Ciampea
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	234.060.904	Kecamatan Ciampea
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.520.845.827	Kecamatan Cibungbulang
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	1.120.161.900	Kecamatan Cibungbulang
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	401.144.650	Kecamatan Cibungbulang
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	56.634.000	Kecamatan Cibungbulang
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	12.720.000	Kecamatan Cibungbulang
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	280.835.200	Kecamatan Cibungbulang
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.932.927.352	Kecamatan Pamijahan

NO	PRIORITAS JAWA BARAT	PROGRAM	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	PD PENGAMPU
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	532.857.500	Kecamatan Pamijahan
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	351.412.550	Kecamatan Pamijahan
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	13.612.500	Kecamatan Pamijahan
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	28.594.500	Kecamatan Pamijahan
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	323.301.175	Kecamatan Pamijahan
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.721.759.508	Kecamatan Rumpin
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	911.337.085	Kecamatan Rumpin
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	280.173.573	Kecamatan Rumpin
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	86.827.135	Kecamatan Rumpin
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	84.129.596	Kecamatan Rumpin

NO	PRIORITAS JAWA BARAT	PROGRAM	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	PD PENGAMPU
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	188.057.663	Kecamatan Rumpin
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.838.382.696	Kecamatan Jasinga
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	730.704.472	Kecamatan Jasinga
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	325.011.321	Kecamatan Jasinga
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	110.952.883	Kecamatan Jasinga
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	25.188.395	Kecamatan Jasinga
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	328.843.686	Kecamatan Jasinga
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	15.729.116.672	Kecamatan Parung Panjang
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	1.044.256.608	Kecamatan Parung Panjang
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	404.544.749	Kecamatan Parung Panjang

NO	PRIORITAS JAWA BARAT	PROGRAM	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	PD PENGAMPU
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	83.839.681	Kecamatan Parung Panjang
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	211.195.731	Kecamatan Parung Panjang
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	514.011.285	Kecamatan Parung Panjang
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.012.714.691	Kecamatan Nanggung
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	745.554.536	Kecamatan Nanggung
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	406.525.885	Kecamatan Nanggung
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	65.116.986	Kecamatan Nanggung
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	154.280.741	Kecamatan Nanggung
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	299.493.017	Kecamatan Nanggung
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.203.676.249	Kecamatan Cigudeg

NO	PRIORITAS JAWA BARAT	PROGRAM	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	PD PENGAMPU
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	1.208.318.199	Kecamatan Cigudeg
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	394.054.305	Kecamatan Cigudeg
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	218.179.558	Kecamatan Cigudeg
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	49.195.018	Kecamatan Cigudeg
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	493.833.382	Kecamatan Cigudeg
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.719.341.996	Kecamatan Tenjo
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	830.776.155	Kecamatan Tenjo
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	374.328.595	Kecamatan Tenjo
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	60.134.300	Kecamatan Tenjo
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	70.259.050	Kecamatan Tenjo

NO	PRIORITAS JAWA BARAT	PROGRAM	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	PD PENGAMPU
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	238.300.861	Kecamatan Tenjo
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.141.987.656	Kecamatan Ciawi
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	991.917.350	Kecamatan Ciawi
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	377.437.950	Kecamatan Ciawi
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	121.785.600	Kecamatan Ciawi
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	87.602.800	Kecamatan Ciawi
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	357.093.100	Kecamatan Ciawi
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.662.731.489	Kecamatan Cisarua
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	985.442.550	Kecamatan Cisarua
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	3.331.297.492	Kecamatan Cisarua

NO	PRIORITAS JAWA BARAT	PROGRAM	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	PD PENGAMPU
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	61.864.475	Kecamatan Cisarua
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	91.818.875	Kecamatan Cisarua
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	452.536.480	Kecamatan Cisarua
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.031.429.508	Kecamatan Megamendung
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	1.012.266.575	Kecamatan Megamendung
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	438.172.347	Kecamatan Megamendung
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	59.198.050	Kecamatan Megamendung
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	29.267.400	Kecamatan Megamendung
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	189.490.450	Kecamatan Megamendung
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.792.856.317	Kecamatan Caringin

NO	PRIORITAS JAWA BARAT	PROGRAM	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	PD PENGAMPU
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	752.349.838	Kecamatan Caringin
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	424.093.516	Kecamatan Caringin
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	139.171.614	Kecamatan Caringin
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	126.747.164	Kecamatan Caringin
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	431.261.471	Kecamatan Caringin
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.039.704.950	Kecamatan Cijeruk
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	954.705.229	Kecamatan Cijeruk
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	383.019.432	Kecamatan Cijeruk
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	143.967.554	Kecamatan Cijeruk
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	74.912.103	Kecamatan Cijeruk

NO	PRIORITAS JAWA BARAT	PROGRAM	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	PD PENGAMPU
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	439.081.302	Kecamatan Cijeruk
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.461.520.742	Kecamatan Ciomas
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	732.463.349	Kecamatan Ciomas
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	2.949.812.995	Kecamatan Ciomas
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	113.389.600	Kecamatan Ciomas
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	41.491.689	Kecamatan Ciomas
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	222.803.856	Kecamatan Ciomas
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.052.927.629	Kecamatan Dramaga
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	573.810.493	Kecamatan Dramaga
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	582.350.189	Kecamatan Dramaga

NO	PRIORITAS JAWA BARAT	PROGRAM	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	PD PENGAMPU
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	97.020.000	Kecamatan Dramaga
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	91.933.296	Kecamatan Dramaga
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	307.101.110	Kecamatan Dramaga
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.956.027.141	Kecamatan Tamansari
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	918.633.930	Kecamatan Tamansari
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	368.193.436	Kecamatan Tamansari
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	95.011.284	Kecamatan Tamansari
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	52.915.109	Kecamatan Tamansari
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	209.067.470	Kecamatan Tamansari
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.924.141.441	Kecamatan Klapanunggal

NO	PRIORITAS JAWA BARAT	PROGRAM	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	PD PENGAMPU
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	1.252.277.793	Kecamatan Klapanunggal
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	450.173.541	Kecamatan Klapanunggal
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	116.990.332	Kecamatan Klapanunggal
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	83.542.677	Kecamatan Klapanunggal
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	530.682.503	Kecamatan Klapanunggal
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.153.871.467	Kecamatan Ciseeng
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	1.098.579.461	Kecamatan Ciseeng
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	347.144.181	Kecamatan Ciseeng
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	102.867.562	Kecamatan Ciseeng
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	116.020.699	Kecamatan Ciseeng

NO	PRIORITAS JAWA BARAT	PROGRAM	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	PD PENGAMPU
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	289.922.384	Kecamatan Ciseeng
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.980.348.509	Kecamatan Rancabungur
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	742.229.107	Kecamatan Rancabungur
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	372.677.473	Kecamatan Rancabungur
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	114.272.331	Kecamatan Rancabungur
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	46.709.928	Kecamatan Rancabungur
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	269.916.747	Kecamatan Rancabungur
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.108.647.522	Kecamatan Sukajaya
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	968.529.832	Kecamatan Sukajaya
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	510.433.450	Kecamatan Sukajaya

NO	PRIORITAS JAWA BARAT	PROGRAM	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	PD PENGAMPU
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	120.225.350	Kecamatan Sukajaya
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	212.621.780	Kecamatan Sukajaya
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	528.601.050	Kecamatan Sukajaya
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.157.075.106	Kecamatan Tanjungsari
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	746.891.312	Kecamatan Tanjungsari
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	403.051.619	Kecamatan Tanjungsari
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	132.149.194	Kecamatan Tanjungsari
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	268.749.234	Kecamatan Tanjungsari
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	349.730.811	Kecamatan Tanjungsari
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	17.095.960.041	Kecamatan Tajurhalang

NO	PRIORITAS JAWA BARAT	PROGRAM	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	PD PENGAMPU
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	1.216.431.074	Kecamatan Tajurhalang
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	524.028.474	Kecamatan Tajurhalang
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	130.036.884	Kecamatan Tajurhalang
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	111.767.878	Kecamatan Tajurhalang
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	494.109.964	Kecamatan Tajurhalang
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	16.716.209.448	Kecamatan Cigombong
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	1.000.956.676	Kecamatan Cigombong
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	444.022.684	Kecamatan Cigombong
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	149.984.974	Kecamatan Cigombong
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	190.416.283	Kecamatan Cigombong

NO	PRIORITAS JAWA BARAT	PROGRAM	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	PD PENGAMPU
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	604.253.918	Kecamatan Cigombong
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.405.095.609	Kecamatan Leuwisadeng
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	646.822.796	Kecamatan Leuwisadeng
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	421.342.554	Kecamatan Leuwisadeng
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	146.082.867	Kecamatan Leuwisadeng
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	45.661.245	Kecamatan Leuwisadeng
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	310.698.079	Kecamatan Leuwisadeng
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.918.123.670	Kecamatan Tenjolaya
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	767.963.908	Kecamatan Tenjolaya
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	350.947.546	Kecamatan Tenjolaya

NO	PRIORITAS JAWA BARAT	PROGRAM	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	PD PENGAMPU
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	85.001.114	Kecamatan Tenjolaya
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	109.410.183	Kecamatan Tenjolaya
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	449.578.391	Kecamatan Tenjolaya

Sumber : Data SIPD, 2025, diolah

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2025 berisi uraian program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan maupun yang tidak mengalami perubahan.

Perubahan RKPD Tahun 2025 disusun berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Surat edaran ini mengamanatkan bahwa pasca pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2025 yang menghasilkan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, pemerintah daerah diminta untuk memastikan kesesuaian penyelenggaraan pembangunan daerah dengan visi, misi dan program kepala daerah terpilih serta menyinergikan program asta cita presiden dan wakil presiden ke dalam perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya Pasal 343 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menyebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Perubahan RKPD Kabupaten Bogor Tahun 2025 diantaranya mengakomodir kegiatan-kegiatan yang merupakan pelaksanaan program kerja Presiden dan Wakil Presiden serta Bupati dan Wakil Bupati terpilih, kegiatan yang bersumber dari dana non APBD Kabupaten Bogor yang belum tercantum dalam dokumen sebelumnya, baik dari anggaran pusat, anggaran Provinsi Jawa Barat, serta dana transfer lainnya. Selain itu, diakomodir pula penyesuaian-penyesuaian kinerja, baik target dan indikator, serta perubahan

target anggaran yang belum tertampung pada RKPD tahun 2025 sebagai akibat adanya perubahan penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan kebutuhan belanja pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan di seluruh perangkat daerah, jumlah anggaran yang dibutuhkan adalah sebesar Rp12.294.531.852.015 (Dua Belas Triliun Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Lima Belas Rupiah). Kebutuhan anggaran ini mengalami peningkatan sebesar Rp850.191.071.993 (Delapan Ratus Lima Puluh Miliar Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah).

Rekapitulasi jumlah anggaran setiap Perangkat Daerah sebelum dan sesudah perubahan pada Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana tercantum pada Tabel 5.1 berikut.

Tabel 5.1
Rekapitulasi Anggaran Sebelum dan Sesudah Perubahan pada Perubahan RKPD Kabupaten Bogor Tahun 2025

NO	PERANGKAT DAERAH	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERKURANG/ BERTAMBAH
1	DINAS PENDIDIKAN	2.803.688.273.602	3.127.724.474.274	324.036.200.672
2	DINAS KESEHATAN	2.511.731.212.973	2.828.378.063.754	316.646.850.781
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	591.682.641.761	938.167.335.582	346.484.693.821
4	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	393.968.957.826	450.696.097.828	56.727.140.002
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	54.829.642.064	52.960.308.568	- 1.869.333.496
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	26.972.119.793	25.372.119.793	- 1.600.000.000
7	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	43.586.213.709	40.715.594.763	- 2.870.618.946
8	DINAS SOSIAL	51.539.750.612	46.845.600.598	- 4.694.150.014
9	DINAS TENAGA KERJA	24.363.657.823	25.232.593.384	868.935.561
10	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	25.070.628.734	55.555.873.609	30.485.244.875
11	DINAS KETAHANAN PANGAN	30.920.819.944	29.556.019.711	- 1.364.800.233
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	216.913.030.477	212.684.312.888	- 4.228.717.589
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	80.752.567.175	62.960.508.811	- 17.792.058.364
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	120.327.630.624	156.626.801.632	36.299.171.008
15	DINAS PERHUBUNGAN	178.734.545.855	189.090.158.493	10.355.612.638

NO	PERANGKAT DAERAH	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERKURANG/ BERTAMBAH
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	86.289.066.248	90.079.183.843	3.790.117.595
17	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	24.540.363.778	22.681.299.383	- 1.859.064.395
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	46.421.063.837	43.054.096.554	- 3.366.967.283
19	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	272.852.956.837	217.679.321.811	- 55.173.635.026
20	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	38.728.235.056	41.845.115.822	3.116.880.766
21	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	15.343.443.572	13.125.006.142	- 2.218.437.430
22	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN	76.351.227.570	86.441.809.877	10.090.582.307
23	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	113.319.140.329	91.479.188.457	- 21.839.951.872
24	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	52.050.176.391	43.898.135.925	- 8.152.040.466
25	SEKRETARIAT DAERAH	175.673.554.380	193.083.864.917	17.410.310.537
26	SEKRETARIAT DPRD	217.667.410.548	178.637.576.422	- 39.029.834.126
27	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	45.316.421.017	41.115.157.835	- 4.201.263.182
28	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1.948.754.549.792	1.861.650.108.418	- 87.104.441.374
29	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	237.069.255.992	223.796.540.994	- 13.272.714.998
30	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	281.719.137.723	265.715.973.873	- 16.003.163.850
31	INSPEKTORAT	56.054.294.990	54.283.917.028	- 1.770.377.962
32	KECAMATAN CIBINONG	89.587.042.240	89.694.542.240	107.500.000
33	KECAMATAN GUNUNG PUTRI	17.723.710.394	17.823.710.394	100.000.000
34	KECAMATAN CITEUREUP	14.305.300.481	14.415.300.481	110.000.000
35	KECAMATAN SUKARAJA	8.762.014.085	8.869.514.085	107.500.000
36	KECAMATAN BABAKAN MADANG	6.256.515.778	6.354.015.778	97.500.000
37	KECAMATAN JONGGOL	7.852.093.161	7.962.093.161	110.000.000
38	KECAMATAN CILEUNGS	6.611.171.852	6.716.171.852	105.000.000
39	KECAMATAN CARIU	6.146.667.646	6.246.667.646	100.000.000
40	KECAMATAN SUKAMAKMUR	9.014.951.495	9.114.951.495	100.000.000
41	KECAMATAN PARUNG	7.393.052.463	7.490.552.463	97.500.000

NO	PERANGKAT DAERAH	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERKURANG/ BERTAMBAH
42	KECAMATAN GUNUNG SINDUR	7.029.549.479	7.129.549.479	100.000.000
43	KECAMATAN KEMANG	21.586.856.998	21.684.356.998	97.500.000
44	KECAMATAN BOJONGGEDE	11.961.267.750	12.058.767.750	97.500.000
45	KECAMATAN LEUWILIANG	10.507.509.045	10.773.584.045	266.075.000
46	KECAMATAN CIAMPEA	20.638.957.917	20.746.457.917	107.500.000
47	KECAMATAN CIBUNGBULANG	7.279.841.577	7.392.341.577	112.500.000
48	KECAMATAN PAMIJAHAN	6.070.205.577	6.182.705.577	112.500.000
49	KECAMATAN RUMPIN	6.305.581.100	7.272.284.560	966.703.460
50	KECAMATAN JASINGA	8.194.083.453	8.359.083.453	165.000.000
51	KECAMATAN PARUNG PANJANG	17.834.464.726	17.986.964.726	152.500.000
52	KECAMATAN NANGGUNG	7.531.185.856	7.683.685.856	152.500.000
53	KECAMATAN CIGUDEG	9.404.756.711	9.567.256.711	162.500.000
54	KECAMATAN TENJO	6.145.640.957	6.293.140.957	147.500.000
55	KECAMATAN CIAWI	6.970.324.456	7.077.824.456	107.500.000
56	KECAMATAN CISARUA	12.485.691.361	12.585.691.361	100.000.000
57	KECAMATAN MEGAMENDUNG	6.654.824.330	6.759.824.330	105.000.000
58	KECAMATAN CARINGIN	7.561.479.920	7.666.479.920	105.000.000
59	KECAMATAN CIJERUK	6.937.890.570	7.035.390.570	97.500.000
60	KECAMATAN CIOMAS	11.418.982.231	11.521.482.231	102.500.000
61	KECAMATAN DRAMAGA	6.605.142.717	6.705.142.717	100.000.000
62	KECAMATAN TAMANSARI	7.504.848.370	7.599.848.370	95.000.000
63	KECAMATAN KLAPANUNGGAL	8.260.308.287	8.357.808.287	97.500.000
64	KECAMATAN CISEENG	8.008.405.754	8.108.405.754	100.000.000
65	KECAMATAN RANCABUNGUR	6.433.654.095	6.526.154.095	92.500.000
66	KECAMATAN SUKAJAYA	9.296.558.984	9.449.058.984	152.500.000
67	KECAMATAN TANJUNGSARI	6.507.255.202	7.057.647.276	550.392.074
68	KECAMATAN TAJURHALANG	19.479.834.315	19.572.334.315	92.500.000
69	KECAMATAN CIGOMBONG	19.815.047.443	19.105.843.983	- 709.203.460
70	KECAMATAN LEUWISADENG	6.830.703.150	6.975.703.150	145.000.000
71	KECAMATAN TENJOLAYA	7.588.524.812	7.681.024.812	92.500.000
72	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	128.606.892.252	105.796.327.214	- 22.810.565.038
	TOTAL	11.444.340.780.022	12.294.531.852.015	850.191.071.993

Sumber : Data diolah, 2025

Jika ditinjau dari perubahan kebutuhan belanja per urusan, perubahan RKPD Tahun 2025 mengakomodir:

1. Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar;

2. Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar;
3. Urusan Pilihan;
4. Unsur Pendukung;
5. Unsur Penunjang;
6. Unsur Pengawasan;
7. Unsur Kewilayahan; dan
8. Unsur Pemerintahan Umum.

Adapun jumlah belanja per urusan dan unsur pada perubahan RKPD Kabupaten Bogor Tahun 2025 sebagaimana tercantum pada Tabel 5.2.

Tabel 5.2
Jumlah Belanja Per-Urusan dan Unsur
Pada Perubahan RKPD Kabupaten Bogor Tahun 2025

	PERANGKAT DAERAH	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERKURANG/ BERTAMBAH
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6.474.371.901.467	7.508.006.683.382	1.033.634.781.915
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.151.485.729.093	1.152.362.186.474	876.457.381
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	255.119.736.030	232.480.151.646	- 22.639.584.384
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	393.340.964.928	371.721.441.339	- 21.619.523.589
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	2.512.859.364.524	2.392.277.781.120	- 120.581.583.404
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	59.389.485.597	57.619.107.635	- 1.770.377.962
7	UNSUR KEWILAYAHAN	469.166.706.131	474.268.173.205	5.101.467.074
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	128.606.892.252	105.796.327.214	- 22.810.565.038
	TOTAL	11.444.340.780.022	12.294.531.852.015	850.191.071.993

Sumber : Data diolah, 2025

Belanja per urusan pada Perubahan RKPD Kabupaten Bogor Tahun 2025, dijelaskan sebagai berikut :

1. Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar meningkat sebesar Rp1.033.634.781.915 (Satu Triliun Tiga Puluh Tiga Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Lima Belas Rupiah) dari sebelum perubahan.
2. Urusan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar meningkat sebesar Rp876.457.381 (Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah) dari sebelum perubahan.

3. Urusan Pilihan menurun sebesar Rp22.639.584.384 (Dua Puluh Dua Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah) dari Sebelum perubahan.
4. Unsur Pendukung menurun sebesar Rp21.619.523.589 (Dua Puluh Satu Miliar Enam Ratus Sembilan Belas Juta Lima Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah) dari sebelum perubahan.
5. Unsur Penunjang menurun sebesar Rp120.581.583.404 (Seratus Dua Puluh Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Satu Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Empat Rupiah) dari sebelum perubahan.
6. Unsur Pengawasan menurun sebesar Rp1.770.377.962 (Satu Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Rupiah) dari sebelum perubahan.
7. Unsur Kewilayahan, meningkat sebesar Rp5.101.467.074 (Lima Miliar Seratus Satu Juta Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Tujuh Puluh Empat Rupiah) dari sebelum perubahan.
8. Unsur Pemerintahan Umum menurun sebesar Rp22.810.565.038 (Dua Puluh Dua Miliar Delapan Ratus Sepuluh Juta Lima Ratus Enam Puluh Lima Ribu Tiga Puluh Delapan Rupiah) dari sebelum perubahan.

Adapun jumlah belanja berdasarkan program perangkat daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2025 disajikan pada Tabel 5.3 sebagai berikut:

Tabel 5.3
Program Perangkat Daerah
pada Perubahan RKPD Tahun 2025

KODE REKENING	PROGRAM	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERKURANG/ BERTAMBAH	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.575.121.375.295	1.739.938.149.593	164.816.774.298	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.227.516.998.633	1.387.559.539.147	160.042.540.514	DINAS PENDIDIKAN
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	699.900.000	49.200.000	- 650.700.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	349.999.674	177.585.534	- 172.414.140	DINAS PENDIDIKAN
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.541.535.519.154	1.532.196.213.943	- 9.339.305.211	DINAS KESEHATAN
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	967.646.160.500	1.289.989.712.077	322.343.551.577	DINAS KESEHATAN
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.965.586.669	5.021.401.934	3.055.815.265	DINAS KESEHATAN
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	94.205.400	80.555.900	- 13.649.500	DINAS KESEHATAN

KODE REKENING	PROGRAM	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERKURANG/ BERTAMBAH	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	489.741.250	1.090.179.900	600.438.650	DINAS KESEHATAN
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	74.696.765.412	85.070.786.142	10.374.020.730	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	67.452.010.942	67.070.768.134	- 381.242.808	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	33.453.634.612	52.019.580.203	18.565.945.591	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	26.706.209.439	42.922.397.697	16.216.188.258	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	36.890.904.988	31.204.563.235	- 5.686.341.753	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	237.130.729.779	246.753.391.670	9.622.661.891	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	3.423.152.232	7.817.410.609	4.394.258.377	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	343.100.228.978	653.007.664.353	309.907.435.375	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	5.000.000.000	6.811.994.000	1.811.994.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	3.813.667.855	2.798.750.855	- 1.014.917.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE REKENING	PROGRAM	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERKURANG/ BERTAMBAH	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	5.569.219.535	4.072.824.963	- 1.496.394.572	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	32.902.437.350	51.556.760.976	18.654.323.626	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	77.543.769.667	76.457.887.917	- 1.085.881.750	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	10.839.834.142	15.528.692.492	4.688.858.350	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	-	-	-	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	23.502.123.783	42.917.048.386	19.414.924.603	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.221.219.842	15.829.494.740	- 391.725.102	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.940.547.043	15.099.523.387	- 1.841.023.656	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	44.944.536.413	44.471.207.185	- 473.329.228	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	9.885.105.651	8.489.101.383	- 1.396.004.268	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KODE REKENING	PROGRAM	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERKURANG/ BERTAMBAH	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	10.750.899.951	9.542.625.053	- 1.208.274.898	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	26.645.666.666	25.616.071.376	- 1.029.595.290	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	24.731.927.411	22.517.190.298	- 2.214.737.113	DINAS SOSIAL
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	8.363.819.901	8.110.063.576	- 253.756.325	DINAS SOSIAL
1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	10.040.000	1.480.000	- 8.560.000	DINAS SOSIAL
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	11.966.259.225	10.905.502.225	- 1.060.757.000	DINAS SOSIAL
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	2.440.990.850	1.458.407.100	- 982.583.750	DINAS SOSIAL
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	3.428.758.600	3.054.311.100	- 374.447.500	DINAS SOSIAL
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	597.954.625	798.646.299	200.691.674	DINAS SOSIAL
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.302.440.425	18.572.082.378	1.269.641.953	DINAS TENAGA KERJA

KODE REKENING	PROGRAM	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERKURANG/ BERTAMBAH	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	203.142.800	158.432.800	- 44.710.000	DINAS TENAGA KERJA
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	3.334.910.989	4.197.621.662	862.710.673	DINAS TENAGA KERJA
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	1.646.788.046	1.130.281.430	- 516.506.616	DINAS TENAGA KERJA
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	1.747.856.720	1.108.872.489	- 638.984.231	DINAS TENAGA KERJA
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	817.850.754	677.177.274	- 140.673.480	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	443.478.984	333.390.685	- 110.088.299	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	319.128.709	220.241.110	- 98.887.599	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	136.822.334	97.368.557	- 39.453.777	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KODE REKENING	PROGRAM	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERKURANG/ BERTAMBAH	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	288.527.184	182.230.634	- 106.296.550	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	1.509.534.069	1.303.565.014	- 205.969.055	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.847.639.526	14.376.614.515	- 471.025.011	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	3.902.007.393	3.797.057.736	- 104.949.657	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	8.633.713.818	8.725.761.226	92.047.408	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	906.905.974	597.319.113	- 309.586.861	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	2.630.553.233	2.059.267.121	- 571.286.112	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	746.298.511	536.407.111	- 209.891.400	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

KODE REKENING	PROGRAM	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERKURANG/ BERTAMBAH	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6
2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	470.154.345	449.038.650	- 21.115.695	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2.10.08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	191.524.754	174.399.754	- 17.125.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	2.218.933.263	1.693.066.263	- 525.867.000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	41.667.138.522	39.831.976.026	- 1.835.162.496	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	4.583.303.506	3.265.661.506	- 1.317.642.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	9.170.945.900	8.963.001.492	- 207.944.408	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	3.136.958.855	2.810.001.679	- 326.957.176	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	1.250.951.465	839.046.135	- 411.905.330	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KODE REKENING	PROGRAM	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERKURANG/ BERTAMBAH	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	1.470.839.996	1.144.338.333	- 326.501.663	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	4.202.697.808	4.400.909.062	198.211.254	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	1.006.385.950	1.729.905.835	723.519.885	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	1.723.225.034	1.377.001.403	- 346.223.631	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	148.700.583.441	148.322.471.417	- 378.112.024	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	53.022.809.998	39.555.618.052	- 13.467.191.946	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	19.513.650.783	16.668.195.174	- 2.845.455.609	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	4.434.735.042	3.815.717.183	- 619.017.859	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	3.724.035.102	2.868.993.652	- 855.041.450	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KODE REKENING	PROGRAM	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERKURANG/ BERTAMBAH	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	57.336.250	51.984.750	- 5.351.500	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.187.712.939	14.476.427.318	- 711.285.621	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	78.376.445.118	104.242.670.890	25.866.225.772	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	457.594.593	248.744.593	- 208.850.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	19.341.174.802	16.503.429.745	- 2.837.745.057	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	6.964.703.172	21.155.529.086	14.190.825.914	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.137.106.539	15.920.510.446	- 216.596.093	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	280.180.252	992.034.178	711.853.926	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KODE REKENING	PROGRAM	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERKURANG/ BERTAMBAH	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	3.883.075.255	9.612.330.868	5.729.255.613	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1.254.924.654	26.217.024.843	24.962.100.189	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	55.724.500.584	54.109.125.078	- 1.615.375.506	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	122.627.863.514	134.710.278.815	12.082.415.301	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.05	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	382.181.757	270.754.600	- 111.427.157	DINAS PERHUBUNGAN
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	22.875.152.078	16.486.125.108	- 6.389.026.970	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	16.359.248.619	26.519.069.481	10.159.820.862	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	41.818.330.620	43.832.564.229	2.014.233.609	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.180.483.927	13.710.892.076	530.408.149	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

KODE REKENING	PROGRAM	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERKURANG/ BERTAMBAH	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6
2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	260.006.112	182.309.372	- 77.696.740	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	666.706.834	382.709.255	- 283.997.579	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	365.740.524	233.768.787	- 131.971.737	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	234.655.474	234.655.474	-	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	5.707.279.605	5.894.787.595	187.507.990	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	3.050.107.950	1.344.875.472	- 1.705.232.478	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	1.075.383.352	697.301.352	- 378.082.000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	39.162.318.007	37.001.316.038	- 2.161.001.969	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	621.033.189	497.668.964	- 123.364.225	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	1.081.442.658	719.599.623	- 361.843.035	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	3.650.319.219	3.282.938.563	- 367.380.656	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KODE REKENING	PROGRAM	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERKURANG/ BERTAMBAH	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	812.833.505	744.149.910	- 68.683.595	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	1.093.117.259	808.423.456	- 284.693.803	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	65.899.704.848	76.780.731.908	10.881.027.060	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	20.908.242.294	15.428.127.115	- 5.480.115.179	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAAGAN	182.521.385.340	122.622.854.965	- 59.898.530.375	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	3.523.624.355	2.847.607.823	- 676.016.532	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	1.351.352.995	737.085.539	- 614.267.456	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	3.884.981.936	2.504.339.486	- 1.380.642.450	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.014.341.177	16.448.794.272	- 565.546.905	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	4.221.486.975	7.493.768.025	3.272.281.050	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	2.275.559.432	1.725.259.738	- 550.299.694	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

KODE REKENING	PROGRAM	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERKURANG/ BERTAMBAH	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	1.946.174.575	5.581.579.025	3.635.404.450	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	1.192.115.739	893.552.739	- 298.563.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	6.350.000	4.310.000	- 2.040.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
2.24.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.928.647.976	10.645.810.611	- 1.282.837.365	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	2.009.193.392	1.448.441.327	- 560.752.065	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	207.136.465	132.891.465	- 74.245.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	29.167.674.916	28.403.844.807	- 763.830.109	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	521.228.616	541.111.291	19.882.675	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	12.497.379.575	12.358.237.976	- 139.141.599	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	319.879.167	216.181.192	- 103.697.975	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	6.411.992.351	7.876.401.750	1.464.409.399	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN

KODE REKENING	PROGRAM	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERKURANG/ BERTAMBAH	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.020.172.434	1.920.146.609	- 1.100.025.825	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	6.315.195.269	5.295.723.714	- 1.019.471.555	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	1.824.725.925	1.513.820.925	- 310.905.000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	2.110.579.269	1.866.023.514	- 244.555.755	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	49.923.877.523	50.427.158.742	503.281.219	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	8.389.481.805	6.879.404.244	- 1.510.077.561	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	43.272.515.162	24.232.519.914	- 19.039.995.248	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	15.586.173.853	27.290.647.172	11.704.473.319	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	5.409.185.412	6.593.048.696	1.183.863.284	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

KODE REKENING	PROGRAM	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERKURANG/ BERTAMBAH	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	2.076.472.429	1.831.750.084	- 244.722.345	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	2.545.410.304	1.435.251.171	- 1.110.159.133	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	92.251.271	40.052.671	- 52.198.600	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	3.014.022.958	1.770.735.568	- 1.243.287.390	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1.288.693.587	1.004.178.690	- 284.514.897	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	9.154.128.970	7.020.474.366	- 2.133.654.604	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	19.756.377.172	18.203.365.857	- 1.553.011.315	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	1.519.333.254	1.044.828.536	- 474.504.718	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	18.058.326.297	13.573.235.466	- 4.485.090.831	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	3.343.835.882	3.956.157.873	612.321.991	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

KODE REKENING	PROGRAM	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERKURANG/ BERTAMBAH	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	1.826.750.896	1.144.758.271	- 681.992.625	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	2.195.307.764	2.579.069.012	383.761.248	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	252.880.109	151.245.959	- 101.634.150	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.583.417.638	2.340.849.376	- 1.242.568.262	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	650.723.408	391.466.454	- 259.256.954	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	863.223.971	513.159.121	- 350.064.850	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	128.518.843	65.302.625	- 63.216.218	DINAS TENAGA KERJA
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	128.142.303.113	148.327.586.304	20.185.283.191	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	36.945.731.104	35.080.781.028	- 1.864.950.076	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	10.585.520.163	9.675.497.585	- 910.022.578	SEKRETARIAT DAERAH
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	115.898.678.721	109.456.480.366	- 6.442.198.355	SEKRETARIAT DPRD

KODE REKENING	PROGRAM	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERKURANG/ BERTAMBAH	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	101.768.731.827	69.181.096.056	- 32.587.635.771	SEKRETARIAT DPRD
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	26.501.844.795	24.874.769.491	- 1.627.075.304	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	4.130.069.791	2.734.261.173	- 1.395.808.618	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	11.947.785.773	10.042.764.433	- 1.905.021.340	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	47.377.212.921	45.199.323.807	- 2.177.889.114	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	206.706.143.668	198.099.311.616	- 8.606.832.052	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1.898.513.188.365	1.814.113.223.091	- 84.399.965.274	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	2.864.148.506	2.337.561.520	- 526.586.986	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	30.363.112.324	25.697.229.378	- 4.665.882.946	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

KODE REKENING	PROGRAM	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERKURANG/ BERTAMBAH	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	252.112.336.518	243.159.259.023	- 8.953.077.495	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	15.498.878.405	12.920.575.500	- 2.578.302.905	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	14.107.922.800	9.636.139.350	- 4.471.783.450	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.05.03	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	2.736.720.658	3.463.362.738	726.642.080	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	52.455.258.817	49.466.535.855	- 2.988.722.962	INSPEKTORAT
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.335.190.607	3.335.190.607	-	KECAMATAN CARIU
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	2.427.275.728	1.944.575.728	- 482.700.000	INSPEKTORAT
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1.171.760.445	2.872.805.445	1.701.045.000	INSPEKTORAT
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.693.581.283	4.648.591.683	- 44.989.600	KECAMATAN BABAKAN MADANG

KODE REKENING	PROGRAM	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERKURANG/ BERTAMBAH	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.469.657.731	7.526.415.337	56.757.606	KECAMATAN BOJONGGEDE
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.730.279.996	5.792.856.317	62.576.321	KECAMATAN CARINGIN
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.471.572.321	1.477.111.821	5.539.500	KECAMATAN CARIU
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	19.254.521.075	19.209.494.711	- 45.026.364	KECAMATAN CIAMPEA
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.029.467.656	5.141.987.656	112.520.000	KECAMATAN CIAWI
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	49.905.376.132	50.236.682.034	331.305.902	KECAMATAN CIBINONG
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.539.151.527	5.520.845.827	- 18.305.700	KECAMATAN CIBUNGBULANG
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.514.945.754	16.716.209.448	- 798.736.306	KECAMATAN CIGOMBONG

KODE REKENING	PROGRAM	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERKURANG/ BERTAMBAH	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.234.873.144	7.203.676.249	- 31.196.895	KECAMATAN CIGUDEG
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.108.510.737	5.039.704.950	- 68.805.787	KECAMATAN CIJERUK
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.335.389.007	5.384.124.222	48.735.215	KECAMATAN CILEUNGI
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.396.986.445	7.461.520.742	64.534.297	KECAMATAN CIOMAS
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.653.205.276	7.662.731.489	9.526.213	KECAMATAN CISARUA
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.050.481.667	6.153.871.467	103.389.800	KECAMATAN CISEENG
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.644.076.250	7.748.306.250	104.230.000	KECAMATAN CITEUREUP
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.964.936.879	5.052.927.629	87.990.750	KECAMATAN DRAMAGA

KODE REKENING	PROGRAM	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERKURANG/ BERTAMBAH	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.085.477.496	15.994.772.047	- 90.705.449	KECAMATAN GUNUNG PUTRI
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.234.217.427	5.337.653.563	103.436.136	KECAMATAN GUNUNG SINDUR
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.664.427.696	6.838.382.696	173.955.000	KECAMATAN JASINGA
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.853.938.097	5.911.992.522	58.054.425	KECAMATAN JONGGOL
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.723.920.966	16.624.932.329	- 98.988.637	KECAMATAN KEMANG
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.739.696.175	5.924.141.441	184.445.266	KECAMATAN KLAPANUNGGAL
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.000.772.692	9.130.592.799	129.820.107	KECAMATAN LEUWILIANG
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.360.861.940	5.405.095.609	44.233.669	KECAMATAN LEUWISADENG

KODE REKENING	PROGRAM	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERKURANG/ BERTAMBAH	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.006.939.508	5.031.429.508	24.490.000	KECAMATAN MEGAMENDUNG
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.038.304.521	6.012.714.691	- 25.589.830	KECAMATAN NANGGUNG
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.059.973.793	4.932.927.352	- 127.046.441	KECAMATAN PAMIJAHAN
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.557.032.913	5.600.500.754	43.467.841	KECAMATAN PARUNG
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.734.540.916	15.729.116.672	- 5.424.244	KECAMATAN PARUNG PANJANG
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.999.112.003	4.980.348.509	- 18.763.494	KECAMATAN RANCABUNGUR
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.769.655.989	5.721.759.508	952.103.519	KECAMATAN RUMPIN
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.135.013.472	7.108.647.522	- 26.365.950	KECAMATAN SUKAJAYA

KODE REKENING	PROGRAM	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERKURANG/ BERTAMBAH	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.599.067.326	7.584.831.898	- 14.235.428	KECAMATAN SUKAMAKMUR
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.977.448.587	6.674.475.162	- 302.973.425	KECAMATAN SUKARAJA
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.154.228.807	17.095.960.041	- 58.268.766	KECAMATAN TAJURHALANG
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.897.711.891	5.956.027.141	58.315.250	KECAMATAN TAMANSARI
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.778.551.607	5.157.075.106	378.523.499	KECAMATAN TANJUNGSARI
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.687.968.606	4.719.341.996	31.373.390	KECAMATAN TENJO
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.820.186.261	5.918.123.670	97.937.409	KECAMATAN TENJOLAYA
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	529.637.665	637.078.515	107.440.850	KECAMATAN BABAKAN MADANG

KODE REKENING	PROGRAM	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERKURANG/ BERTAMBAH	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	588.878.387	667.433.881	78.555.494	KECAMATAN BOJONGGEDE
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	761.414.838	752.349.838	- 9.065.000	KECAMATAN CARINGIN
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	407.236.459	395.996.473	- 11.239.986	KECAMATAN CARIU
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	774.553.952	834.593.952	60.040.000	KECAMATAN CIAMPEA
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	980.937.350	991.917.350	10.980.000	KECAMATAN CIAWI
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.874.528.184	1.788.141.884	- 86.386.300	KECAMATAN CIBINONG
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.065.901.900	1.120.161.900	54.260.000	KECAMATAN CIBUNGBULANG
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	905.355.618	1.000.956.676	95.601.058	KECAMATAN CIGOMBONG

KODE REKENING	PROGRAM	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERKURANG/ BERTAMBAH	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.130.847.304	1.208.318.199	77.470.895	KECAMATAN CIGUDEG
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	902.145.229	954.705.229	52.560.000	KECAMATAN CIJERUK
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	553.774.003	647.414.003	93.640.000	KECAMATAN CILEUNGI
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	701.212.999	732.463.349	31.250.350	KECAMATAN CIOMAS
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	934.822.550	985.442.550	50.620.000	KECAMATAN CISARUA
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.097.257.029	1.098.579.461	1.322.432	KECAMATAN CISEENG
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	585.520.488	663.820.488	78.300.000	KECAMATAN CITEUREUP
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	508.868.743	573.810.493	64.941.750	KECAMATAN DRAMAGA

KODE REKENING	PROGRAM	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERKURANG/ BERTAMBAH	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	762.396.936	954.722.446	192.325.510	KECAMATAN GUNUNG PUTRI
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	523.491.866	582.835.730	59.343.864	KECAMATAN GUNUNG SINDUR
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	637.896.322	730.704.472	92.808.150	KECAMATAN JASINGA
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.098.715.427	1.167.720.427	69.005.000	KECAMATAN JONGGOL
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.427.394.466	1.473.675.966	46.281.500	KECAMATAN KEMANG
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.291.543.373	1.252.277.793	- 39.265.580	KECAMATAN KLAPANUNGGAL
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	621.642.151	720.232.151	98.590.000	KECAMATAN LEUWILIANG
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	550.632.796	646.822.796	96.190.000	KECAMATAN LEUWISADENG

KODE REKENING	PROGRAM	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERKURANG/ BERTAMBAH	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	862.266.025	1.012.266.575	150.000.550	KECAMATAN MEGAMENDUNG
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	607.337.206	745.554.536	138.217.330	KECAMATAN NANGGUNG
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	442.207.500	532.857.500	90.650.000	KECAMATAN PAMIJAHAN
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	980.498.150	992.783.150	12.285.000	KECAMATAN PARUNG
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	959.801.833	1.044.256.608	84.454.775	KECAMATAN PARUNG PANJANG
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	601.545.613	742.229.107	140.683.494	KECAMATAN RANCABUNGUR
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	823.986.549	911.337.085	87.350.536	KECAMATAN RUMPIN
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	841.258.882	968.529.832	127.270.950	KECAMATAN SUKAJAYA

KODE REKENING	PROGRAM	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERKURANG/ BERTAMBAH	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	538.298.538	770.013.520	231.714.982	KECAMATAN SUKAMAKMUR
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	988.824.798	1.222.907.597	234.082.799	KECAMATAN SUKARAJA
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.124.309.419	1.216.431.074	92.121.655	KECAMATAN TAJURHALANG
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	881.683.930	918.633.930	36.950.000	KECAMATAN TAMANSARI
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	652.623.562	746.891.312	94.267.750	KECAMATAN TANJUNGSARI
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	676.281.080	830.776.155	154.495.075	KECAMATAN TENJO
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	757.410.441	767.963.908	10.553.467	KECAMATAN TENJOLAYA
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	434.778.528	432.836.778	- 1.941.750	KECAMATAN BABAKAN MADANG
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3.160.856.162	3.168.043.062	7.186.900	KECAMATAN BOJONGGEDE

KODE REKENING	PROGRAM	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERKURANG/ BERTAMBAH	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	447.362.885	424.093.516	- 23.269.369	KECAMATAN CARINGIN
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	291.087.325	484.616.038	193.528.713	KECAMATAN CARIU
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	360.598.781	351.685.708	- 8.913.073	KECAMATAN CIAMPEA
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	419.987.950	377.437.950	- 42.550.000	KECAMATAN CIAWI
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	37.245.302.337	37.197.675.235	- 47.627.102	KECAMATAN CIBINONG
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	412.084.650	401.144.650	- 10.940.000	KECAMATAN CIBUNGBULANG
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	442.415.875	444.022.684	1.606.809	KECAMATAN CIGOMBONG
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	405.784.305	394.054.305	- 11.730.000	KECAMATAN CIGUDEG
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	416.490.795	383.019.432	- 33.471.363	KECAMATAN CIJERUK
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	382.887.134	347.859.319	- 35.027.815	KECAMATAN CILEUNGI
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.994.320.945	2.949.812.995	- 44.507.950	KECAMATAN CIOMAS
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3.352.422.510	3.331.297.492	- 21.125.018	KECAMATAN CISARUA

KODE REKENING	PROGRAM	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERKURANG/ BERTAMBAH	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	395.963.031	347.144.181	- 48.818.850	KECAMATAN CISEENG
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	5.459.940.254	5.436.890.254	- 23.050.000	KECAMATAN CITEUREUP
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	622.842.689	582.350.189	- 40.492.500	KECAMATAN DRAMAGA
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	492.478.886	486.488.536	- 5.990.350	KECAMATAN GUNUNG PUTRI
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	403.756.685	383.706.685	- 20.050.000	KECAMATAN GUNUNG SINDUR
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	340.184.471	325.011.321	- 15.173.150	KECAMATAN JASINGA
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	414.219.578	413.225.153	- 994.425	KECAMATAN JONGGOL
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.721.437.179	2.688.747.179	- 32.690.000	KECAMATAN KEMANG
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	489.953.541	450.173.541	- 39.780.000	KECAMATAN KLAPANUNGGAL
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	446.957.299	475.741.092	28.783.793	KECAMATAN LEUWILIANG
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	432.846.223	421.342.554	- 11.503.669	KECAMATAN LEUWISADENG
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	566.262.347	438.172.347	- 128.090.000	KECAMATAN MEGAMENDUNG

KODE REKENING	PROGRAM	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERKURANG/ BERTAMBAH	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	406.525.885	406.525.885	-	KECAMATAN NANGGUNG
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	258.739.809	351.412.550	92.672.741	KECAMATAN PAMIJAHAN
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	355.114.700	347.856.859	- 7.257.841	KECAMATAN PARUNG
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	421.960.499	404.544.749	- 17.415.750	KECAMATAN PARUNG PANJANG
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	389.677.473	372.677.473	- 17.000.000	KECAMATAN RANCABUNGUR
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	316.135.103	280.173.573	- 35.961.530	KECAMATAN RUMPIN
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	510.633.450	510.433.450	- 200.000	KECAMATAN SUKAJAYA
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	388.295.175	337.977.446	- 50.317.729	KECAMATAN SUKAMAKMUR
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	382.763.403	382.808.019	44.616	KECAMATAN SUKARAJA
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	559.925.334	524.028.474	- 35.896.860	KECAMATAN TAJURHALANG
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	385.783.686	368.193.436	- 17.590.250	KECAMATAN TAMANSARI
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	413.851.619	403.051.619	- 10.800.000	KECAMATAN TANJUNGSARI

KODE REKENING	PROGRAM	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERKURANG/ BERTAMBAH	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	383.231.095	374.328.595	- 8.902.500	KECAMATAN TENJO
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	124.706.496	350.947.546	226.241.050	KECAMATAN TENJOLAYA
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	120.784.800	81.164.800	- 39.620.000	KECAMATAN BABAKAN MADANG
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	126.795.240	99.415.240	- 27.380.000	KECAMATAN BOJONGGEDE
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	173.131.614	139.171.614	- 33.960.000	KECAMATAN CARINGIN
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	160.366.825	123.000.825	- 37.366.000	KECAMATAN CARIU
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	78.246.063	64.816.063	- 13.430.000	KECAMATAN CIAMPEA
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	157.485.600	121.785.600	- 35.700.000	KECAMATAN CIAWI
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	143.106.900	136.266.900	- 6.840.000	KECAMATAN CIBINONG
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	61.734.000	56.634.000	- 5.100.000	KECAMATAN CIBUNGBULANG
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	171.594.974	149.984.974	- 21.610.000	KECAMATAN CIGOMBONG
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	295.529.558	218.179.558	- 77.350.000	KECAMATAN CIGUDEG

KODE REKENING	PROGRAM	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERKURANG/ BERTAMBAH	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	166.917.554	143.967.554	- 22.950.000	KECAMATAN CIJERUK
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	96.400.584	70.040.584	- 26.360.000	KECAMATAN CILEUNGI
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	129.719.600	113.389.600	- 16.330.000	KECAMATAN CIOMAS
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	61.755.475	61.864.475	109.000	KECAMATAN CISARUA
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	110.517.562	102.867.562	- 7.650.000	KECAMATAN CISEENG
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	170.168.295	131.058.295	- 39.110.000	KECAMATAN CITEUREUP
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	104.500.000	97.020.000	- 7.480.000	KECAMATAN DRAMAGA
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	143.302.462	90.252.462	- 53.050.000	KECAMATAN GUNUNG PUTRI
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	151.498.750	134.698.750	- 16.800.000	KECAMATAN GUNUNG SINDUR
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	141.552.883	110.952.883	- 30.600.000	KECAMATAN JASINGA
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	91.910.289	68.740.289	- 23.170.000	KECAMATAN JONGGOL
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	259.141.878	217.491.878	- 41.650.000	KECAMATAN KEMANG

KODE REKENING	PROGRAM	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERKURANG/ BERTAMBAH	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	165.440.332	116.990.332	- 48.450.000	KECAMATAN KLAPANUNGGAL
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	91.785.957	79.545.957	- 12.240.000	KECAMATAN LEUWILIANG
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	176.682.867	146.082.867	- 30.600.000	KECAMATAN LEUWISADENG
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	59.198.050	59.198.050	-	KECAMATAN MEGAMENDUNG
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	90.116.986	65.116.986	- 25.000.000	KECAMATAN NANGGUNG
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	13.612.500	13.612.500	-	KECAMATAN PAMIJAHAN
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	81.397.900	78.797.900	- 2.600.000	KECAMATAN PARUNG
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	91.969.681	83.839.681	- 8.130.000	KECAMATAN PARUNG PANJANG
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	117.842.331	114.272.331	- 3.570.000	KECAMATAN RANCABUNGUR
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	116.370.980	86.827.135	- 29.543.845	KECAMATAN RUMPIN
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	120.225.350	120.225.350	-	KECAMATAN SUKAJAYA
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	90.620.140	88.920.140	- 1.700.000	KECAMATAN SUKAMAKMUR

KODE REKENING	PROGRAM	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERKURANG/ BERTAMBAH	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	130.999.413	195.646.413	64.647.000	KECAMATAN SUKARAJA
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	178.836.884	130.036.884	- 48.800.000	KECAMATAN TAJURHALANG
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	121.871.284	95.011.284	- 26.860.000	KECAMATAN TAMANSARI
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	134.699.194	132.149.194	- 2.550.000	KECAMATAN TANJUNGSARI
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	85.134.300	60.134.300	- 25.000.000	KECAMATAN TENJO
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	89.077.114	85.001.114	- 4.076.000	KECAMATAN TENJOLAYA
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	98.666.550	91.526.550	- 7.140.000	KECAMATAN BABAKAN MADANG
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	246.204.336	230.224.336	- 15.980.000	KECAMATAN BOJONGGEDE
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	139.427.164	126.747.164	- 12.680.000	KECAMATAN CARINGIN
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	62.387.375	56.097.575	- 6.289.800	KECAMATAN CARIU
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	51.842.566	51.806.579	- 35.987	KECAMATAN CIAMPEA
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	123.002.800	87.602.800	- 35.400.000	KECAMATAN CIAWI

KODE REKENING	PROGRAM	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERKURANG/ BERTAMBAH	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	418.728.687	335.776.187	- 82.952.500	KECAMATAN CIBINONG
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	12.720.000	12.720.000	-	KECAMATAN CIBUNGBULANG
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	206.439.482	190.416.283	- 16.023.199	KECAMATAN CIGOMBONG
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	59.145.018	49.195.018	- 9.950.000	KECAMATAN CIGUDEG
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	77.462.103	74.912.103	- 2.550.000	KECAMATAN CIJERUK
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	47.208.766	46.151.366	- 1.057.400	KECAMATAN CILEUNGS
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	63.491.689	41.491.689	- 22.000.000	KECAMATAN CIOMAS
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	94.538.875	91.818.875	- 2.720.000	KECAMATAN CISARUA
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	192.397.699	116.020.699	- 76.377.000	KECAMATAN CISEENG
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	20.148.946	17.938.946	- 2.210.000	KECAMATAN CITEUREUP
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	97.883.296	91.933.296	- 5.950.000	KECAMATAN DRAMAGA
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	39.360.600	39.360.600	-	KECAMATAN GUNUNG PUTRI

KODE REKENING	PROGRAM	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERKURANG/ BERTAMBAH	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	230.996.497	193.846.497	- 37.150.000	KECAMATAN GUNUNG SINDUR
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	54.938.395	25.188.395	- 29.750.000	KECAMATAN JASINGA
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	30.445.415	28.745.415	- 1.700.000	KECAMATAN JONGGOL
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	144.231.037	144.231.037	-	KECAMATAN KEMANG
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	83.542.677	83.542.677	-	KECAMATAN KLAPANUNGGAL
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	124.452.261	120.542.261	- 3.910.000	KECAMATAN LEUWILIANG
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	45.661.245	45.661.245	-	KECAMATAN LEUWISADENG
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	29.267.400	29.267.400	-	KECAMATAN MEGAMENDUNG
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	154.280.741	154.280.741	-	KECAMATAN NANGGUNG
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	28.594.500	28.594.500	-	KECAMATAN PAMIJAHAN
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	104.380.450	100.195.450	- 4.185.000	KECAMATAN PARUNG
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	215.736.731	211.195.731	- 4.541.000	KECAMATAN PARUNG PANJANG

KODE REKENING	PROGRAM	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERKURANG/ BERTAMBAH	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	59.289.928	46.709.928	- 12.580.000	KECAMATAN RANCABUNGUR
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	101.245.126	84.129.596	- 17.115.530	KECAMATAN RUMPIN
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	212.621.780	212.621.780	-	KECAMATAN SUKAJAYA
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	81.965.701	68.365.701	- 13.600.000	KECAMATAN SUKAMAKMUR
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	94.064.055	94.064.055	-	KECAMATAN SUKARAJA
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	111.767.878	111.767.878	-	KECAMATAN TAJURHALANG
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	52.915.109	52.915.109	-	KECAMATAN TAMANSARI
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	235.452.250	268.749.234	33.296.984	KECAMATAN TANJUNGSARI
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	70.259.050	70.259.050	-	KECAMATAN TENJO
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	146.411.183	109.410.183	- 37.001.000	KECAMATAN TENJOLAYA
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	379.066.952	462.817.452	83.750.500	KECAMATAN BABAKAN MADANG
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	368.875.894	367.235.894	- 1.640.000	KECAMATAN BOJONGGEDE

KODE REKENING	PROGRAM	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERKURANG/ BERTAMBAH	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	309.863.423	431.261.471	121.398.048	KECAMATAN CARINGIN
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	418.826.734	374.654.307	- 44.172.427	KECAMATAN CARIU
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	119.195.480	234.060.904	114.865.424	KECAMATAN CIAMPEA
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	259.443.100	357.093.100	97.650.000	KECAMATAN CIAWI
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	188.249.500	280.835.200	92.585.700	KECAMATAN CIBUNGBULANG
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	574.295.740	604.253.918	29.958.178	KECAMATAN CIGOMBONG
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	278.577.382	493.833.382	215.256.000	KECAMATAN CIGUDEG
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	266.364.152	439.081.302	172.717.150	KECAMATAN CIJERUK
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	195.512.358	220.582.358	25.070.000	KECAMATAN CILEUNGS
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	133.250.553	222.803.856	89.553.303	KECAMATAN CIOMAS
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	388.946.675	452.536.480	63.589.805	KECAMATAN CISARUA
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	161.788.766	289.922.384	128.133.618	KECAMATAN CISEENG

KODE REKENING	PROGRAM	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERKURANG/ BERTAMBAH	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	425.446.248	417.286.248	- 8.160.000	KECAMATAN CITEUREUP
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	306.111.110	307.101.110	990.000	KECAMATAN DRAMAGA
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	200.694.014	258.114.303	57.420.289	KECAMATAN GUNUNG PUTRI
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	485.588.254	496.808.254	11.220.000	KECAMATAN GUNUNG SINDUR
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	355.083.686	328.843.686	- 26.240.000	KECAMATAN JASINGA
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	362.864.355	371.669.355	8.805.000	KECAMATAN JONGGOL
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	310.731.472	535.278.609	224.547.137	KECAMATAN KEMANG
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	490.132.189	530.682.503	40.550.314	KECAMATAN KLAPANUNGGAL
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	221.898.685	246.929.785	25.031.100	KECAMATAN LEUWILIANG
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	264.018.079	310.698.079	46.680.000	KECAMATAN LEUWISADENG
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	130.891.000	189.490.450	58.599.450	KECAMATAN MEGAMENDUNG
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	234.620.517	299.493.017	64.872.500	KECAMATAN NANGGUNG

KODE REKENING	PROGRAM	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERKURANG/ BERTAMBAH	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	267.077.475	323.301.175	56.223.700	KECAMATAN PAMIJAHAN
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	314.628.350	370.418.350	55.790.000	KECAMATAN PARUNG
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	410.455.066	514.011.285	103.556.219	KECAMATAN PARUNG PANJANG
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	266.186.747	269.916.747	3.730.000	KECAMATAN RANCABUNGUR
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	178.187.353	188.057.663	9.870.310	KECAMATAN RUMPIN
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	476.806.050	528.601.050	51.795.000	KECAMATAN SUKAJAYA
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	316.704.615	264.842.790	- 51.861.825	KECAMATAN SUKAMAKMUR
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	187.913.829	299.612.839	111.699.010	KECAMATAN SUKARAJA
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	350.765.993	494.109.964	143.343.971	KECAMATAN TAJURHALANG
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	164.882.470	209.067.470	44.185.000	KECAMATAN TAMANSARI
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	292.076.970	349.730.811	57.653.841	KECAMATAN TANJUNGSARI
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	242.766.826	238.300.861	- 4.465.965	KECAMATAN TENJO

KODE REKENING	PROGRAM	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERKURANG/ BERTAMBAH	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	650.733.317	449.578.391	- 201.154.926	KECAMATAN TENJOLAYA
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.301.436.407	13.322.353.745	- 3.979.082.662	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	4.633.998.855	4.613.384.930	- 20.613.925	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	95.194.066.106	78.054.132.976	- 17.139.933.130	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	5.412.472.056	4.399.364.704	- 1.013.107.352	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	2.034.738.224	1.076.247.957	- 958.490.267	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	4.030.180.604	4.330.842.902	300.662.298	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	TOTAL	11.444.340.780.022	12.294.531.852.015	850.191.071.993	

Sumber : Data Diolah, 2025

Rincian belanja per perangkat daerah yang menampilkan rincian indikator kinerja program, kegiatan dan subkegiatan pada Perubahan RKPD Kabupaten Bogor Tahun 2025 disajikan pada Buku III.

BAB VI

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bogor Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang disusun dalam rangka memastikan kesesuaian penyelenggaraan pembangunan daerah dengan visi, misi serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta program prioritas Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden dalam RPJMN tahun 2025-2029. Selain itu, dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025 disusun untuk mengantisipasi adanya ketidaksesuaian pada hasil evaluasi pelaksanaan sampai dengan triwulan I, yang meliputi ketidaksesuaian asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan, serta keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Selanjutnya, dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025 akan dipedomani dalam tahapan penganggaran, mulai dari penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUPA), Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS-P), hingga ditetapkannya Perubahan APBD Tahun 2025, serta menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Sejalan dengan hal tersebut, dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025 dipergunakan sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil program, kegiatan dan subkegiatan pembangunan agar tetap mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Oleh karena itu, komitmen seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Bogor untuk memedomani program, kegiatan dan subkegiatan yang dituangkan dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 menjadi penentu keberhasilan sehingga hasilnya dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.



The image shows the official circular seal of Kabupaten Bogor, featuring a Garuda bird in the center and the words 'BUPATI BOGOR' and 'BOGOR' around the perimeter. Overlaid on the seal is a handwritten signature in blue ink. Below the signature, the name 'RUDY SUSMANTO' is printed in blue capital letters.